



Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

Buku 2

JALAN MENUJU MODERASI

Modul Penguatan
Moderasi Beragama Bagi Guru



Jalan Menuju Moderasi
Modul Penguatan Moderasi Beragama Bagi Guru

Pembaca Ahli:

M. Ali Ramdhani, Rohmat Mulyana Sapdi, Muhammad Zain, Alissa Wahid, Abdul Rochman, Ishfah Abidal Azis, Bahrul Hayat

Penyunting/Editor: Anis Masykhur

Penulis: Agus Muhammad, Sigit Muryono

Tim Diskusi: Yanto Bashri, Abdul Munir, Khoirul Anam, Mokhammad Iksan, Ali Muhtarom, Mahnan Marbawi, Ala'i Najib, A. Khoirul Anam, Abdul Azis, M. Zarkasyih, Siti Kholisoh, Irfan Amalee.

Desain isi dan cover: Tim Welas Asih Media
Proofreader: Afrizal Fahmi & Lufti Noorfitriyani

Cetakan I, Juni 2021

ISBN: 978-623-6856-19-2 (ebook)
978-623-6856-18-5 (cetak)

Penerbit:

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Jl. Lapangan Banteng No. 3-4 Jakarta,
<http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/>
email: direktorat.pai@kemenag.go.id | direktorat.pai@gmail.com



PENGANTAR

Buku ini adalah “buku 2” yang akan dijadikan pegangan bagi para lembaga pembina guru, seperti Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota, atau lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Modul ini diberi judul “Jalan Menuju Moderasi: Modul Penguatan Moderasi Beragama Bagi Guru,” karena berisikan tentang langkah-langkah bagaimana mengubah mindset guru dari tidak moderat menjadi moderat melalui sebuah pendidikan dan pelatihan khusus. Sebagai sebuah modul, buku ini memberikan guidance secara detail kepada penyelenggara di setiap tahapannya.

Untuk menggunakan buku ini, institusi pembina agar mengarahkan peserta untuk membaca buku I yakni tentang “*Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Islam*”, atau buku-buku sejenis yang menjelaskan tentang konsep dan nilai moderasi beragama.

Perhatikan betul tahapan-tahapan penyampaian substansi modul ini, agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan.

Penulis berharap, para pembaca untuk dapat membaca dan mendalami buku-buku pendukung lain untuk melengkapi pemahaman tentang moderasi beragama ini. Tulisan tuntas tentang pengertian jihad, kafir, hijrah, darul Islam, darul harb, baiat, al-wala dan al-barra’, dan sejenisnya perlu digali lebih dalam. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh informasi yang tuntas tentang hal tersebut. Sebab, istilah-istilah tersebut sering disalahartikan dan juga disalahgunakan.

Semoga membawa berkah.

Jakarta, 30 April 2021

Tim Penulis



SAMBUTAN

Direktur Pendidikan Agama Islam

Saya bersyukur atas terselesaikannya modul ke-2 dari empat buku yang ditargetkan. Modul 2 ini diberi judul “Jalan Menuju Moderasi: Modul Penguatan Moderasi Beragama Bagi Guru,” dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai moderasi dalam pola pikir dan perilaku para pendidik. Tidak hanya sampai di situ, modul ini juga didesain untuk mengubah mindset pendidik dari tidak moderat menjadi moderat, dari kondisi moderat menjadi siap sebagai agen moderasi beragama. Dalam proses penguatan wawasan moderasi beragama, dilakukan proses pelatihan dimana para instruktur mengingatkan peserta diklat untuk membaca buku 1, yakni nilai-nilai utama moderasi dalam ajaran Islam.

Kita semua mengetahui bahwa guru agama (terutama Islam) lembaga formal memegang peran vital dalam pendidikan nasional. Mereka memegang pengaruh yang kuat dalam menanamkan dan memberikan informasi yang benar tentang keterkaitan agama dan negara kepada peserta didik. Guru harus memberikan pemahaman yang benar mengenai konsep ini, mengingat isu agama sering dijadikan alat propaganda oleh kelompok tertentu untuk menggerogoti keutuhan negara dan bangsa.

Data statistik pendidikan menginformasikan bahwa jumlah total siswa secara nasional mencapai 45,5 juta. Jika 80%- nya adalah siswa muslim berarti populasinya mencapai 36,4 juta, yang juga berarti adalah 13% dari jumlah penduduk keseluruhan. Mereka adalah generasi bangsa yang akan memimpin dan melanjutkan menjaga keutuhan NKRI di masa yang akan datang.

Meskipun penulisan modul ini dalam konteks implementasi program Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI), namun buku 1 dan modul 2 ini juga dapat digunakan oleh kalangan luas, seperti di kalangan pendidik madrasah, asatidz pendidikan keagamaan, maupun masyarakat lainnya, bahkan untuk guru secara umum.

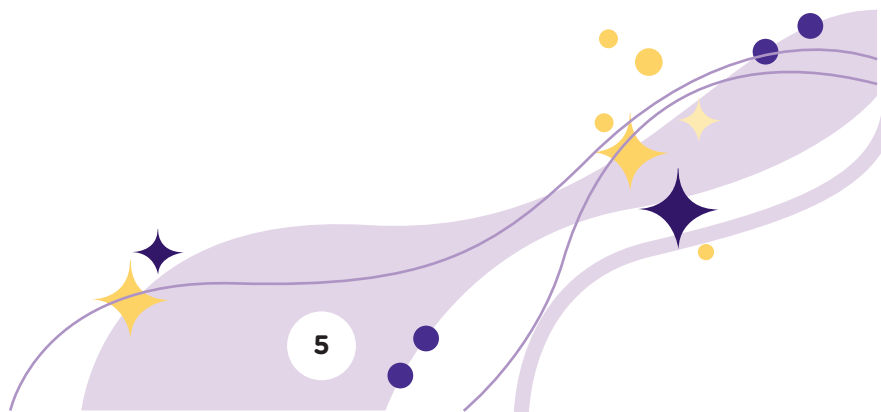
Kelebihan modul yang ada di tangan pembaca saat ini adalah hasil final yang telah diujicobakan berkali-kali di beberapa sekolah dan madrasah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui program *piloting* “Laboratorium PAI Moderasi”, buku pedoman dan modul moderasi beragama telah mendapatkan *feedback* dari masyarakat pendidikan secara langsung. Bahkan, beberapa *expertise* pendidikan karakter juga dilibatkan untuk memastikan bahwa muatan pedoman dan modul ini bersentuhan pula dengan program penguatan pendidikan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Saya berterima kasih kepada tim penulis dan para *reviewer* internal dan eksternal yang telaten mengawal agar penulisan pedoman dan modul ini sesuai dengan target yang diharapkan. Saya juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada INOVASI yang memfasilitasi penyelesaian penyusunan modul moderasi beragama ini.

Pada akhirnya, kita semua berharap modul ini dan tiga buku yang lain membawa manfaat bagi bangsa dan memberikan sumbangsih yang berarti untuk menjaga keutuhan NKRI.

Jakarta, 30 April 2021

Dr. Rohmat Mulyana Sapdi, M.Pd



SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Saya bersyukur dan berbahagia bahwa Direktorat Pendidikan Agama Islam telah berhasil menyelesaikan penyusunan dan penerbitan 4 (empat) modul implementasi moderasi beragama. Penerbitan 4 (empat) modul oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini membanggakan bagi Kementerian Agama terutama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kehadiran modul-modul tersebut adalah bukti riil implementasi moderasi beragama pada pendidikan dan pembelajaran Agama Islam diharapkan berjalan dengan baik.

Landasan pentingnya Moderasi Beragama secara gamblang disebutkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Amanah dari RPJMN tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Agama RI. Melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, menegaskan moderasi beragama sebagai prioritas utama yang harus mewarnai semua langkah dan gerak program lembaga-lembaga yang berada di bawah binaan Kementerian Agama. Bersamaan dengan penulisan pedoman dan modul ini, Kementerian Agama sedang mengupayakan agar moderasi beragama dipayungi secara khusus dalam peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Sebagai inisiatif awal, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Keputusan Dirjen No 7272 tahun 2019 telah menerbitkan Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam. Dengan kewenangan yang dimiliki, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah bergerak untuk memastikan bahwa pondasi moderasi beragama dilaksanakan pada seluruh direktorat teknis di bawah Ditjen Pendis dan juga lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya, mulai jenjang pendidikan *Raudlatul Athfal* (RA) hingga perguruan tinggi keagamaan Islam; Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah

penguatan pendidikan agama Islam di PAUD hingga perguruan tinggi umum.

Untuk mengoptimalkan penerapan modul ini di sekolah, Kementerian Agama telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya yakin, modul ini akan memberikan sumbangsih terhadap pembangunan wajah Indonesia yang moderat melalui dunia Pendidikan. Bagi unit teknis selain Direktorat PAI, modul agar dimodifikasi dan diduplikasi untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Terima kasih disampaikan kepada tim penulis, INOVASI, dan semua pihak yang membantu menyukseskan penyusunan dan penerbitan modul moderasi beragama ini.

Selamat dan semoga membawa berkah untuk bangsa dan negara. Selamat membaca dan menerapkannya!

Jakarta, 30 April 2021

Direktur Jenderal,
Prof. Dr. M. Ali Ramdhani, MT



DAFTAR SINGKATAN



| | |
|----------------|--|
| Dirjen | : Direktur Jendral |
| Ditjen | : Direktorat Jenderal |
| HR | : Hadis Riwayat |
| INOVASI | : Inovasi Untuk Anak Indonesia |
| Kemenag | : Kementerian Agama |
| KMA | : Keputusan Menteri Agama |
| MoU | : <i>Memorandum of Understanding</i> |
| PAI | : Pendidikan Agama Islam |
| PAUD | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Pendis | : Pendidikan Islam |
| PMA | : Peraturan Menteri Agama |
| Pokja | : Kelompok Kerja |
| QS | : Quran Surat |
| SARA | : Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan |
| Saw | : <i>Shallallah 'alaihi wasallam</i> |
| Swt | : <i>Subhanallah wa ta'ala</i> |



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PENDAHULUAN

MATERI I:

BINA SUASANA 39

MATERI II:

MEMAHAMI FENOMENA EKSTREMISME BERAGAMA 53

MATERI III:

BELAJAR DARI PELAKU DAN KORBAN EKSTREMISME BERAGAMA 75

MATERI IV:

MODERASI BERAGAMA DALAM KONSEP 89

MATERI V:

MODERASI BERAGAMA DALAM SEJARAH KEBANGSAAN 106

MATERI VI:

PEMETAAN SOSIAL UNTUK PENGUATAN MODERASI BERAGAMA 120

MATERI VII:

INTERNALISASI 9 NILAI MODERASI BERAGAMA 132

MATERI VIII:

PEMBENTUKAN PERILAKU DAN KULTUR MODERAT DI SEKOLAH 148

MATERI IX:

PERUMUSAN RENCANA TINDAK LANJUT 161

DAFTAR PUSTAKA 165

PENULIS DAN KONTRIBUTOR 168

PENDAHULUAN

A. Rasional

Penguatan moderasi beragama kini menjadi perhatian besar dari berbagai pihak. Pemerintah menunjukkan perhatian yang tidak kalah besar. Hal ini bisa dilihat dari lahirnya dua kebijakan nasional yang berhubungan langsung dengan upaya penguatan moderasi beragama, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Perpres No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. Dua kebijakan penting ini merupakan payung hukum bagi pelaksanaan program penguatan moderasi beragama di Tanah Air. Dengan dua kebijakan ini, penguatan moderasi beragama tidak lagi bersifat opsional (sebaiknya dilakukan), tetapi *obligatory* (wajib dilakukan).

Dalam RPJMN 2020-2024, topik moderasi beragama merupakan salah satu isu penting yang dibahas dengan cukup panjang lebar. Topik moderasi menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu dari 5 (lima) prioritas nasional, yakni (1) pembangunan sumber daya manusia, (2) pembangunan infrastruktur, (3) penyederhanaan regulasi, (4) penyederhanaan birokrasi, dan (5) transformasi ekonomi. Dalam pembangunan SDM, terdapat point pembangunan karakter yang salah satu dari karakter itu adalah moderasi beragama. Di samping itu, moderasi beragama juga menjadi agenda penting dalam program Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: (1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; (2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; (3) Moderasi beragama; dan (4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Dalam dokumen RPJMN ini juga ditekankan bahwa moderasi beragama merupakan upaya strategis dalam rangka memperkuat toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Masyarakat Indonesia yang memeluk agama beragam perlu mengembangkan wawasan dan sikap moderasi beragama, untuk membangun saling pengertian, merawat keragaman, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda. Perspektif moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama.

Satu arah kebijakan dalam RPJMN adalah memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, melalui: (1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; (2) Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; (3) Penyelarasan relasi agama dan budaya; (4) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan (5) Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.

Sementara, kebijakan lain yang tak kalah pentingnya adalah Perpres No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. Meski secara eksplisit tidak secara langsung terkait dengan moderasi beragama, namun masyarakat bisa menduga bahwa salah satu tujuan dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN-PE) ini adalah terwujudnya masyarakat yang jauh dari penggunaan kekerasan, khususnya yang mengarah pada terorisme. Dari segi substansi, tujuan ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang diharapkan dari agenda moderasi beragama. Bahkan, dalam RAN-PE ini secara eksplisit dinyatakan dalam salah satu rencana aksi yang dicanangkan adalah pelatihan penceramah agama mendorong moderasi beragama.

RAN PE ini mencakup tiga pilar penting, yakni (1) pencegahan dan penanggulangan; (2) penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional; dan (3) kemitraan dan kerja sama internasional. Secara

keseluruhan, baik dalam proses maupun pelaksanaannya, RAN PE memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia; supremasi hukum dan keadilan; pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; keamanan dan keselamatan; tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; serta kebhinekaan dan kearifan lokal.

Ada lima tujuan besar yang hendak dicapai dari RAN-PE ini agar pencegahan ekstremisme berhasil, yakni (1) koordinasi antar Kementerian/Lembaga lebih meningkat; (2) koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemda, masyarakat sipil, dan mitra lain meningkat; (3) memiliki sistem pendataan dan pemantauan yang lebih baik; (4) kapasitas para pelaksana meningkat khususnya terkait isu pencegahan ekstremisme; dan (5) kerja sama internasional meningkat.

Meski cukup menjanjikan, lahirnya kebijakan RPJMN, yang salah satu agendanya mengusung moderasi beragama dan RAN-PE bukan jaminan bahwa ekstremisme dengan sendirinya bisa dihentikan dan pada saat yang sama moderasi beragama dapat diwujudkan. Sebuah kebijakan akan berjalan efektif jika perangkat kekuasaan memiliki paradigma yang sama sehingga dapat memberikan dukungan penuh bagi implementasi kebijakan tersebut.

Disadari atau tidak, pencegahan ekstremisme kekerasan dan penguatan moderasi beragama belum menjadi isu prioritas di kalangan pemegang dan pelaksana kebijakan. Riset “Implementasi Kebijakan Pencegahan Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan di Perguruan Tinggi, Tempat Ibadah, dan Media Sosial di Indonesia” yang dilakukan INFID (2020) menyimpulkan bahwa dari empat kebijakan pencegahan intoleransi dan ekstremisme, sebagian besar belum diimplementasikan dengan baik dan menghadapi beberapa tantangan, terutama dari segi konsep dan implementasi. Riset ini seolah ingin menegaskan bahwa dukungan perangkat kekuasaan terhadap implementasi pencegahan intoleransi dan ekstremisme kekerasan masih sangat rendah.

Itulah sebabnya, sebagaimana isu sosial pada umumnya,

pengecahan ekstremisme dan penguatan moderasi beragama tidak bisa mengandalkan pemerintah semata. Berbagai elemen sosial, mau tidak mau, harus mengambil inisiatif yang lebih aktif, partisipatif dan massif. Sehingga penguatan moderasi beragama bisa bergema di segala lini dan menghasilkan resonansi yang mampu mengubah cara pandang, sikap dan tindakan yang lebih moderat.

B. Tantangan Moderasi Beragama

Pentingnya moderasi beragama memiliki akar yang sangat dalam dan kokoh. Dari segi pendasaran, moderasi beragama tidak membutuhkan alasan atau pembenaran (justifikasi) karena pada dirinya tidak ditemukan alasan untuk menolak atau mengabaikannya. Yang terjadi justru sebaliknya. Tanpa justifikasi apa pun, moderasi beragama tetap dibutuhkan. Dalam nash Al-Qur'an maupun hadits, tidak ditemukan satu pun yang menolak atau mengingkari atau melarang moderasi agama; justru moderasi beragama adalah substansi agama itu sendiri.

Karena itu, sangat bisa dipahami jika ada banyak contoh moderasi beragama yang dipraktikkan Nabi Muhammad Saw dan para Sahabat, seperti contoh penghormatan Nabi ke jenazah Yahudi yang sedang lewat di hadapannya. Meski pada dirinya sudah ada kebaikan yang diakui semua orang, ternyata tidak selalu mudah mempraktikkannya di dunia nyata. Ada banyak tantangan yang tidak ringan. Dan ini menjadi alasan tersendiri kenapa moderasi beragama penting. Di antara sekian banyak tantangan moderasi beragama adalah masih menguatnya kecenderungan ekstremisme beragama di Indonesia. Sudah banyak riset dilakukan mengenai fenomena ekstremisme beragama, atau radikalisme secara umum. Salah satu yang paling disoroti adalah fenomena kecenderungan terjadi ekstremisme di kampus.

Fenomena ekstremisme di kampus sesungguhnya tidak terjadi begitu saja. Ada proses panjang yang melatarbelakangi fenomena ini. Datangnya era reformasi pada Mei 1998 menjadi pintu masuk bagi kelompok-kelompok yang sudah mulai

mengakar di kampus. Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan oleh Litbang Departemen Agama tahun 1996 pada empat perguruan tinggi sekuler yakni UI, UGM, Unair dan Unhas, seperti dikutip Saifuddin (2011), dosen UIN Sunan Kalijaga, terjadi peningkatan aktivitas keagamaan di sejumlah kampus-kampus tersebut. Disebutkan bahwa kampus-kampus tersebut menjadi tempat yang paling potensial berkembangnya aktivitas keislaman (religius) yang cenderung eksklusif dan menuju ekstrem. Dengan demikian, revivalisme Islam tidak muncul dari kampus-kampus berbasis keagamaan, tetapi dari kampus-kampus sekuler atau umum.

Kelompok-kelompok di kampus yang kemudian terkenal dengan nama Gerakan *Tarbiyah* adalah kelompok yang paling awal melakukan penetrasi ke mahasiswa. Bisa dipahami jika penelitian Anas Saidi dan Masykuri Bakri (2016) menemukan bahwa *Tarbiyah* hampir memonopoli kampus-kampus umum. Meskipun tujuan akhirnya adalah menegakkan syariat Islam (Negara Islam). Agaknya mereka belajar dari pengalaman Masyumi. Ketidaksabarannya dalam menegakkan syariat Islam, membuat pengusung utama Piagam Jakarta ini dibubarkan Soekarno. Sikap keras yang tanpa strategi adaptasi yang memadai, membuat perjuangan mendirikan Negara Islam itu, layu sebelum berkembang. Penelitian Anas dan Masykuri bahkan menemukan fakta lain bahwa faksi-faksi radikal tidak hanya dari kelompok *Tarbiyah*, tetapi juga dari kelompok lain seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Penelitian Rita Pranawati dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta tentang “Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Studi Kasus UI dan UIN Jakarta” (Desember 2012), menunjukkan bahwa ide-ide radikal telah ‘berhasil’ secara kuat melakukan penetrasinya ke sejumlah mahasiswa di UI. Hal itu kita bisa lihat dengan mencermati hasil beberapa indikator kunci, misalnya, persetujuan terhadap kewajiban penegakan negara Islam yang relatif besar, (64,4%); pemerintahan yang tidak menggunakan hukum Islam boleh diperangi/dikudeta sebanyak 17%.

Penelitian yang relatif baru dilakukan oleh Alvara Research Center (Desember 2017) terhadap 25 kampus unggulan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa yang setuju dengan negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah mencapai 23.5%. Mahasiswa yang setuju Khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal dibanding NKRI mencapai 17.8%. Mahasiswa yang setuju dengan pernyataan bahwa saya siap berjihad untuk tegaknya negara Islam/khilafah mencapai 23.4%.

Dalam paparannya, Alvara Research Center juga mengutip survei BNPT (2016) kepada pemuda yang menemukan bahwa 26.7% setuju dengan jihad menggunakan kekerasan. Dalam survei berikutnya, April 2017, kepada mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia BNPT menemukan bahwa 39% mahasiswa tertarik untuk masuk ke organisasi radikal (mengganti ideologi negara). Temuan riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang dirilis awal Maret menunjukkan bahwa sebanyak 30,16 persen mahasiswa Indonesia memiliki sikap toleransi beragama yang rendah atau intoleran. Angka ini tentu sangat mengkhawatirkan. Riset yang lebih baru dilakukan oleh Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang dirilis Selasa (23/3/2021). Secara umum persepsi dan sikap generasi muda terhadap intoleransi dan ekstremisme menunjukkan tren penolakan yang cukup tinggi, tetapi mereka masih sangat rentan untuk menjadi intoleran.

Secara lebih spesifik, data yang berkenaan dengan pelajar justeru lebih mengejutkan lagi. PPIM Jakarta 2018 menyajikan hasil survei potensi dan persepsi para pelajar/mahasiswa Muslim dengan temuan mencengangkan; 37.7% responden memahami konsep jihad semata dalam bentuk perang (*qital*); 23.3% meyakini bom bunuh diri sebagai bentuk jihad; 34% menilai orang murtad wajib dibunuh; dan 33.3% responden menyatakan tindakan intoleransi kepada kaum minoritas sebagai sebuah kelaziman. PPIM juga menyajikan temuan spesifik; 58% responden menyebut “medsos”; 48% merujuk “buku” keagamaan; 33.7% menulis “televisi”; dan 17.1% menyebut “pengajian” sebagai sumber rujukan yang paling

memberi pengaruh besar pada pemahaman keagamaan di atas.

Selain pelajar/mahasiswa, PPIM juga menyajikan temuan terkait dengan guru dan dosen; 49% guru dan dosen menyatakan tidak setuju jika pemerintah melindungi kelompok minoritas yang menyimpang; 86.5% guru dan dosen setuju pemerintah melarang keberadaan kelompok yang menyimpang; 57% guru dan dosen setuju Yahudi adalah musuh Islam; dan 65.5% guru dan dosen tidak setuju pendirian rumah ibadah di lingkungannya.

Khusus tentang buku-buku PAI (Pendidikan Agama Islam), riset PPIM mencatat, 48.9% pelajar Muslim yang merupakan generasi Z memilih untuk “tidak-bergaul” lagi dengan pemeluk agama lain dan 12.9% memilih “tidak lagi menghargai” orang lain yang berbeda pendapat justru setelah mengkonsumsi buku-buku PAI yang diajarkan secara formal di sekolah-sekolah agama.

Berbagai riset di atas seolah ingin mengatakan bawa fenomena ekstremisme beragama masih menjadi ancaman serius. Fenomena ekstremisme beragama adalah fakta riil yang ada di di depan mata, fakta yang tidak bisa lagi ditolak maupun diabaikan. Fakta ini menjadi tantangan tersendiri betapa jalan moderasi masih panjang.

C. Memahami Konsep Moderasi

Secara sederhana moderasi bisa dimaknai sebagai sikap yang menolak segala bentuk tindakan atau pemikiran yang ekstrem. Seorang ulama besar Yusuf Al-Qaradawi (2011) menyebut beberapa kosa kata yang serupa maknanya dengan moderasi, yakni kata *tawazun*, *i'tidal*, *ta'adul* dan *istiqamah*. Moderasi beragama menurutnya adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap ekstrem yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih

dari porsi yang semestinya.

Terminologi *wasathiyah* ini merupakan identitas dan watak dasar Islam. Lawan kata dari moderat, menurut Khaled Abou El-Fadl (2005), adalah puritan. Bagi El-Fadl, gerakan Wahabi yang dimotori oleh Muhammad ibn Abd al-Wahab (1703-1787) adalah kelompok yang paling getol mengusung gagasan-gagasan puritan dalam Islam. Ciri khas pendekatan fiqh yang dilakukan Wahabi adalah hasilnya yang bersifat pasti, kesimpulannya tidak bisa digugat, dan penetapannya yang bersifat tegas. Karakter seperti ini menghalangi sementara kaum Muslim untuk dapat secara jernih memahami pesan-pesan Al-Qur'an sebagai instrumen ilahiah yang memberikan panduan nilai-nilai moral dan etis yang benar bagi kehidupan manusia.

Dalam realitasnya, kelompok puritan tidaklah tunggal, sebagaimana kelompok muslim moderat juga sangat beragam. Namun demikian, ada benang merah yang dapat ditarik dari muslim moderat. Muslim moderat adalah mereka yang hidup dan bekerja dalam masyarakat, mengusahakan perubahan dari bawah, menolak ekstremisme agama, dan menganggap kekerasan dan terorisme sebagai sesuatu yang haram (John L. Esposito, 2008).

Berdasarkan realitas empirik di Indonesia kekinian, terdapat empat parameter utama dari moderasi beragama, antara lain: komitmen kebangsaan; toleransi; anti-kekerasan; dan ramah terhadap kebudayaan lokal.

- 1) Komitmen Kebangsaan. Menakar tingkat komitmen kebangsaan saat ini sangat urgen jika dikaitkan dengan kemunculan berbagai paham keagamaan baru yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya nusantara sebagai identitas kebangsaan. Pada tingkat tertentu, paham keagamaan baru ini mencoba mempertentangkan ajaran agama vis-à-vis budaya dan negara.
- 2) Level Toleransi. Level toleransi merujuk pada kemampuan individu, kelompok, masyarakat dan warga negara dalam menunjukkan sikap dan ekspresi

keagamaan yang menjunjung tinggi perbedaan yang terjadi di masyarakat. Toleransi di sini tidak hanya terkait dengan pola hubungan intra-agama dan antar-agama, namun juga terkait dengan toleransi dalam bidang sipil dan politik.

- 3) Anti-Radikalisme dan Nir-Kekerasan. Tolak ukur ini mengacu pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, menghormati, dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat, tanpa kekerasan.
- 4) Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Indikator ini untuk menakar sejauhmana “pemahaman” keagamaan tertentu mampu berdialog dan mengakomodasi praktik-praktik tradisi dan kebudayaan lokal. Pemahaman keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga paradigma kontekstualis yang positif.

Dalam forum Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Islam *Wasathiyah* (Islam moderat) yang dihadiri oleh sekitar 100 ulama dari berbagai negara di Bogor (1-3 Mei 2018), ditegaskan bahwa moderasi beragama sudah dipraktikkan sejak masa Nabi dan Sahabat. Para ulama dalam KTT ini mendeklarasikan tujuh butir nilai moderasi beragama, yakni *tawassut* (posisi di tengah-tengah dan lurus); *i'tidal* (berperilaku proporsional, adil dan bertanggung jawab); *tasamuh* (menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan); *syura* (mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah); *islah* (keterlibatan dalam tindakan konstruktif untuk kebaikan bersama); *qudwah* (merintis inisiatif mulia untuk kesejahteraan umat manusia); dan *muwathanah* (mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan).

Dalam tradisi keagamaan di Indonesia, ketujuh nilai moderasi di atas sebetulnya sudah dipraktikkan sejak lama. Pemikiran keagamaan yang dikembangkan adalah keseimbangan (jalan tengah) antara penggunaan wahyu (*naqliyah*) dan rasio

(*'aqliyah*) sehingga dimungkinkan terjadi akomodasi terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan doktrin-doktrin yang *qath'iy* (pasti). Sikap toleran, moderat dan santun merupakan representasi tradisi keagamaan di Indonesia. Seperti direkam Zamakhsyari Dhofier (1982), dalam tradisi keagamaan di Indonesia, suatu tradisi tidak langsung dihapus seluruhnya, juga tidak diterima seluruhnya, tetapi berusaha secara bertahap diislamisasi (diisi dengan nilai-nilai Islam).

Kini situasinya agak berbeda. Jalan moderasi beragama seperti yang kita harapkan masih akan panjang. Bukan semata-mata karena ancaman intoleransi dan kekerasan berbasis agama masih mengkhawatirkan, tetapi juga karena paradigma moderasi beragama itu sendiri belum sepenuhnya bulat. Riset P3M dan Maarif Institute (2018) mengenai peran ormas Islam moderat dalam pencegahan ekstremisme kekerasan menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah tidaklah tunggal dalam masalah moderasi beragama. Sekalipun secara umum karakter moderat Muhammadiyah dan NU sangat kuat, namun dalam kasus-kasus tertentu ditemukan perbedaan pandangan di antara sesama pengurus maupun antara pimpinan dengan jamaah. Keputusan resmi organisasi tidak selalu bisa menjadi keputusan akhir yang sepenuhnya mengikat, terutama jika menyangkut isu-isu keagamaan kontroversial. Jika dua ormas Islam terbesar ini masih belum sepenuhnya bulat mengenai moderasi beragama, maka jalan moderasi beragama masih harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh untuk bisa menjadi kenyataan riil.

Modul yang berada di tangan pembaca ini adalah usaha untuk berkontribusi agar moderasi beragama betul-betul terwujud dan menjadi karakter dan gaya hidup dari bangsa ini. Modul ini direncanakan untuk menjadi buku panduan dalam pelatihan moderasi beragama bagi guru, khususnya guru agama. Pentingnya modul ini didasarkan pada asumsi bahwa mencetak generasi berkarakter moderat harus dilakukan juga di jalur pendidikan. Guru memiliki posisi strategis dalam upaya mencetak generasi yang moderat. Itulah sebabnya, sebelum mendidik siswa siswi menjadi moderat, maka guru

harus dipatikan memiliki cara pandang atau paradigma yang moderat. Jika guru memiliki paradigma yang moderat, maka ucapan, sikap dan tindakan akan merefleksikan sikap moderat. Keteladanan moderat dari guru akan menjadi faktor penting dalam mencetak generasi yang moderat.

D. Panduan Penggunaan Modul

Modul ini adalah panduan penyelenggaraan pelatihan moderasi beragama bagi guru. Modul ini secara khusus ditujukan untuk pelatihan bagi guru karena mereka adalah salah satu tokoh kunci di dalam dunia pendidikan. Pelatihan ini diharapkan dapat dijadikan ajang untuk memperkuat paradigma moderasi beragama sehingga bisa dijadikan modal untuk menamkan nilai-nilai moderasi di sekolah dan sekaligus pembentukan kultur moderat di sekolah.

Di samping memberikan gambaran umum bagaimana pelaksanaan pelatihan moderasi beragama, modul ini juga disertai bahan bacaan dan langkah-langkah pembelajaran yang dapat memperkaya dan mempertajam cara pandang kita dalam memahami dan membangun kultur moderat di sekolah. Tujuan penyusunan modul ini adalah, *pertama*, menjadi pedoman dan pegangan fasilitator dalam pelaksanaan pelatihan moderasi beragama bagi guru. Dengan modul ini, fasilitator dapat meleksanakan pelatihan dengan lebih mudah, terencana dan terukur. *Kedua*, modul ini nantinya akan dibagikan kepada peserta, sehingga modul ini dapat menjadi bahan bacaan bagi Guru dalam mengimplementasikan penguatan moderasi beragama di sekolah, baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan kecil maupun pembentukan kultur moderat yang lebih terstruktur di sekolah. *Ketiga*, modul ini dapat menjadi pengayaan bagi guru-guru pada umumnya sebagai materi bacaan yang suatu saat dapat digunakan jika dibutuhkan. Modul ini sekaligus dapat menjadi pintu masuk bagi guru-guru untuk memperdalam pengetahuan dan kecakapan dalam meningkatkan kapasitas diri khususnya dalam isu moderasi beragama.

1. Target Capaian

Sasaran utama dari modul ini adalah para guru. Pelatihan ini diharapkan mampu memengaruhi dan mengubah guru dalam tiga hal, yakni cara pandang (*mindset*), sikap/perilaku dan kecakapan dalam membangun moderasi beragama. Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan cara pandang, pengetahuan dan sikap/perilaku guru menjadi lebih moderat. Sehingga dengan perubahan ini, guru memiliki modal yang kuat untuk (1) menanamkan nilai-nilai moderasi di sekolah, (2) membentuk kultur moderat di sekolah, dan (3) menjadi *role model* (teladan) dan pelopor moderasi beragama.

Karena itu, materi utama yang dibahas dalam modul ini bisa dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni: (1) memperdalam pemahaman atas fenomena ekstremisme beragama; (2) memperkuat pengetahuan mengenai konsep-konsep moderasi beragama; dan (3) membekali peserta dengan kecakapan-kecakapan tertentu untuk bisa melakukan penanaman nilai-nilai moderasi dan pembentukan kultur moderat di sekolah. Secara lebih khusus, target capaian dari implementasi modul ini dalam pelatihan adalah terjadinya perubahan pada diri peserta dalam tiga aspek;

Pertama, perubahan paradigma/perspektif/cara pandang dalam soal moderasi beragama. Perubahan ini ditandai dengan adanya tambahan pengetahuan, tumbuhnya kepedulian dan munculnya komitmen yang lebih tinggi untuk dapat berperan dan berkontribusi dalam upaya membangun moderasi beragama, khususnya di sekolah.

Kedua, adanya perubahan sikap dan perilaku dari peserta menjadi lebih moderat. Jika sebelumnya sikap dan perilaku peserta cenderung konservatif, hitam putih dan cenderung memaksakan pendapat serta relatif setuju terhadap tindakan-tindakan ekstrem misalnya, maka setelah mengikuti pelatihan ini sikap dan perilakunya berubah menjadi lebih moderat.

Ketiga, adanya peningkatan kemampuan dan kecakapan guru dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, membangun kultur moderat di sekolah dan kemampuan berjejaring untuk

penguatan moderasi beragama baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Capaian Guru setelah mengikuti pelatihan ini bisa digambarkan dalam diagram berikut ini:

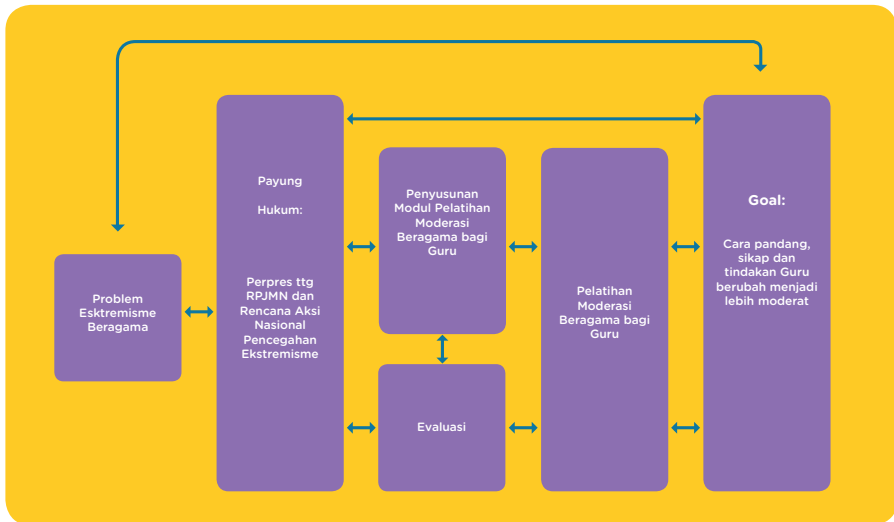


Diagram di atas menunjukkan bahwa problem yang dicakup oleh kegiatan ini adalah fenomena ekstremisme beragama yang cukup mengkhawatirkan, baik berupa pemikiran, sikap maupun tindakan. Modul ini yang nantinya akan menjadi panduan pelaksanaan pelatihan akan berusaha berkontribusi untuk memengaruhi dan mengubah keadaan tersebut, khususnya di kalangan guru yang menjadi target dari pelatihan ini. Pelatihan inilah diharapkan dapat mempengaruhi cara pandang, sikap dan perilaku guru menjadi lebih moderat, toleran dan inklusif. Sehingga pada akhirnya guru tidak hanya dapat menanamkan nilai-nilai moderasi kepada murid, tetapi juga dapat menjadi *role model* (teladan) bagi murid untuk menjadi generasi yang moderat.

2. Materi, Alur dan Jadwal Pelatihan

Modul ini akan membahas 9 (sembilan) materi, yakni (1) Bina Suasana, (2) Analisis Problem Ekstremisme Beragama, (3) Belajar dari Pelaku dan Korban Ekstremisme Beragama, (4)

Moderasi Beragama dalam Konsep, (5) Moderasi Beragama dalam Sejarah Kebangsaan, (6) Pemetaan Sosial untuk Penguatan Moderasi Beragama, (7) Internalisasi 9 Nilai Moderasi Beragama di Sekolah, (8) Pembentukan Perilaku Moderat di Sekolah, dan (9) Rencana Tindak Lanjut. Kisi-kisi materi pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Bina Suasana

- Perkenalan
- Pemetaan harapan dan kekuatan
- Kontrak Pelatihan
- Pemilihan Ketua Kelas

2. Analisis Problem Ekstremisme Beragama

- Memahami fenomena ekstremisme beragama
- Pohon Masalah Ekstremisme Beragama
- Analisis “Gunung Es”
- Peran Guru dalam Pencegahan ekstremisme

3. Belajar dari Pelaku dan Korban Ekstremisme Beragama

- Sharing pengalaman mantan pelaku ekstremisme
- Sharing pengalaman korban ekstremisme
- Refleksi pelaku dan korban untuk penguatan moderasi beragama

4. Moderasi Beragama Dalam Konsep

- Moderasi beragama sebagai konsep sosial
- Moderasi beragama dalam teks suci
- 9 Nilai Moderasi beragama

5. Moderasi Beragama dalam Sejarah Kebangsaan

- Keterlibatan tokoh-tokoh lintas agama dalam kemerdekaan
- Perumusan Pancasila dan UUD 1945 Moderasi beragama dalam pendiri bangsa

6. Pemetaan Sosial untuk Penguatan Moderasi Beragama

- Pemetaan sosial untuk penguatan moderasi beragama
- Pemetaan sosial di dalam sekolah
- Pemetaan sosial luar sekolah
- Perumusan langkah-langkah penguatan moderasi di dalam dan di luar sekolah

7. Internalisasi 9 Nilai Moderasi Beragama

- Praktik 9 nilai Moderasi Beragama dalam Masyarakat
- Internalisasi 9 nilai Moderasi Beragama di Sekolah;
- Implementasi 9 nilai Moderasi Beragama di kelas

8. Pembentukan Perilaku Moderat di Sekolah

- Pembentukan perilaku moderat di lingkungan guru
- Pembentukan perilaku moderat di lingkungan murid
- Pembentukan perilaku moderat dalam kegiatan ekstrakurikuler
- Pelembagaan perilaku moderat di sekolah

9. Perumusan Rencana Tindak Lanjut

- Konsep rencana tindak lanjut
- Perumusan rencana tindak lanjut individu
- Perumusan rencana tindak lanjut kolektif

10. Penutupan

- Post-test
- Evaluasi
- Penutupan

Keseluruhan materi itu dibagi dalam empat rangkaian utama; *Pertama*, bagaimana mengondisikan peserta sehingga mereka siap untuk masuk dalam materi pelatihan. Bagian pertama ini terutama berisi pengenalan, pemetaan harapan dan kekhawatiran, identifikasi kebutuhan bersama serta penyusunan aturan main yang akan menjadi tata tertib bagi seluruh peserta pelatihan.

Kedua, bagaimana membaca realitas ekstremisme beragama dan bagaimana menyikapinya. Bagian ini terbagi dalam dua materi, yakni analisis problem ekstremisme beragama; dan belajar dari pelaku dan korban ekstremisme beragama. Pada bagian ini peserta akan diajak berbagi pengalaman dan informasi sekitar realitas fenomena ekstremisme beragama dan bagaimana mengatasi masalah tersebut.

Ketiga, bagaimana membaca dan memahami konsep moderasi beragama. Bagian ini adalah tema sentral dari pelatihan ini. Pada bagian ini peserta diajak untuk membahas secara mendalam konsep moderasi dan sekaligus sejarah dalam konteks kebangsaan.

Keempat, bagaimana mewujudkan moderasi beragama di sekolah. Bagian ini terdiri dari tiga materi, yakni (1) pemetaan sosial untuk penguatan moderasi beragama; (2) penanaman nilai-nilai moderasi di sekolah; dan (3) pembentukan kultur moderat di sekolah. Pada bagian ini peserta diajak untuk membahas dan mendiskusikan secara serius bagaimana moderasi diimplementasikan di sekolah dan bagaimana kultur moderat dibangun. Diharapkan, bagian terakhir ini dapat betul-betul memberi inspirasi kepada peserta untuk mewujudkan moderasi di sekolahnya masing-masing. Itulah sebabnya, alur pelatihan akan mengikuti skema berikut ini:



Dengan alur seperti itu, pertama-tama peserta akan dihadapkan pada realitas ekstremisme beragama. Akan dikemukakan apa saja kasusnya, seperti apa bahayanya, dampaknya, dan ancaman-ancaman yang dapat timbul dari kasus-kasus intoleransi. Lalu dilanjutkan dengan diskursus moderasi beragama. Kemudian peserta akan diajak berlatih melakukan pemetaan sosial di dalam maupun di luar sekolah sebelum masuk ke materi penanaman nilai-nilai moderasi dan pembentukan kultur moderat di sekolah.

Implementasi pelatihan ini mengikuti jadwal sebagai berikut.

| Jam | Hari | Pertama | Kedua | Ketiga |
|---------------|------|--|--|--|
| 08.00 - 10.00 | | Pembukaan dan Penyampaian kebijakan pemerintah | Materi 5: Moderasi Beragama dalam Sejarah Kebangsaan | Materi 10: Perumusan Rencana Tindak Lanjut |
| 10.00 - 10.30 | | Cofee Break | | |
| 10.30 - 12.30 | | Materi 1 Bina Suasana | Materi 6: Pemetaan Sosial untuk Penguatan Moderasi Beragama | Materi 11: Evaluasi, Post-Test dan penutupan |
| 12.30 - 13.30 | | Istirahat, Makan, Sholat | | |
| 13.30 - 15.30 | | Materi 2 Analisis Fenomena Ekstremisme Beragama | Materi 7: Internalisasi 9 nilai moderasi beragama | |
| 15.30 - 16.00 | | Cofee Break / Sholat Ashar | | |
| 16.00 - 18.00 | | Materi 3: Kesaksian Mantan Pelaku dan Korban Ekstremisme | Materi 8: Pembentukan Perilaku Moderat di Sekolah | |
| 18.00 - 19.30 | | Istirahat, Makan, Sholat | | |
| 19.30 - 21.30 | | Materi 4: Moderasi Beragama dalam Konsep | Materi 9: Pembentukan Perilaku Moderat di Sekolah (lanjutan) | |

Tujuan akhir dari pelatihan ini adalah terciptanya generasi yang moderat melalui penanaman dan pembentukan kultur moderat di sekolah. Oleh karena itu, salah satu yang perlu dilakukan adalah memperkuat basis dan jaringan yang selama ini sudah ada. Sehingga mereka bisa bekerja lebih maksimal dan membuahkan hasil yang maksimal juga.

Karena itu, dalam praktik pelatihan, seluruh pembahasan mengenai moderasi beragama diarahkan pada upaya menyelesaikan problem ekstremisme dan penguatan moderasi beragama. Dan, pada saat yang bersamaan, membangun jaringan sebagai strategi untuk memperkuat praktik moderasi yang selama ini sudah berjalan.

3. Catatan untuk Fasilitator

Modul ini dimaksudkan sebagai manual bagi model pelatihan orang dewasa (andragogi). Meski disertai bahan bacaan yang cukup memadai, modul ini bukanlah manual untuk penataran yang bersifat monolog. Modul ini sengaja dirancang untuk sebuah pelatihan yang partisipatif meskipun tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai partisipatif murni, karena beberapa sesi akan diisi oleh narasumber. Diharapkan, fasilitator sejak awal harus menekankan bahwa pelatihan ini menuntut keterlibatan penuh para peserta dalam keseluruhan proses pelatihan. Karena itu, pada sesi-sesi awal fasilitator harus membuka sekat-sekat perbedaan yang dapat mencairkan suasana dan mampu membuat seluruh peserta nyaman dalam proses pelatihan dan bisa berdialog, menyampaikan pendapat serta berargumentasi tanpa dihantui rasa takut atau malu. Itulah sebabnya, sebelum masuk pada materi, peserta harus bisa dikondisikan sedemikian rupa sehingga mereka merasa sederajat tidak hanya dengan sesama peserta tetapi juga dengan narasumber sekalipun. Dengan prinsip kesetaraan seperti itu, maka proses fasilitasi yang partisipatif bisa dikembangkan dalam keseluruhan proses pelatihan.

Sebagai manual pelatihan, modul ini tentu hanyalah sarana yang pelaksanaannya akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Karena itu, fasilitator pelatihan diharapkan betul-betul menguasai tidak hanya substansi tema-tema yang akan dibahas bersama, tetapi juga kemampuan teknik fasilitasi. Untuk kepentingan ini, modul ini sudah dilengkapi kisi-kisi pokok bahasan serta handout, metode, durasi, dan langkah-langkah pembelajaran sehingga memudahkan fasilitator dalam proses pembelajaran.

4. Panduan Pelaksanaan Pelatihan

Penyusunan modul ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI untuk merespons kegelisahan mengenai menguatnya kecenderungan ekstremisme beragama di Tanah Air, termasuk di dunia pendidikan. Setidaknya ada tiga hal yang ingin dijawab

oleh pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan modul ini; *Pertama*, modul dan pelatihan ini ingin menjawab masalah ekstremisme beragama, khususnya di sekolah, dengan inisiatif-inisiatif yang kongkret. Masalah ekstremisme beragama tidak hanya terjadi di masyarakat umum, tetapi juga di dunia pendidikan. Sebagai salah satu aktor penting, guru yang menjadi peserta pelatihan ini diharapkan dapat menjadi pelopor pencegahan ekstremisme beragama dan penguatan moderasi beragama baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial pada umumnya.

Kedua, modul dan pelatihan ini ingin menjawab kebutuhan-kebutuhan lapangan, khususnya di sekolah, untuk memperkuat moderasi di satu sisi dan mencegah ekstremisme beragama di sisi yang lain. Melalui pelatihan ini diharapkan guru dapat mengidentifikasi apa saja prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan untuk membangun kultur moderat di sekolah.

Ketiga, modul dan pelatihan ini ingin menjawab harapan publik mengenai generasi yang berkarakter moderat melalui dunia pendidikan. Harapan ini tidak berlebihan karena pendidikan merupakan instrumen penting pembentukan karakter, salah satunya karakter moderat. Dengan pelatihan ini diharapkan guru memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menjawab harapan di masa-masa mendatang.

Oleh karena itu penyelenggaraan pelatihan untuk mengimplementasikan modul ini diharapkan betul-betul direncanakan dengan baik sehingga menghasilkan output dan outcome seperti yang menjanjikan. Untuk itu, sebelum pelatihan dilakukan penting untuk mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini agar pelatihan ini berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

a. Pemetaan Kebutuhan (Need Assessment)

Pemetaan kebutuhan merupakan instrumen penting untuk melakukan perubahan. Tanpa adanya analisis kebutuhan, upaya apa pun yang dilakukan untuk melakukan perubahan biasanya tidak akan berhasil maksimal sesuai dengan tujuan

yang dikehendaki. Demikian juga dengan pelatihan moderasi beragama bagi guru, pemetaan kebutuhan merupakan hal penting yang harus dilakukan agar pelaksanaan pelatihan betul-betul mampu menjawab problem riil yang sedang terjadi dan sekaligus mampu mewujudkan harapan yang dikehendaki. Kata kunci dari pemetaan kebutuhan adalah bahwa upaya perubahan yang dilakukan tidak hanya didasarkan pada keinginan, tetapi betul-betul berbasis kebutuhan. Metode Need Assessment dibuat untuk bisa mengukur tingkat kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan yang nyata-nyata terjadi. Dengan adanya alat ukur ini, maka pelaksanaan pelatihan betul-betul sinkron dan efektif.

Dalam konteks implementasi modul ini dalam pelatihan, pemetaan kebutuhan setidaknya difokuskan pada dua hal.

Pertama, pelaksanaan pelatihan. Untuk memastikan bahwa tujuan pelatihan tercapai, maka beberapa prasyarat penting perlu diidentifikasi, baik dari segi tempat, sarana dan prasana pendukung yang dapat menunjang keberhasilan pelatihan maupun personel yang bertanggung jawab. Hasil identifikasi kebutuhan ini kemudian dibuat dalam bentuk matriks yang mudah dipahami sehingga pada saat pelatihan, prosesnya dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Hasil pemetaan ini bisa dibuat dalam bentuk matriks berikut ini:

| No. | Permasalahan/ Kebutuhan | Tujuan Penyelesaian | Alternatif Solusi | PIC |
|-----|---|--------------------------------------|--|---------------|
| 1. | Koordinasi pelaksanaan pelatihan | Pelatihan terkendali dengan baik | Koordinasi dan evaluasi terjadwal dengan ketat | Ketua panitia |
| 2. | Tumpang tindih tanggung jawab panitia | Kinerja kepanitiaan berjalan efektif | Pembagian tugas dan evaluasi kinerja panitia | Sekretaris |
| 3. | Kebutuhan forum sering terbengkalai (alat tulis, LCD, microphone, soundsystem, dsb) | Pelatihan berjalan dengan lancar | Ada petugas khusus menangani kebutuhan forum | Tim pendukung |

Tabel di atas hanya contoh. Pemetaan kebutuhan ini harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Dengan adanya matriks tersebut, maka pelaksana kegiatan sebagai penanggung jawab pelatihan bisa bekerja lebih maksimal.

Kedua, pemetaan dilakukan terhadap peserta. Ini kerja pemetaan yang tidak kalah pentingnya agar pelaksanaan pelatihan betul-betul sesuai dengan kondisi riil peserta. Pemetaan ini bisa dilakukan dengan dua cara: (1) memberlakukan kualifikasi yang cukup ketat kepada calon peserta sehingga hanya peserta yang memenuhi syarat yang bisa ikut pelatihan ini; (2) mengirimkan instrument pre-test jauh-jauh hari sebelumnya dan peserta wajib mengisi dan mengirimkan form pre-test paling lambat seminggu sebelum pelatihan dimulai. Dengan mengetahui kondisi peserta (persepsi, pengetahuan dan sikap) mengenai moderasi beragama, maka materi yang akan disampaikan dalam pelatihan dapat menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Jika hasil pre-test peserta menunjukkan angka yang sangat baik (moderat hingga sangat moderat), maka pelatihan ini bisa difokuskan pada penguatan kader peserta sebagai pelopor moderasi beragama (agen perubahan). (Baca point E. Rencana Cadangan dalam Panduan Pelaksanaan Pelatihan ini)

b. Penentuan Tim Pelaksana Kegiatan

Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan tentu harus melalui seleksi yang memadai. Karena itu, Tim Pelaksana kegiatan setidaknya harus memenuhi beberapa kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas sebagai Tim Pelaksana pelatihan.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seluk beluk pelatihan.
3. Memiliki modal pengetahuan yang relatif memadai mengenai moderasi beragama. Kualifikasi ini penting agar penitia bisa menjawab pertanyaan jika ada yang bertanya seputar substansi pelatihan.
4. Memiliki pandangan keagamaan yang cukup moderat.
5. Sigap dan cekatan dalam mengantisipasi kebutuhan pelatihan.

c. Penentuan Peserta

Harus disadari bahwa pelatihan ini bukan dimaksudkan untuk sekadar sosialisasi mengenai pentingnya moderasi beragama, tetapi sejak awal didesain untuk tujuan yang sangat spesifik dan dengan peserta yang juga sangat *segmented*. Karena itu, penentuan peserta menjadi sangat krusial. Di sinilah perlu dirumuskan kualifikasi peserta yang layak untuk mengikuti pelatihan ini.

Untuk pelaksanaan pelatihan tahap pertama, kualifikasi peserta perlu dibuat secara ketat sesuai dengan pemetaan kebutuhan. Sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan utama pelatihan ini adalah mengubah mindset guru agar lebih moderat sambil membekali guru dengan kecakapan-kecakapan tertentu agar mampu membangun kultur moderat di sekolah.

Dengan tujuan seperti ini, maka beberapa kualifikasi peserta yang layak dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki cukup pengetahuan mengenai moderasi beragama. Peserta untuk tahapan awal ini diharapkan bukan peserta yang sama sekali buta mengenai moderasi beragama, sehingga dalam pelatihan dia

- tidak perlu memulai dari nol.
2. Memiliki pandangan keagamaan yang cukup moderat. Persyaratan ini penting karena pelatihan ini dimaksudkan bukan untuk melakukan semacam “deradikalisasi”, tetapi untuk memperkuat cara pandang moderat yang sudah ada dalam diri peserta.
 3. Memiliki pengaruh yang cukup signifikan di sekolah. Peserta yang akan dilibatkan dalam pelatihan bukan sekadar ditingkatkan pengetahuannya dan kemampuannya, tetapi juga diharapkan menjadi semacam pelopor perubahan dalam membangun kultur moderat di sekolah. Sehingga peserta yang layak dipertimbangkan dalam pelatihan tahap pertama adalah peserta yang cukup berpengaruh, suaranya relatif didengarkan oleh rekan guru yang lain, dan memiliki integritas.
 4. Cukup aktif di organisasi, setidaknya di organisasi guru semisal MGMP atau AGPAI. Persyaratan ini penting untuk memastikan bahwa peserta pelatihan bukanlah orang yang sama sekali baru dalam organisasi. Sehingga untuk meningkatkan kemampuan pengorganisasian tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama.
 5. Memiliki kemampuan cukup dalam bidang teknologi informasi. Kemampuan di bidang ini penting sebagai modal untuk penguatan moderasi beragama, termasuk di media sosial.

Lima kualifikasi di atas bisa dicapai melalui pre-test yang disebar sebelum pelatihan dilakukan. Sehingga penitia memiliki waktu yang cukup longgar untuk melakukan analisis dan menentukan calon peserta.

d. Penentuan Fasilitator/Narasumber

Fasilitator dan narasumber tentu saja merupakan aktor kunci dalam pelatihan. Karena itu, beberapa kualifikasi perlu diterapkan secara ketat untuk menentukan siapa yang layak menjadi fasilitator pelatihan. Meski modul ini relatif lengkap sebagai panduan pelatihan, mulai dari kisi-kisi materi hingga langkah pembejalaran dan handout, penentun fasilitator tidak bisa dilakukan secara serampangan.

Dalam pelatihan yang menggunakan pendekatan andragogi (pendidikan orang dewasa), fasilitator bukanlah guru yang menceramahi murid dan menganggap murid tidak tahu apa-apa. Fasilitator juga bukan pelatih yang menganggap peserta tidak memiliki kemampuan sehingga semuanya harus ditentukan oleh fasilitator. Fasilitator juga bukan ahli yang bisa menjawab segalanya. Fasilitator adalah orang yang memiliki keterampilan mendengar dan berkomunikasi dengan baik, mampu memimpin dan memandu orang menggunakan serangkaian materi pembelajaran demi memastikan mereka memperoleh manfaat maksimal dari proses pembelajaran, memperoleh manfaat dari pengetahuan satu sama lain.

Karena itu, di samping persyaratan standar yang biasa diberlakukan, yakni memiliki pengalaman sebagai fasilitator pelatihan, penguasaan materi dan kemampuan mengelola forum, ada beberapa persyaratan lain yang agaknya penting dipertimbangkan, yakni:

1. Respek terhadap peserta. Ini persyaratan mutlak menjadi fasilitator.
2. Memiliki kemampuan bicara dengan suara dan gaya yang menarik. Ini terutama untuk membangun suasana forum lebih hidup dan segar.
3. Memiliki kesabaran untuk menjadi pendengar yang baik sekaligus kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang membuka perspektif.
4. Mampu membangkitkan antusiasme peserta.
5. Peka terhadap situasi forum. Tidak semua moment harus direspons oleh fasilitator tetapi fasilitator juga tidak boleh mendinginkan situasi forum menjadi monoton.
6. Punya rasa humor untuk menyegarkan suasana.
7. Punya kemampuan memainkan *game* dan atau *ice breaking*.
8. Mampu bekerja sama dalam tim. Ini terutama karena jarang sebuah pelatihan hanya dipandu oleh satu orang fasilitator. Karena itu, kemampuan berkolaborasi menjadi sangat penting.
9. Mampu menjadi teladan pembelajaran di forum.

Keteladanan fasilitator penting karena sebagian peserta sering lebih dipengaruhi oleh “apa yang dilihat” ketimbang apa yang “didengar”.

Beberapa kriteria di atas bisa jadi tidak mudah ditemukan pada calon fasilitator. Tetapi, dengan mencari rekomendasi dari beberapa kalangan yang bergerak di pelatihan, kriteria seperti di atas tidak akan terlalu sulit untuk ditemukan.

5. Rencana Cadangan (“Plan B”)

Perencanaan yang baik selalu menyiapkan rencana cadangan untuk mengantisipasi situasi-situasi tentu yang terjadi di luar dugaan. Karena itu, rencana cadangan dalam persiapan pelaksanaan pelatihan ini juga perlu disiapkan. Sangat disarankan agar rencana cadangan ini dibuat dalam bentuk matriks, sehingga memudahkan Tim Pelaksana untuk mengambil tindakan cepat jika situasi memang mengharuskan begitu. Rencana cadangan ini bisa berupa tempat, waktu, peserta, narasumber, fasilitas dan sarana pendukung, dan lain sebagainya. Sebagai rencana cadangan, tentu saja rencana seperti ini hanya ditempuh jika ada situasi-situasi khusus.

Salah satu rencana cadangan yang layak dipertimbangkan adalah kondisi peserta. Sebagaimana dijelaskan dalam point Penentuan Peserta, kualifikasi dan pemetaan peserta perlu dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelatihan dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan pelatihan ini, jika peserta yang akan ikut pelatihan – berdasarkan hasil pre-test – menunjukkan gambaran yang umum, maka pelatihan bisa dilakukan menggunakan desain pelatihan yang memang sudah disiapkan dalam modul ini. Namun jika kualifikasi peserta ternyata jauh melampaui ekspektasi, maka materi pembelajaran perlu diubah sesuai dengan kondisi peserta.

Kualifikasi peserta ini bisa dilihat dari hasil pre-test yang sudah diisi dan dikirimkan peserta ke panitia. Misalnya dari hasil pre-test pengetahuan dan sikap berada dalam angka 3 ke atas (moderat hingga sangat moderat) dari skala 1-5, maka orientasi pelatihan dialihkan dari penguatan mindset ke peningkatan kecakapan. Tentu perubahan ini akan berpengaruh terhadap

materi pembelajaran. Sebagaimana terlihat dalam jadwal, jika peserta pelatihan memang tergolong moderat dan sangat moderat dalam sikap, serta memiliki penguasaan yang memadai dan sangat memadai mengenai moderasi beragama, maka pelaksanaan pelatihan bisa dilakukan perubahan sesuai dengan jadwal berikut ini:

1. Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Awal

| Jam | Hari | Pertama | Kedua | Ketiga |
|---------------|------|---|---|---|
| 08.00 - 10.00 | | Pembukaan | Sesi 5: Moderasi Beragama dalam Sejarah Kebangsaan | Sesi 10: Perumusan Rencana Tindak Lanjut |
| 10.00 - 10.30 | | Coffee Break | | |
| 10.30 - 12.30 | | Sesi 1 Bina Suasana | Sesi 6: Pemetaan Sosial untuk Penguatan Moderasi Beragama | Sesi 11: Evaluasi, Post-Test dan penutupan |
| 12.30 - 13.30 | | Istirahat, Makan, Sholat | | |
| 13.30 - 15.30 | | Sesi 2 Analisis Fenomena Ekstremisme Beragama | Sesi 7: Internalisasi 9 nilai moderasi beragama | |
| 15.30 - 16.00 | | Coffee Break / Sholat Ashar | | |
| 16.00 - 18.00 | | Sesi 3: Kesaksian Mantan Pelaku dan Korban Ekstremisme | Sesi 8: Pembentukan Perilaku Moderat di Sekolah | |
| 18.00 - 19.30 | | Istirahat, Makan, Sholat | | |
| 19.30 - 21.30 | | Sesi 4: Moderasi Beragama dalam Konsep | Sesi 9: Pembentukan Perilaku Moderat di Sekolah (lanjutan) | |

* ini diperuntukkan bagi diklat untuk menambah wawasan moderasi kepada peserta, dan merubah cara pikir dari tidak/kurang moderat menjadi lebih moderat.

2. Jadwal Pelaksanaan Pelatihan versi Perubahan

| Jam | Hari | Pertama | Kedua | Ketiga |
|---------------|------|---|---|--|
| 08.00 - 10.00 | | Registrasi, Pembukaan | Sesi 5: Pemetaan Sosial Untuk Penguatan Moderasi Beragama (2) | Sesi 10: Perumusan Rencana Tindak Lanjut |
| 10.00 - 10.30 | | Coffee Break | | |
| 10.30 - 12.30 | | Sesi 1: Bina Suasana, Perkenalan, Kontrak Belajar | Sesi 6: Internalisasi 9 nilai moderasi beragama (1) | Sesi 11: Evaluasi, Post-Test dan penutupan |
| 12.30 - 13.30 | | Istirahat, Makan, Sholat | | |
| 13.30 - 15.30 | | Sesi 2: Analisis Fenomena Ekstremisme Beragama | Sesi 7: Internalisasi 9 nilai moderasi beragama (2) | |
| 15.30 - 16.00 | | Coffee Break / Sholat Ashar | | |
| 16.00 - 18.00 | | Sesi 3: Moderasi beragama dalam konsep dan sejarah | Sesi 8: Pembentukan Perilaku Moderat Berbasis 9 Nilai Moderasi Beragama (1) | |
| 18.00 - 19.30 | | Sesi 4: Pemetaan Sosial Untuk Penguatan Moderasi Beragama (1) | Sesi 9: Pembentukan Perilaku Moderat di Sekolah (2) | |

* jadwal diklat untuk mempersiapkan peserta menjadi agen perubahan dalam moderasi beragama.

Perubahan pada dua jadwal di atas terjadi pada materi-materi berikut:

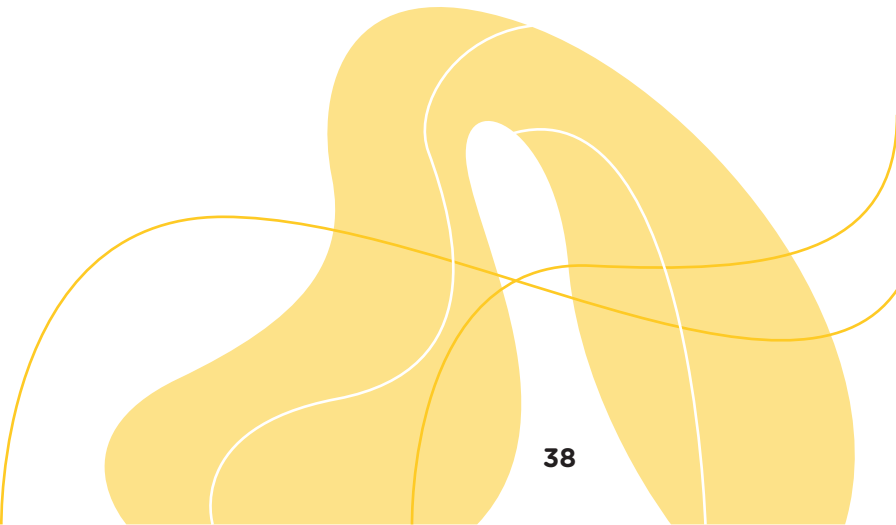
| No | Materi / Sesi | Jadwal awal | Jadwal awal |
|----|--|-------------|-------------|
| 1. | Bina Suasana | √ | √ |
| 2. | Analisis Fenomena Ekstremisme Beragama | √ | √ |
| 3. | Kesaksian Mantan Pelaku dan Korban Ekstremisme | √ | - |
| 4. | Moderasi beragama dalam konsep | √ | - |
| 5. | Moderasi beragama dalam sejarah kebangsaan | √ | - |
| 6. | Moderasi beragama dalam konsep dan sejarah | - | √ |

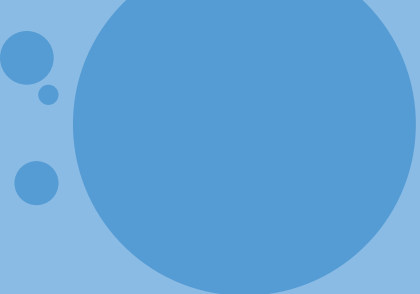
| | | | |
|-----|---|----------------|----------------|
| 7. | Pemetaan Sosial Untuk Penguatan Moderasi Beragama (1) | √ | √ |
| 8. | Pemetaan Sosial Untuk Penguatan Moderasi Beragama (2) | - | √ |
| 9. | Internalisasi 9 nilai moderasi beragama (1) | √ | √ |
| 10. | Internalisasi 9 nilai moderasi beragama (2) | - | √ |
| 11. | Pembentukan Perilaku Moderat di Sekolah (1) | √ | √ |
| 12. | Pembentukan Perilaku Moderat di Sekolah (2) | √ | √ |
| 13. | Perumusan Rencana Tindak Lanjut | √ | √ |
| 14. | Evaluasi, Post-Test dan penutupan | √ | √ |
| | Total | 11 sesi | 11 sesi |

Dalam tabel ini terlihat bahwa, fokus pelatihan pada jadwal awal lebih berorientasi pada pembentukan mindset peserta soal moderasi beragama karena materi mengenai moderasi lebih banyak ketimbang materi pembekalan kecakapan. Sedangkan dalam jadwal perubahan, mengingat peserta sudah dianggap “selesai” di level mindset moderasi, maka fokus pelatihan lebih diorientasikan pada pembekalan kecakapan untuk membentuk kader pelopor moderasi beragama (sebagai agen perubahan), sehingga materi mengenai moderasi beragama lebih sedikit (hanya 2 sesi) dan sebagian besar berisi materi pemetaan sosial, internalisasi nilai moderasi dan pembentukan kultur moderat di sekolah.


Perubahan ini dimungkinkan dengan cara langkah-langkah pembelajaran dalam jadwal perubahan menggunakan metode yang lebih partisipatif dan mengurangi metode ceramah dialog. Karena itu, dalam jadwal perubahan, langkah-langkah pembelajaran dalam materi-materi pemetaan sosial, internalisasi nilai moderasi dan pembentukan kultur moderat di sekolah menggunakan metode diskusi kelompok, bermain peran (simulasi) dan aksi teater. Karena itu, dalam pelatihan yang menggunakan jadwal versi perubahan, maka dibutuhkan fasilitator yang memiliki kecakapan mengelola forum dalam metode diskusi kelompok, bermain peran (simulasi) dan

aksi teater. Metode-metode ini dianggap lebih memberikan pengaruh kepada peserta ketimbang metode ceramah (presentasi) dan dialog.





MATERI **1** BINA SUASANA



Sesi ini merupakan pengantar untuk menciptakan suasana yang kondusif selama proses pelatihan. Dalam pengantar ini juga disampaikan tujuan pelatihan secara umum, sehingga seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan pelatihan ini.



Pokok Bahasan:

- 1) Pengantar pelatihan
- 2) Perkenalan
- 3) Pemetaan harapan dan kekhawatiran
- 4) Kontrak belajar
- 5) Pemilihan ketua kelas
- 6) *Pre-test*



Tujuan:

Setelah mengikuti sesi ini:

- 1) Peserta berada dalam suasana yang akrab, hangat dan nyaman untuk memasuki pelatihan.
- 2) Peserta saling mengenal antar sesama peserta maupun dengan fasilitator dan panitia.
- 3) Peserta dapat mengetahui pentingnya pelatihan ini.
- 4) Peserta membuat komitmen belajar yang disepakati bersama dalam bentuk aturan main selama pelatihan berlangsung.
- 5) Penyelenggara dan fasilitator mendapat gambaran singkat peta pemahaman, pengetahuan, dan sikap peserta sdalam konteks moderasi beragama.



Metode:

- 1) *Brainstorming*
- 2) *Game*
- 3) *Sharing* pengalaman
- 4) Refleksi



Media:

- 1) *Flip chart*
- 2) Spidol
- 3) Kertas meta plan 3 warna
- 4) Alat tulis
- 5) Slide



Durasi:


120 menit




Langkah-langkah Pembelajaran:

1. Fasilitator membuka sesi dengan salam pembuka, memperkenalkan diri secara singkat, serta anggota-anggota tim fasilitator lain jika ada, dan menjelaskan kepada peserta tujuan pelatihan ini. Tekankan kepada peserta kenapa pelatihan ini penting. 🕒 5 menit
2. Fasilitator menanyakan kepada peserta dengan nada antusias dan ekspresif, “Apakah sudah siap mengikuti pelatihan ini?” Kalau jawabannya kurang semangat, ulangi sekali lagi. Ajak peserta semua berdiri sambil menegaskan bahwa untuk menguji kesiapan peserta semua, kita akan bermain-main sebentar. Lakukan permainan atau *game* “*Standing Position*” (Lihat *hand out II*). 🕒 10 menit
3. Refleksikan permainan tadi kepada para peserta. “Apa makna permainan tadi?” Kaitkan dengan topik yang kita bahas, yakni tentang moderasi beragama. 🕒 5 menit
4. Lalu, ajak peserta untuk memikirkan satu hal: “Apa yang faktor paling dominan dalam membentuk perilaku moderat?” Minta peserta untuk menyimpan jawabannya dalam memori khusus di kepala peserta. Anggap saja faktor itu adalah kata kunci. 🕒 2 menit

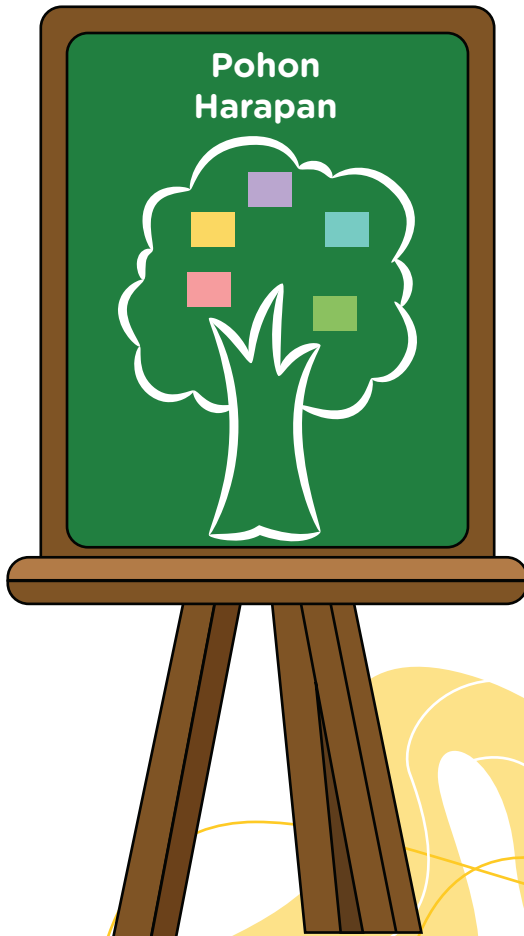


- 
5. Minta peserta untuk mengumpulkan kata kunci tadi sebanyak-banyaknya dari peserta lain dengan cara menuliskannya di kertas: misalnya, nama Imam Malik; kata kunci kasih sayang. Waktu untuk mengumpulkan kata kunci cukup 5 menit, tidak lebih. 🕒 5 menit
 6. Begitu waktu 5 menit habis, tanya ke peserta: “Siapa peserta yang berhasil mengumpulkan lebih dari 10 kata kunci? Kalau ada beberapa yang angkat tangan, naikkan lagi menjadi 15, dst. 🕒 3 menit
 7. Minta peserta yang mengumpulkan kata kunci paling banyak untuk maju dan membacakan kata kunci yang dikumpulkan berikut nama-nama pemilik kata kunci tersebut. 🕒 5 menit
 8. Beri tepuk tangan kepada peserta yang berhasil mengumpulkan kata kunci terbanyak. 🕒 2 menit
 9. Tanya kepada seluruh peserta, apakah ada kata kunci yang tidak dipahami atau kurang relevan dengan pertanyaan “Apa yang faktor paling dominan dalam membentuk perilaku moderat?” Kalau ada, fasilitator mendiskusikan dengan peserta, sehingga semuanya paham. 🕒 10 menit
 10. Lalu, masuk ke pemetaan harapan dan kekhawatiran. Bagikan kepada peserta 3 lembar kertas warna-warni. Misalnya merah, hijau, dan biru. Mintalah untuk menulis 2 hal yang diharapkan terjadi (**kertas hijau**) di forum ini; 2 hal yang tidak diharapkan terjadi (**kertas merah**); dan cara atau aturan main agar harapan terjadi dan kekhawatiran tidak terjadi (**kertas biru**). Tekankan bahwa yang ditulis harus spesifik dan ditulis dengan jelas. Antara harapan dan kekhawatiran tidak boleh berkebalikan. 🕒 10 menit

- 
11. Setelah semua selesai, mintalah mereka maju dan menempelkan kertas-kertas tersebut di *flipchart* yang sudah disediakan. ⌚ 10 menit
 12. Klasifikasikan pandangan peserta berdasarkan hal-hal berikut:
 - Mana harapan yang dapat dicapai,
 - Mana harapan yang mungkin tercapai,
 - Mana harapan yang mungkin tidak akan tercapai,
 - Mana harapan yang akan tercapai hanya dengan komitmen kuat peserta,
 - Mana dari harapan peserta yang sama sekali tidak akan tercapai. ⌚ 10 menit
 13. Bacakan juga juga bagian Aturan Main. Dan minta persetujuan peserta untuk setiap poinnya sebelum disepakati sebagai aturan main. Kalau ada hal penting yang belum masuk, usulkan kepada peserta agar bisa dimasukkan. Misalnya, belum ada yang mengusulkan HP di-*silent*, usulkan agar HP di-*silent*. ⌚ 10 menit
 14. Bacakan juga kekhawatiran yang tidak boleh terjadi dengan menekankan pentingnya kerja sama dan saling mengingatkan. ⌚ 10 menit
 15. Minta peserta untuk memilih Ketua Kelas dan para pembantunya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab di kelas. ⌚ 10 menit
 16. Sebelum mengakhiri sesi ini, mainkan *game* “Angka Favorit” (Lihat *Hand Out III*). ⌚ 10 menit

17. Refleksikan *game* ini dengan peserta. Beri catatan penting dari *game* ini bahwa kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi selama di forum ini kita memiliki tujuan yang sama, yakni membangun moderasi beragama. 🕒 3 menit

18. Fasilitator menyampaikan refleksi singkat mengenai sesi ini; dan memberi tahu peserta jadwal pelatihan berikutnya dan selanjutnya menutup sesi ini dengan salam. 🕒 2 menit





Urgensi Sesi Bina Suasana

Sebuah forum pelatihan yang dilakukan dalam durasi yang agak panjang, misalnya lebih dari satu hari, membutuhkan situasi khusus agar peserta dan fasilitator tidak jenuh selama mengikuti pelatihan. Di samping itu, pelatihan dengan durasi panjang selalu diawali satu sesi khusus untuk mengantarkan peserta pada forum pelatihan. Dengan demikian, pada sesi pertama, peserta tidak langsung masuk pada materi pelatihan, tetapi diawali dengan mengondisikan forum sedemikian rupa agar peserta betul-betul siap mengikuti pelatihan. Karena itulah, pada sesi awal, pelatihan pada umumnya selalu dimulai dengan sesi pengantar untuk menyiapkan mental peserta, khususnya dalam memasuki pelatihan. Sesi pengantar ini biasanya disebut dengan sesi “Bina Suasana”. Permainan atau *game* di sesi Bina Suasana merupakan keharusan untuk mencairkan kebekuan di antara sesama peserta maupun dengan fasilitator dan panitia.

Sesi Bina Suasana biasanya terdiri dari lima hal:

- a. Penjelasan singkat mengenai urgensi, substansi dan tujuan pelatihan. Dengan penjelasan ini maka peserta menjadi lebih paham ke mana arah pelatihan ini akan menuju.
- b. Perkenalan. Tentu saja ini dimaksudkan agar saling kenal satu sama lain. Namun demikian, tujuan perkenalan sesungguhnya lebih dari saling kenal, tetapi juga tercipta keakraban di forum. Karena itu, perkenalan sebaiknya dilakukan dengan cara yang sangat menarik.
- c. Pemetaan harapan dan kekhawatiran. Peserta diminta menuliskan di secarik kertas, apa harapan terhadap pelatihan ini; dan di kertas lain, apa kekhawatiran peserta terhadap pelatihan ini. Perintah menuliskan harapan dan kekhawatiran harus spesifik dan terukur,

jangan general, sehingga mudah untuk dijadikan panduan dalam pelatihan. Agar harapan bisa terwujud dan kekhawatiran tidak terjadi, maka butuh aturan main. Maka di situlah kontrak belajar dibuat.

- d. Kontrak belajar adalah aturan main yang dibuat bersama-sama oleh peserta dan fasilitator agar pelatihan berjalan sesuai harapan. Kontrak belajar bisa dilakukan dengan berbagai cara, tapi pastikan bahwa proses menuju kesepakatan belajar betul-betul dilakukan secara partisipatif.
- e. Pemilihan ketua kelas. Ini penting dilakukan agar ada yang bertanggung jawab terhadap forum dari kalangan peserta. Karena itu, pemilihan ketua kelas harus dilakukan dengan penuh keakraban dan menghindari suasana formal yang terlalu prosedural. Sehingga ketua terpilih betul-betul terpanggil untuk membantu kelancaran forum.
- f. *Pre-test*. Ini menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pelatihan. Dan di akhir pelatihan, soal-soal yang sama juga menjadi *post-test* untuk mengetahui tingkat daya serap peserta terhadap pelatihan.

Bina Suasana dilakukan pada sesi pertama dengan tujuan mengondisikan peserta supaya siap, aktif, dan bersemangat dalam mengikuti pelatihan. Di samping itu, sesi Bina Suasana juga dimaksudkan untuk mencairkan kebekuan di antara peserta dan mengarahkan peserta untuk dapat mengenal satu sama lain sehingga pada akhirnya dapat bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain.

Setidaknya terdapat tiga kondisi yang diharapkan tercipta setelah sesi Bina Suasana, yakni:

(1) kondisi yang memungkinkan peserta dapat berdiskusi dan bertukar pikiran secara bebas tanpa rasa sungkan dan riku, saling berbagi tentang pengetahuan dan pengalaman masing-masing;

(2) kondisi yang memungkinkan peserta saling memberi dan menerima pengetahuan dan pengalaman dalam diskusi

kelompok, sehingga apa yang diperoleh dalam langkah pembelajaran bisa dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari; (3) kondisi yang memungkinkan peserta bisa merespons secara aktif setiap stimulus yang diberikan fasilitator.


Di samping itu, sesi Bina Suasana juga bisa digunakan untuk memetakan tingkat ketertarikan dan kepedulian peserta dalam materi-materi pelatihan. Karena itu, dalam Bina Suasana, di samping ada pengenalan, juga terdapat pemetaan harapan dan kekhawatiran. Dengan diketahui harapan dan kekhawatiran peserta, maka dibuatlah aturan main dalam forum sehingga harapan peserta yang sudah ditulis di kertas meta plan bisa diwujudkan bersama-sama; dan kekhawatiran-kekhawatiran yang dituliskan peserta bisa dihindari.

 Game “Standing Position”

Game ini dimaksudkan untuk memetakan posisi peserta dalam konteks moderasi beragama. Dengan permainan ini, fasilitator akan mengetahui setidaknya 5 hal: (1) seberapa luas pengetahuan peserta mengenai moderasi beragama; (2) seberapa moderat cara pandang (*mindset*) peserta dalam melihat perbedaan; (3) Seberapa moderat sikapnya terhadap perbedaan; (4) seberapa luas pergaulan sosial peserta khususnya terhadap kelompok-kelompok yang berbeda; (5) seberapa intens perannya dalam penguatan moderasi beragama. Dengan pemetaan sederhana ini, fasilitator menjadi lebih mudah untuk menyesuaikan dengan peta pengetahuan, cara pandang (*mindset*) dan sikap peserta dalam konteks moderasi beragama.

Game ini dimulai dengan meminta peserta untuk membentuk dua kelompok besar (Jumlah peserta tidak harus sama pada masing-masing kelompok. Sebut saja kelompok pertama adalah kelompok A; dan kelompok kedua adalah kelompok B. Fasilitator kemudian menyebutkan sejumlah pernyataan (*statement*). Jika peserta merasa bahwa pernyataan fasilitator sesuai dengan apa yang diyakini atau dialami peserta, maka peserta tersebut harus berada di kelompok A. Sedangkan peserta yang merasa tidak sesuai apa yang diyakini atau dialami, maka peserta tersebut harus pindah ke kelompok B. Berikut adalah beberapa pernyataan yang harus diajukan ke peserta dan harus merespons dengan cepat dengan menempati posisi sesuai dengan yang dialami atau diyakini.

1. Berasal dari keluarga santri atau pernah mengenyam pendidikan di pesantren;
2. Menempuh pendidikan keguruan;
3. Pernah mengikuti pelatihan;
4. Pernah membaca buku tentang moderasi beragama;

- 
5. Pernah menulis artikel atau ulasan tentang moderasi beragama;
 6. Menganggap bahwa kelompok-kelompok minoritas (agama, etnis, budaya) harus tunduk pada kemauan mayoritas;
 7. Memiliki kenalan beda agama lebih dari 5 orang;
 8. Memiliki teman akrab yang berbeda agama;
 9. Pernah mengikuti kegiatan lintas agama;
 10. Pernah menginisiasi kegiatan penguatan moderasi beragama.

Agar suasana menjadi lebih cair dan menyenangkan, pernyataan-pernyataan di atas diselang-seling dengan pernyataan yang lucu dan menggelitik misalnya:

1. Pernah pacaran dengan anak kyai;
2. Pernah memutuskan pacar secara sepihak atau pernah mengkhianati pacar; atau pernah diputusin pacar;
3. Pernah mencuri mangga tetangga;
4. Pernah makan di warung tapi tidak bayar;
5. Tidak pernah mentraktir makan;
6. dan lain sebagainya.

Di akhir permainan beri catatan penting betapa moderasi, bahkan di kalangan kita sendiri, belum banyak mendapat perhatian. Oleh karena itu, perlu upaya keras untuk mewujudkannya. Pelatihan ini adalah salah satunya.

 Game “Angka Favorite”

1. Mintailah peserta untuk memilih salah satu angka yang mereka sukai dari angka 1 sampai 9. Mungkin saja yang dipilih adalah tanggal atau bulan kelahiran. Atau angka tersebut mempunyai makna tertentu bagi peserta, intinya peserta diminta memilih hanya satu angka.
2. Setelah mereka memilih angka masing-masing, simpan di dalam hati peserta dan jangan beritahu orang lain. Selanjutnya angka tersebut dikalikan 9. Misalnya mereka yang memilih angka 2 maka akan mendapatkan angka 18, yang memilih 5 mendapatkan 45, dan seterusnya.
3. Setelah angka favorit tadi dikalikan 9 dan ketemu jumlahnya, selanjutnya angka hasil perkalian tadi dijumlahkan. Misalnya 18; maka 1 dan 8 dijumlahkan sehingga menjadi 9, dan seterusnya.
4. Selanjutnya minta kepada peserta untuk mengurangi angka hasil penjumlahan tersebut dengan 5.
5. Setelah didapat hasil pengurangan tersebut, minta kepada peserta untuk mengubah angka tadi sesuai urutan huruf abjad. Misalnya didapat angka 1=A; 2=B; 3=C; 4=D, dst.
6. Setelah didapat huruf hasil transfer dari angka, minta peserta untuk menyebutkan salah satu nama kota yang huruf awalnya menggunakan huruf tadi, misalnya Jakarta, Jember; atau Makassar, Malang; dst.
7. Mintalah beberapa peserta untuk menyebutkan nama kota pilihannya. Apabila mereka menyebutkan nama-nama kota dengan menggunakan huruf awal yang sama dengan peserta lain, maka berarti mereka menghitung dengan benar.

8. Tekankan bahwa bagi peserta yang menggunakan huruf awal yang sama dengan yang lainnya, berarti telah melakukan perhitungan dengan benar. Jika masih ada yang tidak sama, bimbinglah mereka untuk menghitung ulang sampai memahami dengan benar.
9. Kesimpulan dari permainan ini adalah, bahwa kita mempunyai latar belakang yang berbeda yang diibaratkan dengan pilihan angka kesukaan, namun dalam pelatihan ini mempunyai tujuan dan minat yang sama yaitu ingin memperkuat moderasi beragama. Tanyakan kepada peserta apakah mereka setuju. Mintalah agar mereka menjawab dengan serempak "Setujuuu."



MATERI 2

MEMAHAMI FENOMENA EKSTREMISME BERAGAMA

Sesi ini berusaha memahami fenomena ekstremisme beragama yang belakangan ini cukup mengkhawatirkan. Dalam sesi ini, fenomena ekstremisme berusaha dibahas secara lebih komprehensif, terutama dengan pendekatan analisis pohon masalah, mulai dari akar masalah (penyebab), batang masalah (*main problem* atau masalah utama), hingga dahan dan ranting masalah (dampak-dampak masalah). Dengan demikian, peserta menjadi lebih paham mengenai kompleksitas masalah ekstremisme beragama. Dalam sesi ini juga, dibahas mengenai analisis “gunung es” untuk mengetahui pola dan kecenderungan ekstremisme beragama, struktur penyebab dan mental model dari pelaku. Sehingga dengan pemahaman seperti ini akan memudahkan kita melakukan pemetaan mengenai arah perubahan yang kita kehendaki. Pemahaman yang benar terhadap masalah moderasi akan membimbing kita pada solusi yang benar.



Pokok Bahasan:

- 1) Analisis “Gunung Es”
- 2) Pohon masalah ekstremisme beragama.
- 3) Posisi dan peran guru dalam fenomena ekstremisme beragama.



Tujuan:

Setelah mengikuti pelatihan ini:

- 1) Peserta lebih memahami fenomena ekstremisme beragama dalam konteks yang lebih luas.
- 2) Peserta lebih memahami ekstremisme dalam perspektif akar masalah (penyebab), batang masalah (masalah utama), dan ranting masalah (dampak).
- 3) Peserta lebih memahami posisi dan peran guru dalam pencegahan ekstremisme.



Metode:

- 1) *Brainstorming*.
- 2) Pemaparan.
- 3) Diskusi kelompok.



Media:

- 1) Bahan presentasi.
- 2) LCD proyektor.
- 3) Laptop.
- 4) Whiteboard.
- 5) Spidol *boardmaker*.
- 6) Kertas plano.
- 7) *Flipchart*.

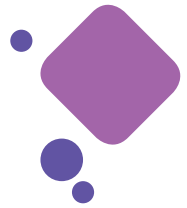


Durasi:

120 Menit.



Langkah-langkah Pembelajaran:



1. Fasilitator membuka sesi dan memberi pengantar singkat mengenai tujuan sesi ini dan menjelaskan materi yang akan dibahas. ⌚ 5 menit
2. Mainkan *Game* “Pohon dan Kelinci” (Baca *Hand Out II* dalam topik ini). ⌚ 5 menit
3. Refleksikan *game* tadi dikaitkan dengan masalah ekstremisme beragama. Beri catatan bahwa “gerimis, hujan, dan badai” adalah masalah. Pohon adalah sumber daya yang tersedia. Sedangkan reaksi kelinci adalah respons terhadap masalah.
4. Tanyakan kepada peserta, apakah yang dimaksud dengan ekstremisme beragama? Garis bawahi respons peserta bahwa masalah fenomena ekstremisme sangat kompleks, fenomenanya mirip gunung es, penyebabnya banyak dan dampaknya juga panjang. ⌚ 5 menit
5. Minta kepada masing-masing peserta untuk menuliskan 1 masalah paling krusial dalam fenomena ekstremisme beragama (bisa berupa akar, atau batang masalah, atau dahan/dampak masalah). Pastikan masalah yang ditulis peserta betul-betul masalah yang spesifik dan terukur. Minta masing-masing untuk menyebutkan masalahnya, kemudian tulis di kertas plano. Bahas secara singkat masalah yang ditulis peserta dalam konteks “Analisis Gunung Es”. ⌚ 10 menit



6. Bersama peserta, pilihlah 5 topik untuk didiskusikan bersama. Gunakan kerangka “Analisis Gunung Es” dan analisis “Pohon Masalah”. Gambarkan masalah tersebut dalam diagram sederhana dalam bentuk “Gunung Es” dan “Pohon Masalah”. ⌚ 10 menit
7. Bagi peserta menjadi 5 kelompok. Tugas kelompok adalah membahas topik masalah yang sudah dipilih berdasarkan kerangka “Analisis Gunung Es” dan analisis “Pohon Masalah”. Dua kelompok pertama menggunakan kerangka “Gunung Es” dan 3 kelompok terakhir menggunakan kerangka “Pohon Masalah”. ⌚ 20 menit
8. Mintalah masing-masing kelompok untuk presentasi, paling lama 3 menit untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. ⌚ 15 menit
9. Berikan apresiasi terhadap diskusi kelompok dan sekaligus catatan-catatan kritis. ⌚ 5 menit
10. Diskusikan dengan peserta mengenai posisi dan peran guru dalam konteks analisis Pohon Masalah dan analisis Gunung Es. ⌚ 15 menit
11. Ajaklah peserta untuk mengubah Pohon Masalah menjadi Pohon Harapan. Ambil salah satu hasil kerja kelompok terbaik untuk dibahas bersama menjadi Pohon Harapan. ⌚ 15 menit
12. Diskusikan dengan peserta mengenai posisi serta peran ormas dan pemerintah dalam konteks Pohon Harapan ekstremisme beragama. ⌚ 15 menit

13. Sebelum sesi ditutup, beri kesempatan kepada satu-dua peserta untuk menyampaikan pembelajaran penting yang diperoleh selama sesi ini berlangsung.

🕒 5 menit

14. Tutup sesi ini dengan menekankan pentingnya memahami Pohon Masalah dan Pohon Harapan serta orang-orang di balik pohon tersebut. 🕒 5 menit



Memahami Fenomena Ektremisme Beragama

A. Ektremisme Beragama dalam Riset

Sudah banyak riset dilakukan mengenai fenomena ektremisme beragama, atau radikalisme secara umum. Salah satu yang paling disoroti adalah fenomena radikalisme di kampus. Radikalisme di kampus sesungguhnya tidak terjadi begitu saja. Ada proses panjang yang melatarbelakangi fenomena ini. Datangnya era reformasi pada Mei 1998 hanya menjadi pintu masuk bagi kelompok-kelompok yang sudah mulai mengakar di kampus. Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan oleh Litbang Departemen Agama tahun 1996 pada empat perguruan tinggi sekuler yakni UI, UGM, Unair dan Unhas, seperti dikutip Saifuddin (2011), dosen UIN Sunan Kalijaga, terjadi peningkatan aktivitas keagamaan di sejumlah kampus-kampus tersebut, bahkan disebutkan bahwa kampus-kampus tersebut menjadi tempat yang paling potensial berkembangnya aktivitas keislaman (religius) yang cenderung eksklusif dan radikal. Dengan demikian, revivalisme Islam tidak muncul dari kampus-kampus berbasis keagamaan, tetapi dari kampus-kampus sekuler atau umum.

Kelompok-kelompok di kampus yang kemudian terkenal dengan nama Tarbiyah adalah kelompok yang paling awal melakukan penetrasi ke mahasiswa. Bisa dipahami jika penelitian Anas Saidi dan Masykuri Bakri (2016) menemukan bahwa Tarbiyah hampir memonopoli kampus-kampus umum. Meskipun tujuan akhirnya adalah menegakkan syariat Islam (Negara Islam), agaknya mereka belajar dari pengalaman Masyumi. Karena ketidaksabarannya dalam menegakkan syariat Islam, membuat pengusung utama Piagam Jakarta ini dibubarkan Soekarno. Sikap keras yang tanpa strategi adaptasi yang memadai, membuat perjuangan mendirikan Negara Islam itu, layu sebelum berkembang. Penelitian Anas dan Masykuri bahkan menemukan fakta lain bahwa faksi-faksi radikal tidak hanya dari kelompok Tarbiyah, tetapi juga dari kelompok lain seperti HTI.

Penelitian Rita Pranawati dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta tentang “Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Studi Kasus UI dan UIN Jakarta” (Desember 2012), menunjukkan bahwa ide-ide radikal telah ‘berhasil’ secara kuat melakukan penetrasinya ke sejumlah mahasiswa di UI. Hal itu kita bisa lihat dengan mencermati hasil beberapa indikator kunci, misalnya, persetujuan terhadap kewajiban penegakkan negara Islam yang relatif besar, (64,4%); pemerintahan yang tidak menggunakan hukum Islam boleh diperangi/dikudeta sebanyak 17%.

Penelitian yang relatif baru dilakukan oleh Alvara Research Center (Desember 2017) terhadap 25 kampus unggulan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa yang setuju dengan negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara *kaffah* mencapai 23.5%. Mahasiswa yang setuju khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal dibanding NKRI mencapai 17.8%. Mahasiswa yang setuju dengan pernyataan bahwa saya siap berjihad untuk tegaknya negara Islam/khilafah mencapai 23.4%.

Dalam paparannya, Alvara Research Center juga mengutip survei BNPT (2016) kepada pemuda yang menemukan bahwa 26.7% setuju dengan jihad menggunakan kekerasan. Dalam survei berikutnya, April 2017, kepada mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia BNPT menemukan bahwa 39% mahasiswa tertarik untuk masuk ke organisasi radikal (mengganti ideologi negara). Temuan riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang dirilis awal Maret menunjukkan bahwa sebanyak 30,16 persen mahasiswa Indonesia memiliki sikap toleransi beragama yang rendah atau intoleran. Angka ini tentu sangat mengkhawatirkan. Riset yang lebih baru dilakukan oleh *Internasional NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) yang dirilis Selasa (23/3/2021). Secara umum persepsi dan sikap generasi muda terhadap intoleransi dan ekstremisme menunjukkan tren penolakan yang cukup tinggi, tetapi mereka masih sangat rentan untuk menjadi intoleran.

Fakta-fakta di atas hanya sebagian dari riset yang sudah banyak sekali dilakukan. Dari berbagai riset ini kita tidak bisa

lagi berkilah bahwa ekstremisme beragama hanya fenomena sesaat; atau ekstremisme adalah rekayasa. Ini adalah fakta yang harus dilihat dan dicermati bersama untuk kemudian dicari berbagai opsi-opsi alternatif penyelesaiannya.

Moderasi beragama adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan di samping opsi-opsi yang lain. Opsi ini ingin menegaskan bahwa menjadi muslim moderat adalah pilihan yang tidak bisa ditawarkan karena kita tidak bisa lagi hidup hanya dengan orang yang seiman atau seagama. Fakta keragaman ini adalah sunnatullah. Dalam ungkapan Michael Walzer (2007), toleransi membuat perbedaan menjadi mungkin; perbedaan menjadikan toleransi menjadi penting.


B. Pohon Masalah Ekstremisme Beragama

Analisis pohon masalah adalah suatu langkah pemecahan masalah dengan mencari dan mengurutkan sebab-akibat. Ada banyak istilah lain yang sering digunakan selain *problem tree analysis* (analisis pohon masalah) , antara lain *issues tree* (pohon isu), *systematic diagram* atau *tree diagram* (pohon diagram).

Sebagai suatu alat atau teknik dalam mengidentifikasi masalah, analisis Pohon Masalah mempunyai banyak kegunaan. Alat analisis ini membantu untuk mengilustrasikan korelasi antara masalah, penyebab dan akibat dari masalah dalam suatu hirarki faktor-faktor yang berhubungan. Analisis ini digunakan untuk menghubungkan berbagai isu atau faktor yang berkontribusi pada masalah dan membantu mengidentifikasi akar penyebab dari masalah tersebut.

Duffy, dkk. (2012) menyatakan Pohon Masalah merupakan suatu alat generik yang dapat diadaptasikan untuk berbagai maksud yang luas di antaranya:

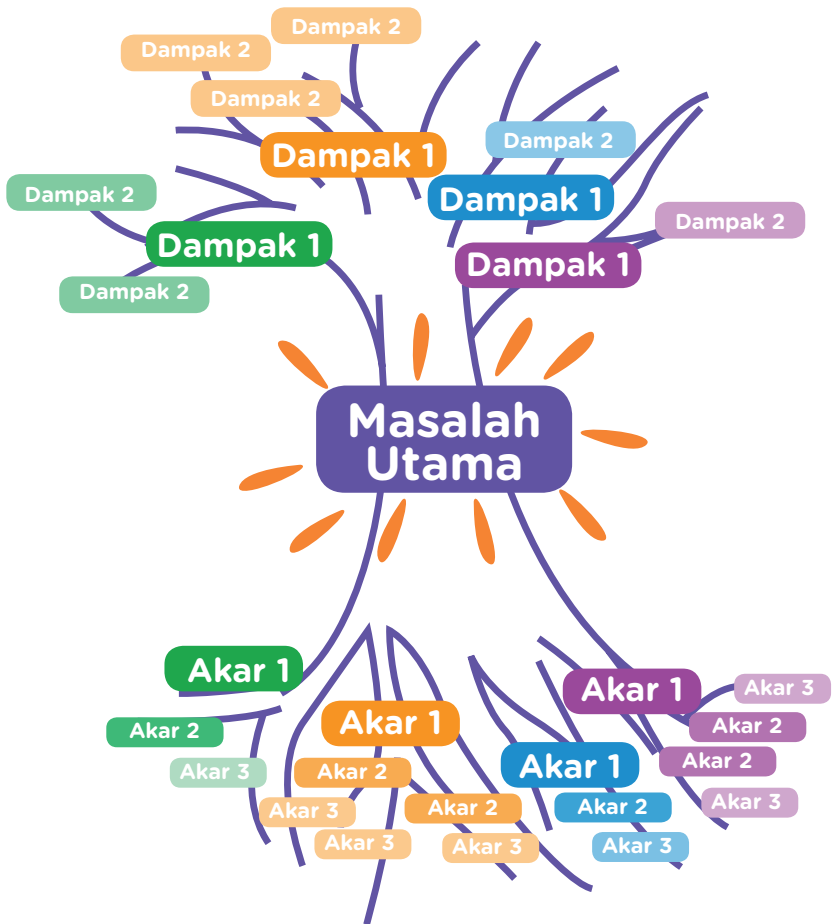
- Mengembangkan langkah-langkah logis untuk mencapai hasil yang spesifik. Melakukan analisis dalam mengeksplorasi penyebab.
- Mengkomunikasikan untuk mendorong keterlibatan dalam pengembangan hasil yang didukung bersama.
- Menggali suatu alur proses pada level yang lebih rinci.
- Menggambarkan secara grafik suatu perkembangan hirarkis, seperti silsilah atau skema klasifikasi.



Dengan Pohon Masalah tersebut, maka kasus yang sedang kita lihat akan tampak lebih gamblang, jelas, dan mudah dipahami. Dengan kata lain, Pohon Masalah adalah gambaran umum dari anatomi masalah yang sedang kita hadapi. Untuk melihat masalah ekstremisme beragama secara utuh, analisis Pohon Masalah akan sangat membantu membaca kasus dengan cara yang lebih mudah dipahami.

Dalam konteks ekstremisme beragama, analisis Pohon Masalah berusaha menelusuri masalah dari akar hingga ranting. Akar adalah penyebab langsung dari kasus intoleransi. Batang adalah masalah utama itu sendiri, yakni kasus ekstremisme beragama. Dahan dan ranting adalah akibat atau dampak dari masalah utama tersebut.

Analisis Pohon Masalah bisa digambarkan dalam diagram berikut ini:



Bagian tengah dari diagram tersebut disebut **Batang Masalah** atau disebut juga dengan **Masalah Utama**. Di bawah **Batang Masalah** adalah **Akar Masalah**. Sedangkan di atas **Batang Masalah** adalah **Dahan/Ranting Masalah** atau disebut juga dengan dampak atau akibat dari masalah utama.

Diagram tersebut hanyalah contoh. Namun demikian, diagram di atas ingin menegaskan bahwa masalah utama dari semua persoalan sosial senantiasa sangat kompleks. Tidak ada penyebab tunggal. Masalah utama selalu disebabkan oleh



banyak faktor. Faktor-faktor ini adalah penyebab dari lahirnya masalah utama.

Dalam diagram tersebut ingin ditegaskan bahwa “Akar 1” adalah penyebab langsung lahirnya masalah utama. “Akar 2” adalah penyebab langsung lahirnya “Akar 1”. Sedangkan “Akar 3” adalah penyebab langsung lahirnya “Akar 2”.

Diagram di atas juga menjelaskan bahwa masalah utama melahirkan dampak-dampak yang beraneka ragam (dampak 1). Sebagaimana akar masalah, masalah utama tidak hanya melahirkan satu akibat. Banyak sekali akibat yang ditimbulkan oleh masalah utama yang tidak tertangani dengan baik. Akibatnya, dampak-dampak dari masalah utama juga melahirkan dampak-dampak lanjutan yang sampai tingkat tertentu seperti efek berantai.

Dalam konteks ini, ekstremisme beragama adalah **masalah utama**. Fenomena ekstremisme beragama ini bisa berbentuk yang paling halus seperti sikap tertutup terhadap orang lain yang dianggap tidak sepaham dengan kelompoknya. Tetapi bisa juga hadir dalam bentuk yang ekstrem, seperti penggerebekan, perusakan tempat ibadah kelompok lain, pengusiran kelompok yang dianggap sesat, atau bahkan bisa dalam bentuk terorisme melalui bom.

Penyebab langsung dari ekstremisme beragama sebagai masalah utama antara lain (1) adanya sikap tertutup yang tidak bisa menerima kehadiran kelompok lain yang berbeda baik dari segi doktrin maupun paham keagamaan; (2) banyaknya media-media online yang suka menyebarkan kebencian dan permusuhan; (3) adanya pemahaman keagamaan yang hitam putih, kaku, dan merasa paling benar sendiri dan yang lain salah, sehingga merasa berkewajiban untuk “meluruskan” yang salah dengan cara-cara kekerasan sekalipun; (4) aparat kepolisian yang kurang sigap dalam mengantisipasi berbagai ancaman intoleransi; (5) adanya kelompok masyarakat yang rentan terhadap provokasi dan ideologisasi kelompok garis keras sehingga mau melakukan aksi-aksi intoleransi termasuk bom bunuh diri. Dan tentu saja banyak faktor-faktor lainnya. Namun demikian, faktor-faktor ini tidak muncul begitu saja tetapi disebabkan oleh banyak penyebab lain yang membuat situasi semakin rawan.



Beberapa penyebab tidak langsung yang ikut memberi andil munculnya kasus-kasus intoleransi antara lain:

Pertama, dari aspek politik. Hampir semua instrumen negara, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Mereka menganggap isu kerukunan, toleransi dan moderasi beragama bukan isu utama. Isu ini dianggap tidak terlalu penting, isu pinggiran. Karena itu, isu semacam ini tidak pernah mendapat perhatian yang selayaknya. Isu ini baru menjadi perhatian ketika terjadi kasus-kasus konflik bernuansa agama. Nyaris tidak ada upaya serius untuk membangun budaya toleran. Kecuali Kementerian Agama, seluruh kementerian dan lembaga negara nyaris tidak punya program yang signifikan untuk turut membangun budaya toleran. Padahal, membangun budaya toleran bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama.

Kedua, dari aspek sosial. Sebagaimana aspek politik, masyarakat menganggap isu ini juga bukan sebagai isu utama. Masyarakat baru bergerak setelah terjadi “kebakaran”. Ironisnya, sebagian masyarakat membenarkan tindakan-tindakan intoleran dengan menyalahkan pihak korban yang dianggap tidak toleran terhadap kelompok mayoritas. Kenyataan ini diperparah oleh sikap sebagian ormas Islam yang cenderung membiarkan umatnya diadu domba oleh provokasi dan kampanye kebencian dan permusuhan. Kalaupun mereka tidak ikut memprovokasi, ormas-ormas Islam ini cenderung membiarkan disharmoni sosial terjadi. Tokoh-tokoh agama, dalam berbagai khotbah maupun pidato pengajian-pengajian atau tabligh-tabligh akbar jarang sekali menyinggung dan menjadikan isu ini sebagai topik utama.

Ketiga, dari aspek ekonomi. Aspek ini menarik karena dari berbagai penelitian disebutkan bahwa pelaku intoleransi – terutama dalam kasus-kasus terorisme – sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu. Artinya, secara tidak langsung, tingkat kemampuan ekonomi juga ikut memberi andil terhadap maraknya kasus-kasus intoleransi.

Masih dari aspek ekonomi, pasar juga ikut memberi andil dengan memberi ruang bagi penyebaran provokasi melalui media cetak, baik buletin, majalah, maupun buku-buku yang dijual bebas di pasaran.



Keempat, dari aspek budaya. Arus budaya luar yang begitu deras masuk hingga ke pelosok-pelosok membuat budaya lokal semakin terdesak dan terpinggirkan. Sebagian bahkan sudah mati. Padahal, kearifan lokal yang menjadi basis toleransi sebagian besar berasal dari budaya lokal.

C. Langkah-Langkah Penyusunan Pohon Masalah

- 1.** Mengidentifikasi dan merumuskan masalah utama berdasarkan hasil analisis atas informasi yang tersedia. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah utama, misalnya dengan cara diskusi, curah pendapat, dll.
- 2.** Menganalisis akibat atau pengaruh adanya masalah utama yang telah dirumuskan pada poin 1 di atas. Misalnya akibat dari konflik agama adalah (a) kerukunan antar kelompok agama terganggu, (b) hubungan antar masyarakat semakin renggang, (c) ada dendam kelompok, dst.
- 3.** Menganalisis penyebab munculnya masalah utama. Penyebab pada tahap ini kita namakan penyebab level pertama. Misalnya penyebab konflik agama adalah (a) kelompok-kelompok agama cenderung provokatif, (b) kurang menghargai perbedaan, (c) komunikasi antar agama hanya pada tingkat elit, (d) masyarakat mudah terpancing.
- 4.** Menganalisis lebih lanjut penyebab dari penyebab level pertama. Penyebab dari munculnya penyebab level pertama ini kita namakan penyebab level kedua. Misalnya pada nomor 3 poin (d) di atas, penyebab masyarakat mudah terpancing adalah (a) ada kecemburuan sosial di antara mereka, (b) ada kesenjangan ekonomi, (c) masyarakat kurang terdidik, dst.
- 5.** Menganalisis lebih lanjut penyebab dari munculnya penyebab level kedua. Demikian seterusnya, analisis dapat dilakukan sampai dengan level kelima.

6. Menyusun Pohon Masalah secara keseluruhan.
Dengan adanya diagram Pohon Masalah tersebut, maka kita bisa melakukan berbagai inisiatif sesuai dengan kemampuan kita. Semua cabang dari masalah yang melahirkan berbagai dampak masalah mungkin tidak bisa kita atasi semua karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Di sinilah kita perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain agar bisa berbagai peran untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Demikian juga pada level akar masalah. Dari semua akar masalah yang teridentifikasi, mungkin tidak semuanya mampu kita pecahkan. Maka perlu pembagian tugas dengan pihak-pihak lain agar juga bisa berkontribusi untuk mengatasi masalah tersebut.

D. Pohon Harapan

Pohon Harapan adalah kebalikan dari Pohon Masalah. Jika Pohon Masalah selalu bicara masalah, maka Pohon Harapan selalu bicara segala hal yang positif yang menjadi harapan dan tujuan bersama. Pohon Masalah yang sudah dibuat bisa menjadi alat bantu untuk membuat Pohon Harapan.

Strategi umum untuk menyelesaikan masalah yang tergambar dalam Pohon Masalah adalah dengan mengubah rumusan yang negatif menjadi positif. Semua faktor negatif yang ada dalam Pohon Masalah tersebut diubah rumusannya menjadi positif. Ketika semuanya menjadi positif, maka Pohon Masalah tersebut berubah menjadi Pohon Harapan atau Pohon Tujuan.

Dalam Pohon Masalah di mana masalah utamanya adalah konflik bernuansa agama misalnya, akibat dari konflik agama adalah (a) kerukunan antar kelompok agama terganggu, (b) hubungan antar masyarakat semakin renggang, (c) ada dendam kelompok, dst. Ketika dirumuskan dalam Pohon Masalah, maka rumusan **konflik agama** (negatif) diubah menjadi **kerukunan beragama** (positif). Demikian juga akibatnya (a) kerukunan antar kelompok agama terganggu, (b) hubungan antar masyarakat semakin renggang, (c) ada dendam kelompok, dst. diubah rumusannya ke positif



sehingga menjadi (a) kerukunan antar kelompok agama berjalan lancar, (b) hubungan antar masyarakat semakin erat, (c) ada perdamaian antar kelompok, dst.


Ketika Pohon Masalah diubah menjadi Pohon Harapan, maka Pohon Harapan tersebut dapat dirumuskan sebagai agenda program yang masing-masing cabang terdiri dari beberapa kegiatan untuk mewujudkan harapan tersebut. Untuk mewujudkan pohon harapan tersebut tentu saja tidak hanya dibebankan kepada satu kelompok saja. Semua pihak perlu diajak kerja sama untuk mewujudkan Pohon Harapan tersebut. Dengan kerja sama tersebut, yang di dalamnya ada pembagian tugas, maka masing-masing cabang dalam Pohon Harapan tersebut bisa dikerjakan oleh berbagai pihak sehingga semakin lama Pohon Harapan semakin menjadi kenyataan.

E. Analisis Stakeholder

Analisis *Stakeholder* adalah pendekatan yang melihat suatu masalah dari sisi aktor yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam paradigma analisis sosial, tidak ada masalah yang diakibatkan oleh faktor tunggal. Demikian juga dari sisi aktor, analisis sosial melihat tidak hanya pelaku dan korban, tetapi juga semua pihak yang terkait dengan masalah tersebut, baik orang maupun lembaga; baik lembaga pemerintah maupun swasta; baik langsung maupun tidak langsung.

Sebagaimana terlihat dari diagram Analisis Pohon Masalah, setiap masalah pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor yang pada dasarnya merupakan masalah-masalah lain yang menyebabkan terjadinya masalah utama. Setiap faktor dalam Analisis Pohon Masalah pada dasarnya memiliki aktor sendiri-sendiri yang satu sama lain kadang terpisah dan kadang terkait satu sama lain. Setiap aktor dalam masalah tersebut harus dilihat dan diidentifikasi sedemikian rupa, baik aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Termasuk di dalamnya adalah menganalisis peran masing-masing aktor dalam masalah tersebut.

Dengan adanya analisis *stakeholder*, maka upaya untuk mengurai kompleksitas masalah bisa dilakukan secara lebih mudah. Dengan demikian, upaya penyelesaian terhadap



tersebut harus memperhatikan peran masing-masing aktor yang terkait dengan masalah sehingga bisa dicari pendekatan yang tepat terhadap masing-masing aktor.

Hasil identifikasi terhadap seluruh pihak yang terkait dengan masalah tersebut bisa dirangkum dalam tabel berikut ini:

| NO | Para Pihak | Peran dalam Kasus | | Rekomendasi |
|----|------------|-------------------|------------|-------------|
| | | Peran Ideal | Peran Riil | |
| | | | | |

Dalam tabel di atas, yang dimaksud **para pihak** adalah orang atau sekelompok orang, ormas, lembaga, baik pemerintah maupun swasta yang terkait dengan kasus intoleransi. Dalam kolom berikutnya, kita akan mengidentifikasi peran tersebut dalam kasus intoleransi. Peran ini ada dua jenis, seperti terlihat dalam kolom ketiga dan keempat, yakni **peran ideal** dan **peran riil**.

Peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan oleh tokoh/pihak tersebut dalam menghadapi kasus intoleransi. Dalam kolom ini ditulis dengan jelas. Kemudian di kolom berikutnya, peran riil adalah peran yang nyata-nyata dilakukan atau tidak dilakukan oleh tokoh/pihak tersebut. Kemudian, di kolom terakhir, **rekomendasi** adalah saran yang sebaiknya dilakukan oleh kita semua, terutama pihak yang paling bertanggung jawab, agar peran ideal tersebut dilakukan secara maksimal.

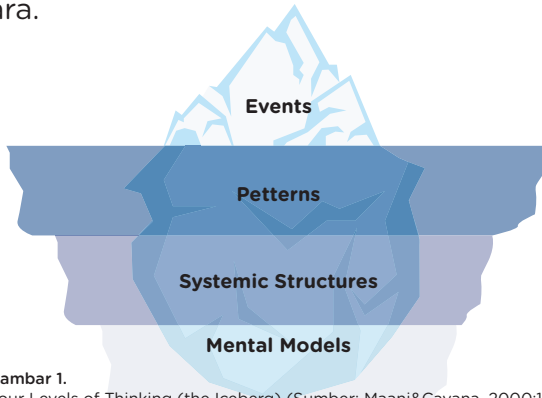
Analisis *stakeholder* ini akan membantu kita melakukan pendekatan dan sekaligus *treatment* bukan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kasus-kasus intoleransi tetapi sekaligus sebagai upaya pencegahan agar kasus-kasus yang sama tidak terulang lagi.

F. Analisis “Gunung Es”

Gunung es (*Iceberg*) merupakan suatu bongkahan besar es mengambang di perairan terbuka. Karena densitas (massa jenis) es lebih rendah dari air laut, umumnya 90% volume gunung es berada di bawah permukaan laut. Hal ini, menurut Jat Jat E. Wirijadinata dan Dian Afriany (2017) memunculkan suatu istilah puncak gunung es (*tip of the iceberg*) yang biasanya diterapkan pada suatu masalah atau kesulitan untuk menggambarkan bahwa masalah yang tampak hanyalah sebagian kecil dari masalah yang lebih besar.

Dalam konteks kebudayaan, menurut Alo Liliwari (2015), teori gunung es memberikan gambaran bahwa bagian dari gunung es yang nampak di atas permukaan air mewakili aspek-aspek kebudayaan seperti perilaku, kebiasaan makan dan minum, pakaian dan rumah, bahasa dan artefak seni. Itulah kebudayaan material. Sebaliknya, kita tidak bisa melihat aspek-aspek yang ada di bawah permukaan es seperti keyakinan, nilai-nilai, adat, pengalaman dan asumsi, aspek-aspek yang tersembunyi tersebut merupakan potensi yang memberi dukungan terhadap aspek-aspek yang kelihatan. Inilah kebudayaan non-material.

Jika, kebudayaan disamakan dengan gunung es maka nilai itu ada di bawah permukaan air. Keberadaan nilai memberi pedoman umum bagi perilaku manusia, dengan demikian nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap martabat manusia, hak-hak dasar, hak milik pribadi, religiusitas (keberagaman), kesetaraan sosial, yang membimbing perilaku kita dalam berbagai cara.



Gambar 1.
Four Levels of Thinking (the Iceberg) (Sumber: Maani&Cavana, 2000:14)

Mengadopsi dari Kambiz Maani (2013), Jat Jat E. Wirijadinata dan Dian Afriany (2017) menjelaskan bahwa dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa :

1. *Events*, menunjukkan peristiwa/sebuah *snapshot* yang terjadi yang nampak sehari-hari, yang informasinya bisa dari berbagai sumber.
2. *Patterns*, menunjukkan hasil penelaahan terhadap pengulangan *events* sehingga diperoleh *trends* dan pola *events* tersebut berdasarkan gambaran fakta sejarahnya.
3. *Systemic Structures*, merupakan hasil pemikiran yang lebih mendalam yang mampu menggali *interplay* berbagai faktor yang menghasilkan apa-apa yang diobservasi, yang mencoba menghubungkan secara sistematis penyebab terjadinya pola tersebut di atas. Faktor tersebut bisa berupa aspek ekonomi, sosial, politik, atau struktural.
4. *Mental Models*, merupakan hasil pemikiran yang lebih mendalam yang mendasari individu atau organisasi untuk memutuskan mengapa sesuatu hal harus atau tidak boleh dilakukan, sesuai dengan kepercayaan, nilai-nilai, asumsi-asumsi yang diyakininya, dan mendasari alasan keputusannya. Masalahnya adalah bahwa *mental models* ini sangat sulit untuk muncul di permukaan.

Dengan bantuan kerangka metodologi di atas, problem ekstremisme beragama bisa dipahami dengan cara yang lebih mudah dan sekaligus mampu memberikan opsi-opsi yang lebih sederhana dalam mengatasinya.

Dalam level *Event*, problem ekstremisme beragama muncul dalam berbagai peristiwa yang bisa dilihat oleh mata, Misalnya peristiwa teror bom, persekusi terhadap kelompok-kelompok minoritas, pengusiran Jamaah Ahmadiyah, dan sebagainya. Level inilah yang disebut sebagai puncak gunung es. Namun, apa yang tampak oleh mata tidak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya. Justru, dalam level *Event* ini tersembunyi banyak hal yang tidak semuanya atau



bahkan sebagian terbesar tidak tampak oleh mata.

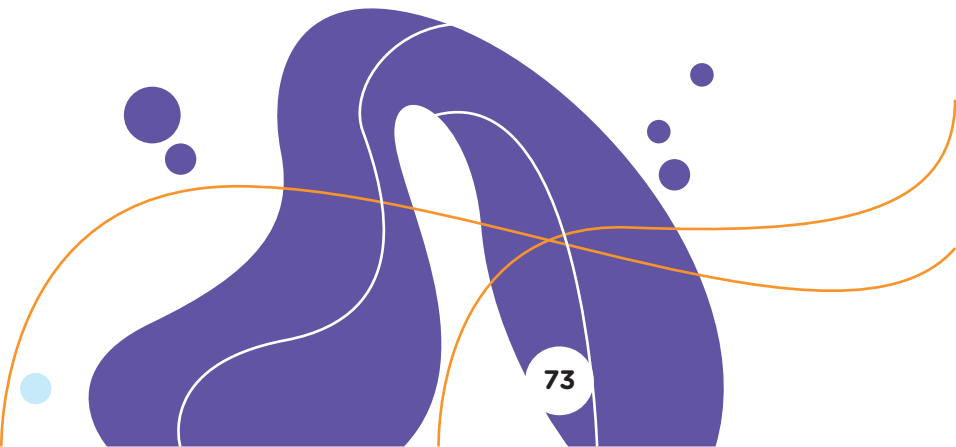
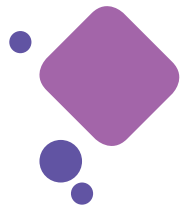
Dalam level *Patterns*, fenomena ekstremisme berusaha dipahami dalam pola-pola yang terulang, baik dari segi peristiwa, pelaku, korban, dampak-dampaknya, serta respons masyarakat terhadap peristiwa tersebut. Level inilah yang tampak oleh mata sebagai “gunung es” fenomena ekstremisme. Namun, sebagaimana level *Events*, level *Patterns* juga tidak menggambarkan fakta ekstremisme beragama secara menyeluruh. Sebagian besar justru tersembunyi di bawahnya, yakni di dalam level *Systemic Structures*. Itulah sebabnya, perlu penggalian lebih jauh agar bisa memahami masalah ekstremisme beragama secara lebih menyeluruh.

Dalam level *Systemic Structures*, fenomena ekstremisme berusaha dipahami dalam konteks yang lebih mendalam, yakni melihat hubungan sebab akibat yang saling terkait satu sama lain yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Berbeda dengan level *Events* maupun *Patterns*, level *Systemic Structures* membahas faktor-faktor yang sebagian besar justru tidak tampak di permukaan. Problem di tingkat struktur terpendam di bawah peristiwa dan pola-pola kejadian yang terulang. Level struktur ini ingin memahami fenomena ekstremisme faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya peristiwa ekstremisme beragama. Faktor ini bisa dilihat dari aspek kekuasaan, politik, ekonomi, budaya maupun agama itu sendiri. Dalam bahasa yang lebih sederhana, jika level *Event* berusaha menjawab pertanyaan “apa yang terjadi” dan level *Patterns* menjawab bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana kaitan peristiwa yang satu dengan lainnya terhubung dalam pola-pola tertentu, maka level *Systemic Structures* ingin menjawab mengapa peristiwa itu terjadi, apa yang mendorongnya terjadi, dan bagaimana hubungan sebab-akibat antar faktor sehingga membuat semuanya terjadi.

Dalam level *Mental Model*, fenomena ekstremisme dilihat dari aspek-aspek yang lebih mendalam, yakni aspek-aspek yang mendasari pelaku peristiwa tersebut. Berbeda dari tiga level sebelumnya, pada level yang terakhir ini ingin diketahui “isi kepala” pelaku peristiwa ekstremisme, baik dari segi

kepercayaan, nilai-nilai, dan asumsi-asumsi yang diyakininya yang menjadi alasan kuat bagi pelaku tersebut untuk menjalankan aksinya.

Dengan memahami fenomena ekstremisme beragama dalam kerangka “gunung es” ini maka beberapa *treatment* bisa dilakukan. Pada level Mental Model, maka upaya yang harus dilakukan adalah “perubahan paradigma” agar pelaku menyadari bahwa pilihan sikap dan tindakannya salah. Pada level Struktur, maka yang harus dilakukan ada melakukan re-design (mendesain ulang), struktur agar dapat mencegah terjadinya peristiwa ekstremisme beragama.



 **Permainan “Pohon dan Kelinci”**

Fasilitator meminta tiga relawan untuk maju. Dua orang berperan sebagai Pohon, dan satu orang berperan sebagai Kelinci. Dua orang yang berperan sebagai Pohon saling berhadapan dengan saling memegang kedua tangan antar keduanya serta diangkat ke atas. Satu orang sebagai kelinci duduk di antara kedua orang (yang menjadi pohon) yang saling berhadapan tersebut.

Kemudian fasilitator akan bercerita, dan dalam ceritanya akan menyebutkan tiga kata yaitu “GERIMIS”, “HUJAN”, dan “BADAI”. Saat fasilitator menyebutkan kata “GERIMIS” maka semua peserta membentuk formasi Pohon dan Kelinci. Satu orang berfungsi sebagai Kelinci dan dua orang menjadi pohon.

Ketika dalam ceritanya fasilitator menyebut HUJAN, maka 1 orang yang berfungsi sebagai kelinci meninggalkan Pohon untuk mencari pohon lain. Sementara pohon tetap berada di posisi semula.

Saat fasilitator menyebutkan kata “BADAI” maka antara POHON dan KELINCI bertukar posisi dan mencari pasangan Pohon yang lain. Pohon dan kelinci saling mencari pasangannya yang baru.

Permainan ini bertujuan mencairkan suasana, membaurkan seluruh peserta, serta membangun relasi yang kian kuat di antara sesama peserta. Mempererat persatuan dan kekompakkan. Permainan ini dilakukan dengan jarak antar kelompok yang tidak terlalu berdekatan agar fasilitator dapat mengetahui pergerakan peserta.

Sambil bercerita, fasilitator mengamati seluruh pergerakan peserta. Perhatikan mana peserta yang aktif; mana yang pasif; mana yang sering ketinggalan; mana yang kehilangan pohon; dll.

Begini selesai, fasilitator merefleksikan permainan dan menanyakan kepada peserta kira-kira apa pesan moral di balik permainan tadi.



MATERI 3
BELAJAR
DARI PELAKU
DAN KORBAN
EKSTREMISME
BERAGAMA

Sesi ini adalah upaya membangun paradigma moderasi beragama dengan mendengarkan pengalaman pelaku ekstremisme beragama (yang sudah taubat) dengan korban ekstremisme. Di samping itu, sesi ini juga menjadi menjadi salah satu langkah rekonsiliatif penting dengan cara mempertemukan dua kutub “pelaku” dan “korban” dalam satu forum bersama agar bisa saling berinteraksi, memberi testimoni, melakukan refleksi serta, mengambil pelajaran (*lessons learned*) bersama dari fenomena ekstremisme beragama.



Pokok Bahasan:

- 1) Faktor-faktor pemicu munculnya sikap ekstremisme beragama.
- 2) Testimoni pelaku tindakan ekstremisme beragama.
- 3) Testimoni korban ekstremisme beragama.
- 4) Pembelajaran dari pengalaman pelaku dan korban.



Tujuan:

Setelah mengikuti pelatihan ini:

- 1) Peserta memahami faktor-faktor pemicu munculnya sikap ekstremisme beragama dan terorisme.
- 2) Peserta merefleksikan dan mengambil pelajaran penting dari testimoni mantan pelaku terorisme secara langsung.
- 3) Peserta mengalami, merefleksikan dan mengambil pelajaran penting dari testimoni korban terorisme secara langsung.



Metode:

1. *Brainstorming*.
2. Testimoni/Presentasi.
3. Dialog.
4. Refleksi.
5. *Game*.
6. *Ice Breaking*.



Media:

Media:

1. *Meta card*.
2. Lilin.
3. Korek Api.
4. Kertas Plano.
5. Kertas HVS.
6. Spidol.
7. Lakban.
8. LCD proyektor.
9. *Slide*/Makalah.



Durasi:

120 Menit.



Langkah-langkah Pembelajaran:

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan, substansi materi serta target yang ingin dicapai dari sesi ini kepada seluruh peserta. ⌚ 5 menit
2. Fasilitator mulai sesi dengan *Ice Breaker* “*Marina Dance*”. ⌚ 2 menit
3. Fasilitator memulai *brainstorming* dengan bertanya 2 hal pada peserta. ⌚ 5 menit
 - *Apakah faktor pemicu munculnya sikap dan tindakan ekstremisme beragama?*
 - *Apa anda atau keluarga dekat pernah menjadi pelaku atau sebaliknya menjadi korban, meski dalam skala yang lebih ringan?*
4. Fasilitator membagikan 2 kertas *meta-card* yang berbeda warna, untuk menuliskan jawaban atas 2 pertanyaan di atas ke seluruh peserta. ⌚ 4 menit
5. Fasilitator meminta peserta untuk membacakan jawaban peserta; kemudian menulis setiap *inputs* peserta sambil membuat 2 kolom sesuai dengan 2 kategori tadi. ⌚ 15 menit
6. Fasilitator membacakan tulisan hasil *brainstorming* para peserta terkait 2 kategori di atas, sambil menjembatani dengan “narasi” sesi berikutnya yang akan menghadirkan “pelaku” dan “korban” yang hendak memberi testimoni. ⌚ 5 menit
7. Fasilitator mempersilakan narasumber I (eks pelaku) untuk memberikan testimoni dan mempresentasikan pengalamannya. ⌚ 20 menit

8. Fasilitator mempersilakan narasumber II (korban) untuk memberikan testimoni dan mempresentasikan pengalamannya. 🕒 20 menit
9. Fasilitator membuka ruang dialog-interaktif antara narasumber dengan para peserta. 🕒 10 menit
10. Fasilitator memberi kesempatan kepada kedua narasumber untuk memberikan respons.
11. Fasilitator menggarisbawahi beberapa catatan penting dari pengalaman korban dan pelaku ekstremisme beragama.
12. Fasilitator kemudian minta dua orang peserta untuk menyampaikan hasil pembelajaran dari sesi ini. Satu orang pembelajaran dari eks pelaku dan satu orang dari korban.
13. Fasilitator memberikan penekanan dan catatan tambahan terhadap apa yang disampaikan peserta serta pembelajaran penting dari sesi ini secara keseluruhan.
14. Fasilitator menutup sesi sambil mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta, serta memberikan *applause* kepada kedua narasumber. 🕒 1 menit



ALI FAUZI & NI LUH ERNIATI DARI KEKERASAN DAN TRAUMA HINGGA SALING MEMAAFKAN

Pengalaman interaksi langsung (*direct interaction*) adalah salah satu cara terbaik dalam konteks rekonsiliasi bersama antara mantan pelaku dan korban. Selain bertujuan untuk memutus siklus kekerasan, trauma dan dendam terkait peristiwa kelam di masa lalu, metode ini sekaligus berdaya guna untuk membentuk perspektif baru bagi keduanya dalam aktifitas dan kegiatan moderasi beragama di masa depan. Salah satu kisah inspiratif tentang perjumpaan dan interaksi langsung antara mantan "pelaku" dan "korban" adalah kisah perjumpaan Ali Fauzi Manzi dengan Ni Luh Erniati.

Ali Fauzi Manzi alias Ikrimah alias Abu Ridha adalah adik bungsu tiga bersaudara Mukhlas, Amrozi, dan Ali Imron, dalang utama kasus Bom Bali I 2002, yang menewaskan 202 korban jiwa; 200 luka berat dan sedang; 47 bangunan hancur serta kerugian material sangat besar. Mukhlas dan Amrozi telah menjalani vonis mati, sedangkan Ali Imron masih menjalani hukuman seumur hidup hingga kini.

Paska penangkapan ketiga kakaknya, jejaring Jamaah Islamiyyah (JI) menaruh harapan besar kepada Ali Fauzi Manzi untuk mengobarkan teror di Indonesia seperti dua kakaknya. Mengapa demikian? Sebab selain memiliki ketrampilan militer mumpuni, Ali Fauzi juga memiliki rekam jejak dan reputasi internasional, terbukti ia berhasil keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi dan telah malang melintang di berbagai kamp pelatihan militer Jamaah Islamiyyah (JI) di Malaysia serta kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Akan tetapi, takdir menentukan jalan lain. Petualangan dan keterlibatan Ali Fauzi Manzi dalam jalan ekstremisme kekerasan terakhir tercatat dalam kerusuhan Ambon dan Poso antara 1999-2000. Setelah konflik mereda, Ali Fauzi kembali lagi bergabung dengan koleganya di Kamp Filipina, sebelum akhirnya aparat Filipina berhasil menangkapnya pada tahun



2004. Atas desakan dan lobi pemerintah Indonesia, pada tahun 2006, Ali Fauzi Manzi diekstradisi dari Filipina ke Indonesia dalam status sebagai tahanan kasus terorisme.

Ali Fauzi Manzi mengenang kisah, setiba di Indonesia, dia menduga akan mengalami interogasi dengan cara-cara kekerasan dan penyiksaan. Akan tetapi, nasib memilih takdir berbeda. Ketakutan tentang penyiksaan oleh aparat kepolisian Indonesia sama sekali tidak dialaminya, dan ia justru mendapatkan perlakuan secara sangat manusiawi. Pengalaman ini sangat “membekas” dalam diri Ali Fauzi Manzi, hingga tahap demi tahap ia mulai menyadari kesalahan, melakukan refleksi dan akhirnya mengalami perubahan total dari pilihan jalan kekerasan dan teror menjadi “pegiat” bina damai.

Bahkan, saat ini, Ali Fauzi Manzi bersama Ali Imron justru memilih jalan damai menjadi “pegiat” perdamaian dengan misi merangkul kembali sisa-sisa jaringan dan kolega yang masih teguh pada ideologi ekstremisme mereka, termasuk terlibat langsung dalam upaya rekonsiliasi dengan para korban dan keluarga yang terdampak langsung tragedi Bom Bali I.

Bagaimana Ali Fauzi Manzi tertarik bergabung dengan Jamaah Islamiyyah (JI)? Ali Fauzi berkisah, salah satu faktor penting yang membuatnya terlibat dalam jejaring teroris adalah faktor hubungan keluarga (*kinship*). Ketertarikannya bergabung berawal karena ajakan keluarga sebagai lapis pertama, khususnya ajakan tiga kakaknya yang telah lebih dulu bergabung dengan kelompok ini. Kedekatan emosional dengan keluarga sangat memengaruhinya, sebab setiap hari berkumpul, berdiskusi dan berbagi pengalaman bersama secara intens, termasuk saat bersama latihan militer di berbagai kamp JI di beberapa negara. Ali Fauzi menuturkan, sebelum dia bergabung dengan kelompok ini, tiga kakaknya telah bergabung lebih dulu, sambil mengenang dua kakaknya yang telah menjalani eksekusi mati di tangan regu tembak, dan menaruh harapan serta optimisme besar pada Ali Gufron yang sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup untuk terus memilih jalan sebagai pegiat “bina damai” bagi para kolega lainnya.



Ali Fauzi Manzi menambahkan, faktor kedua yang membuatnya tertarik bergabung dengan Jamaah Islamiyyah (JI) adalah pengaruh pergaulan teman sejawat. Menurutnya, teman sejawat adalah lapis kedua terdekat yang sangat mudah memberikan efek saling memengaruhi dan cukup determinan dalam menentukan pilihan seseorang. Jika seseorang berteman dengan kawan yang ekstrim, potensi bersikap dan bertindak ekstrem juga lebih mungkin, begitu juga sebaliknya.

Faktor pengaruh teman sejawat versi Ali Fauzi ini juga terkonfirmasi dalam banyak kasus pelaku aksi terorisme lainnya. Tentu banyak faktor lain yang juga turut berpengaruh, termasuk tingkat keterpaparan seseorang dengan ideologi keagamaan ekstrim, seperti doktrin mudah mengkafirkan (*tasarra'a fi al-takfiri*); memaknai jihad sebagai aktifitas perang bersenjata (*jihad qital*); ajaran *Fa'i* (boleh merampok untuk jihad); ajaran *al-Wala wa al-Bara* (loyal kepada pemimpin sealiran, memberontak kepada pemimpin di luar aliran); doktrin mendirikan negara Islam adalah kewajiban; konsep *taghut* (menganggap umat dan pemimpin Islam yang tidak sealiran sebagai sekutu setan), dan lainnya.

Setelah memilih jalan sebagai “pegiat” bina damai, Ali Fauzi Manzi berinisiatif untuk berdamai dengan masa lalunya, termasuk dengan berkeliling mengunjungi para korban Bom Bali I dan II untuk meminta maaf atas semua kesalahan di masa lalu. Ali Fauzi mendirikan Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) dengan tujuan mengajak para mantan teroris dan kombatan untuk mengampanyekan jalan perdamaian.

Niat baik Ali Fauzi bersama beberapa koleganya ini tentu tidak selalu berjalan mulus. Awalnya para korban dan keluarga “enggan” menerima, mengingat kerugian fisik, material, dan mental yang diderita. Namun, seiring tertanamnya kesadaran di semua pihak bahwa semua yang terjadi adalah takdir, akhirnya semua pihak secara bertahap mau menyambut uluran permintaan maaf Ali Fauzi kepada korban dan keluarganya, hingga dengan segala keringanan hati bisa saling memaafkan dan berekonsiliasi dengan para mantan teroris.

Seiring waktu, langkah rekonsiliasi ini tidak hanya lahir dari inisiatif pelaku teroris, namun juga dari para korban



dan keluarganya sendiri. Sebagian korban justru secara aktif berkunjung dan silaturahmi ke rumah para mantan teroris, bertemu dengan keluarga, istri, dan anak-anaknya. Inisiatif ini tentu langkah yang luar biasa sebab lahir dari kesadaran dan kehendak mandiri para korban. Inisiatif mulia ini dimotori salah satunya oleh Ibu Ni Luh Erniati, salah satu keluarga korban Bom Bali I tahun 2002 yang notabene beragama Hindu dengan mengunjungi Ali Fauzi yang notabene juga mantan narapidana terorisme sekaligus saudara kandung *trio-bombers* kasus Bom Bali I.

Ibu Ni Luh Erniati adalah istri dari I Gede Badrawan, salah satu korban meninggal dunia dalam ledakan Bom Bali I tahun 2002. Di malam terjadi ledakan, I Gede Badrawan bekerja di Sari Club. Takdir berkehendak lain, malam itu adalah malam terakhir sang suami menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggalkan dua anak yang masih belia, si sulung baru berusia 9 tahun dan si bungsu berumur 1.5 tahun. Sepeninggal suami sebagai tulang punggung keluarga, Ibu Ni Luh Erniati hidup susah dan harus menunjang biaya hidup keluarganya sendiri, sebelum akhirnya bangkit lagi hingga berhasil berdamai dengan diri, bahkan mengunjungi dan memaafkan para pelaku teroris.

Langkah mulia Ibu Ni Luh dan Ali Fauzi ini menjadi inspirasi bagi para korban dan pelaku terorisme yang lain. Bahkan, sebagian korban yang lain malah mengembangkan bisnis dan aktifitas ekonomi bersama dengan para mantan pelaku teroris, termasuk jual beli dan saling bertukar burung dan batu mulia serta aktifitas ekonomi lainnya. Terbangunnya kesadaran bahwa yang sudah “hilang” tidak akan akan kembali, baik anggota tubuh maupun orang terkasi akibat aksi terorisme.

Secara bertahap, kesadaran ini lambat laun meringankan beban emosi para korban, sehingga mau dan berani membuka hati untuk berdamai dengan para pelaku terorisme. Kesediaan Ibu Ni Luh Erniati dan korban lainnya hingga mau berkunjung dan memberi maaf ke pelaku terorisme menunjukkan keterbukaan dan ketulusan mereka, dan tentu bukan atas tekanan orang lain, tulus sebagai kesadaran sebagian korban dan mantan pelaku. Sebuah “kekayaan” yang tak ternilai



harganya (*priceless*). Adakah kekayaan yang melebihi sikap “berani” memaafkan orang yang sudah merenggut segalanya dari kita?



KHAIRUL GHAZALI: DARI TERORISME KE PENDIDIKAN ISLAM DAMAI

Meninggalkan *mindset* dan jalan kekerasan bagi sebagian pelaku ekstremisme kekerasan bukan hal yang mudah. Setidaknya ada 3 (tiga) faktor pemicu ketika seseorang memutuskan untuk meninggalkan jalan kekerasan ke jalan damai. *Pertama*, afektif-emosional, yakni ketika seorang ekstremis mengalami banyak kekecewaan atas pergulatan dan aktifitas kelompok. *Kedua*, normatif-ideologis, yakni saat seorang ekstremis menyadari bahwa ideologi yang dianutnya terbukti menyimpang. *Ketiga*, orientasi-keluarga, ketika seorang ekstremis sekedar ingin menjalani hidup berkeluarga layaknya keluarga pada umumnya. Ketiga faktor ini dapat terekam dalam kisah mantan narapidana terorisme, Khairul Ghazali.

Sosok Khairul Ghazali alias Abu Ahmad Yasin mashur di kalangan pimpinan dan anggota Jamaah Islamiyyah (JI) Medan. Selain bertanggung jawab dalam rekrutmen para pemuda sebab kepiawaiannya dalam melakukan indoktrinasi dan ideologisasi ajaran Jamaah Islamiyyah (JI), Khairul Ghazali juga bertugas sebagai tim khusus “penyedia” logistik untuk kepentingan organisasi ekstremisnya ini. Model dan mekanisme rekrutmen generasi muda untuk menjadi anggota organisasi ekstremis seperti ini bukan fenomena baru, bahkan telah berlangsung secara sistematis sejak era Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII), termasuk berpusat di masjid-masjid kampus, organisasi kemasyarakatan (ormas) pemuda Islam maupun wadah-wadah kepemudaan lainnya hingga organisasi Jamaah Islamiyyah (JI) sendiri.

Saat masih aktif di organisasi ini, Khairul Ghazali dan seluruh anggotanya meyakini bahwa non-muslim atau muslim yang di luar alirannya sekalipun adalah musuh, kafir, harus diperangi dan halal harta bendanya. Bermodal doktrin Jamaah Islamiyyah (JI) semisal *taghut*, *takfir*, *al-wala wa al-bara*,



fa'i, *khilafah nubuwwah*, Khairul Ghazali merekrut anggota-anggota baru dan melakukan amaliah *Fa'i* (merampok harta benda) untuk memenuhi kebutuhan logistik organisasi JI Medan.

Khairul Ghazali malang melintang di organisasi ekstremisme ini selama lebih dari 15 tahun. Rekam jejak aksi terorisme terakhir mencatat, pada tahun 2010, Khairul Ghazali terlibat dalam kasus perampokan bersenjata dengan target Bank CIMB Niaga Kota Medan yang menewaskan salah satu anggota Brimob dan kasus penyerangan polisi di Hamparan Perak sebelum akhirnya berhasil ditangkap aparat kepolisian pada September 2010.

Selama menjalani masa tahanan 4 bulan, vonis 6 tahun penjara dan interaksi tidak langsung dengan kisah pilu para korban terorisme, Khairul Ghazali mulai menyadari dan mengevaluasi semua ideologi, ajaran, doktrin, tindakan dan rekam jejaknya di masa lalu. Khairul Ghazali menilai tindakannya telah menyebabkan kerugian bagi umat Islam dan non-muslim, baik jiwa, harta benda dan keluarga. Kekecewaan, sedih, dan empati berkecamuk dalam hati dan benaknya selama di penjara. Akhirnya, Khairul Ghazali memutuskan untuk keluar dari jejaring dan aktifitas terorisme.

Keputusan Khairul Ghazali ini mendapat reaksi keras, penolakan, tantangan, dan ancaman kekerasan. Sudah tak terhitung Khairul Ghazali menerima ancaman pembunuhan, bahkan oleh narapidana teroris lainnya sewaktu masih di dalam penjara. Akan tetapi, ancaman tersebut tidak menyurutkan tekad Khairul Ghazali untuk berubah dan secara total memutuskan hubungan dengan jejaring lamanya di Jamaah Islamiyyah (JI).

Keluarga menjadi faktor kedua yang membuat Khairul Ghazali bertekad hijrah meninggalkan ajaran dan jejaring terorismenya. Dalam catatannya, selama menjalani "i'tikaf" 6 tahun di penjara, Khairul Ghazali mendengar berita dari istri bahwa anaknya kerap mengalami stigmatisasi, *bullying*, dan dicap sebagai "anak-teroris". Khairul Ghazali juga sangat mengkhawatirkan jika ke depan anaknya juga akan mengikuti jejaknya terlibat dalam jejaring terorisme. Stigma dan *bullying*





ini mengguncang mental sehingga membuat anaknya *minder* dan trauma untuk kembali ke sekolah. Dengan berat hati keluarga memberhentikan sekolah sang anak dan mencari alternatif model pendidikan khusus.

Dalam teropong Khairul Ghazali, stigma dan *bullying* ternyata juga menimpa anak-anak para pelaku yang terlibat dalam kasus terorisme lainnya. Dia mengandaikan, pengalaman anaknya juga akan dialami anak-anak dengan latar belakang yang sama. Jika ada 500 narapidana teroris, maka setidaknya akan ada minimal 1000-1500 anak yang berpotensi mengalami stigmatisasi dan *bullying* sebagai “anak-teroris” di sekolah masing-masing. Setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, Khairul Ghazali berinisiatif mendirikan lembaga pendidikan Islam, semacam pesantren yang khusus mewadahi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan latar belakang kasus “teroris”.

Berbekal tekad dan semangat untuk memberi manfaat dan menyebarkan pendidikan Islam Damai, bersama beberapa kolega, Khairul Ghazali mendirikan Pesantren Al-Hidayah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lazimnya lembaga pendidikan Islam, Pesantren Al-Hidayah bentukan Khairul Ghazali dan para koleganya juga mengacu pada model kurikulum keagamaan standar, dengan beberapa penekanan pada beberapa aspek tertentu, khususnya materi deradikalisasi dan kontra narasi terorisme.

Selain dua materi khusus di atas, kurikulum pendidikan di Pesantren Al-Hidayah mengacu pada internalisasi 4 (empat) nilai, antara lain: penanaman sifat kritis terhadap ajaran-ajaran radikal; menjunjung tinggi pluralisme dan kemajemukan; reideologisasi dan reindoktrinasi pesan dan ajaran Islam yang toleran dan cinta damai; serta menjauhkan siswa dari model pengajaran keagamaan ekstremis dan anarkis. Bercermin pada pengalamannya selama malang melintang di Jamaah Islamiyyah (JI), model pengajaran agama yang sarat dengan “muatan” ekstremisme dan kekerasan tidak akan bersifat konstruktif, namun sebaliknya akan bersifat sangat destruktif, baik bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat secara umum.

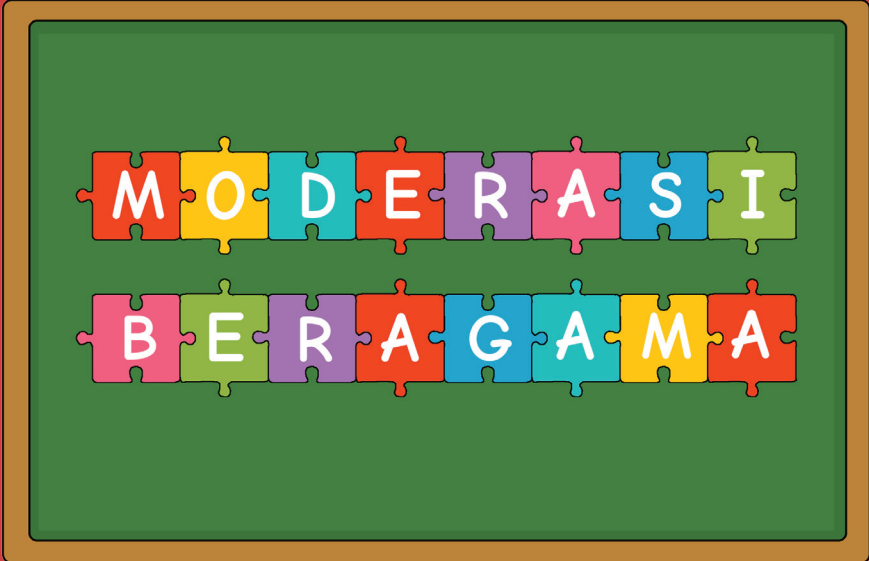
Demi menjamin arah dan kualitas materi pendidikan, Khairul

Ghazali menyusun kurikulum sendiri, tentu bersama beberapa koleganya, sehingga relevan dengan niat awal pendirian Pesantren Al-Hidayah. Dalam hal kapasitas kepenulisan, “sedikit” yang meragukan kemampuannya. Terbukti dari jemarinya lahir berbagai karya tulis dalam beberapa tema, termasuk mewakili *passion* terbesarnya saat ini, melakukan pendidikan “literasi-jihad” sebagai upaya deradikalisasi dan kontra narasi ideologi ekstremisme dan jejaring terorisme di Indonesia.

Genap 5 tahun usia pesantren Khairul Ghazali, dan kini jumlah anak-anak “khusus” yang ikut menjadi santri di sana berjumlah puluhan. Berbekal niat baik dan tekad memperbaiki apa yang sudah disemainya dulu, Khairul Ghazali mantap menjalani hidup baru meninggalkan *mindset* dan jalan kekerasan yang telah digelutinya selama ini berdasarkan 3 faktor; “afektif-emosional”, “nomatif-ideologis”; dan “orientasi-keluarga” seperti uraian di paragraf awal.

MATERI 4

MODERASI BERAGAMA DALAM KONSEP



MODERASI
BERAGAMA

Sesi ini mengajak peserta memahami paradigma moderasi beragama (*wasathiyah*), meliputi basis konseptual moderasi beragama, prinsip-prinsip moderasi beragama; parameter dan indikator moderasi beragama; serta konsep moderasi beragama baik dalam konteks hubungan intra-agama maupun antar agama. Sesi ini juga mengajak para guru melakukan refleksi bersama tentang moderasi beragama dalam konteks berbangsa dan bernegara, khususnya moderasi beragama di bumi Indonesia tercinta.



Pokok Bahasan:

- 1) Moderasi beragama sebagai konsep sosial.
- 2) 9 (Sembilan) nilai moderasi beragama.
- 3) Moderasi beragama dalam teks suci



Tujuan:

Setelah mengikuti pelatihan ini:

- 1) Peserta mampu menyerap prinsip, indikator, dan posisi moderasi beragama sebagai sebuah konsep sosial.
- 2) Peserta mampu menginternalisasikan sikap moderasi beragama dalam teks-teks suci keagamaan.
- 3) Peserta mampu menerapkan Sembilan (9) nilai moderasi beragama dalam proses belajar mengajar.



Metode:

- 1) Presentasi.
- 2) Diskusi kelompok.
- 3) *Game*.



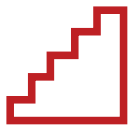
Media:

- 1) Plano.
- 2) *Metaplan*.
- 3) Spidol.
- 4) *Doubletip*.
- 5) Makalah/ slide presentasi.
- 6) Catatan peserta.



Durasi:

- 1) 2.5 jam (150 menit)



Langkah-langkah Pembelajaran:

1. 1) Fasilitator menjelaskan tujuan, substansi materi, serta target yang ingin dicapai dari sesi ini kepada seluruh peserta. ⌚ 5 menit
2. Fasilitator/narasumber memaparkan materi seputar Moderasi beragama sebagai konsep sosial; nilai-nilai moderasi beragama; dan bentuk-bentuk moderasi agama dalam berbagai kitab suci agama 40 menit. Fasilitator memfasilitasi peserta untuk merespon, memberi komentar, dan berbagi pengalaman selama proses belajar mengajar di sekolah berdasarkan paparan fasilitator/narasumber tersebut, termasuk respons atas 9 nilai moderasi beragama di atas. ⌚ 20 menit
3. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok kecil, masing-masing terdiri dari 5-7 orang untuk masuk ke sesi diskusi kelompok. ⌚ 5 menit
4. Fasilitator membagi topik diskusi 4 kelompok tersebut berdasarkan Sembilan (9) nilai moderasi sebagai berikut: ⌚ 5 menit
 - a) Kelompok 1: *Tawassuth dan Tasamuh.*
 - b) Kelompok 2: *l'tidal.*
 - c) Kelompok 3: *Syura, Ishlah, dan Anti Kekerasan Ramah Budaya*
 - d) Kelompok 4: *Qudwah dan Muwathanah.*
5. Fasilitator meminta setiap kelompok mengidentifikasi dan menuliskan praktek-praktek pengalaman keseharian yang relevan dengan masing-masing nilai di atas dalam konteks beragama dan berbangsa. ⌚ 35 menit


- 6.** Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya sambil mempersilahkan kelompok lain untuk merespons atau mengklarifikasi. 🕒 35 menit
- 7.** Fasilitator menggarisbawahi beberapa kesimpulan penting dan fasilitator menutup sesi dengan permainan ‘bercermin’ dengan langkah berikut:
🕒 15 menit
- *Fasilitator meminta setiap peserta untuk berpasangan secara berhadap-hadapan; 1 guru berperan sebagai “bayangan” di cermin dan 1 lainnya sedang “berdandan” di depan cermin.*
 - *Bayangan harus mengikuti gerak-gerik orang yang berdandan.*
 - *Keduanya harus bekerja sama agar bisa bergerak secara selaras dengan kecepatan yang sama.*
- 8.** Fasilitator menjelaskan pesan dalam permainan ini.
🕒 5 menit



MODERASI BERAGAMA: JALAN TENGAH DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA

Sejak awal, Islam telah memperkenalkan konsep *wasathiyyah* atau moderasi dalam beragama dengan merujuk pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143 yang mencantumkan kata *ummatan wasathan* (umat moderat). Label sebagai *ummatan wasathan* ini merupakan “keistimewaan” tersendiri bagi kaum muslimin. Menurut Abd al-Karim Zaid, konsep moderasi (*wasathiyyah*) merupakan jalan tengah di antara dua kutub ekstrem yang cenderung saling menegasikan, seperti pilihan sikap moderat di tengah kutub ekstremisme dan liberalisme, atau sikap moderat antara pilihan asketis-gnostisisme dan legal-formalistik dalam berislam. Watak *wasathiyyah* ini memposisikan Islam sebagai jalan tengah yang tidak terjebak dalam dua kutub ekstremitas (*al-ghuluww wa al-taqshir*).

Dalam konteks relasi intra-agama, moderasi (*wasathiyyah*) sendiri bermakna adil, jalan tengah atau keseimbangan antara dua posisi ekstrem yang berseberangan, baik antar aliran, masyarakat, maupun relasi antar negara Islam. *Wasathiyyah* atau moderasi beragama adalah keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi, sehingga konsep moderasi dalam beragama (*wasathiyyah*) mencakup kerangka paradigmatis baik dalam pemahaman, pendekatan, maupun praktik Islam dalam mengkontekstualisasi Islam di tengah peradaban global. Paradigma *wasathiyyah* Islam ini bertumpu pada 9 (sembilan) nilai dan sikap, antara lain: *tawassuth* (mengambil jalan tengah); *tasamuh* (toleransi); *i'tidal* (tegak lurus); *syura* (musyawarah); *ishlah* (inovatif); *qudwah* (teladan); *muwathanah* (menghargai negara-bangsa dan warga negara); Anti Eskremisme-Kekerasan; dan Ramah terhadap Budaya Lokal.



Dalam konteks hubungan antar agama, watak *wasathiyyah* Islam tampak dalam perpaduan ajaran antara ciri “keadilan” dalam Yahudi dan ciri “kasih sayang” dalam Kristen, melebur dalam Islam sebagai agama rahmat bagi semesta (Islam *rahmatan li al-‘alamin*). Hal ini menunjukkan, Islam *wasathiyyah* adalah watak dasar Islam sejak kelahirannya. Meski memiliki banyak perbedaan, Islam tetap memposisikan agama-agama samawi lain sebagai agama monotheistik, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keseimbangan, keadilan, toleransi, dan kebijaksanaan, sehingga Islam mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam (*Islam rahmatan li al-‘alamin*).

Agama-agama besar lain termasuk Kristen juga sangat menghormati perbedaan dan kebebasan beragama. Islam menganggap perbedaan sebagai *sunnatullah* (hukum tuhan), sementara Kristen berpendapat keselamatan tidak hanya bisa datang dari gereja. Hindu dan Buddha juga memiliki doktrin sendiri tentang moderasi dan penghormatan terhadap hak beragama orang lain. Berbagai sudut pandang keagamaan yang ada di Indonesia menyangkut nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan moderasi pada prinsipnya merupakan substansi ajaran setiap agama dan keyakinan. Dan pusaka inilah yang mestinya dipelihara sebaik-baiknya oleh setiap elemen bangsa demi masa depan generasi-generasi berikutnya.

A. Moderasi Beragama dalam Tinjauan

Dalam bahasa Arab, moderasi beragama adalah istilah yang sama dengan *wasathiyyah*, dalam makna mengedepankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan jalan tengah agar tidak terjebak pada sikap keagamaan ekstrem. Moderasi juga bisa berarti sebagai mekanisme berpikir, berinteraksi dan berperilaku secara seimbang (*tawazun*) antara dua kutub ekstrem, sehingga seseorang berhasil mensinergikan kedua kutub tanpa melahirkan pertentangan baru antara prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.

Dalam buku *Qadaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’ashir*, Wahbah al-Zuhaili menulis, berpikir dan bersikap moderat adalah cara paling efektif bagi seseorang untuk meningkatkan stabilitas dan kedamaian sehingga lebih mudah mewujudkan

kesejahteraan individu dan masyarakat. Hal ini dikarenakan *wasathiyah* merupakan wujud dari esensi kehormatan moral dan kemuliaan Islam. Pemahaman ini selaras dengan firman Allah Swt sebagai berikut:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 143).

Selain itu, karakteristik *wasathiyah* Islam juga berhubungan dengan “posisi tengah” Islam di antara agama Yahudi yang menekankan ketegasan dan keadilan (*din al-‘adalah*) dan Kristen yang menekankan kasih sayang (*din al-rahmah*). Islam sebagai “agama tengah” memadukannya menjadi agama yang berkeadilan dan penuh kasih sayang sekaligus (*din al-‘adalah wa al-rahmah*).

B. 9 (Sembilan) Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi (*wasathiyah*) merupakan prinsip keagamaan paling ideal di tengah berbagai kutub ekstremitas ideologi keagamaan dunia saat ini. Prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*) ini setidaknya memiliki 9 (sembilan) nilai, sebagai berikut:

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah). *Tawassuth* adalah memilih jalan tengah di antara dua kutub ideologi keagamaan ekstrem fundamentalisme dan liberalisme. Ciri sikap *tawassuth* ini, antara lain: tidak bersikap ekstrem dalam menyebarkan ajaran agama; tidak mudah mengkafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama; memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwah*)

dan toleransi (*tasamuh*); hidup berdampingan dengan sesama umat Islam maupun warga negara yang memeluk agama lain.

2. *I'tidal* (adil tegak lurus). *I'tidal* bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. *I'tidal* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada bermakna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak. Karena itu, moderasi beragama juga harus mendorong upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bersama (*al-mashlahah al-'ammah*).
3. *Tasamuh* (toleransi). *Tasamuh* adalah keterbukaan seseorang untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Orang yang memiliki sifat *tasamuh* akan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya.
4. *Syura* (musyawarah). *Syura* berarti mekanisme pengambilan keputusan yang berlandaskan pada dialog, komunikasi, saling bertukar pendapat mengenai sesuatu perkara. Mekanisme musyawarah adalah salah satu ciri masyarakat beradab dan demokratis, sehingga hak bersuara setiap warga dijamin dan dilindungi secara sah. Pemahaman ini selaras dengan firman Allah, sebagai berikut: “*Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka*”. (QS Al-Syura:38).
5. *Ishlah* (kreatif inovatif). *Ishlah* bermakna mengutamakan prinsip kreatif inovatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan

zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazah 'ala al-qadimi al-salih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah*.

6. *Qudwah* (teladan). *Qudwah* berarti melakukan kepeloporan dalam prakarsa-prakarsa kebaikan demi kemaslahatan hidup manusia (*common good and well-being*) dan dengan demikian umat Islam yang mengamalkan *wasathiyah* bisa memberikan kesaksian (*syahadah*).
7. *Muwathanah* (menghargai negara-bangsa dan warga negara). *Muwathanah* merujuk pada penerimaan eksistensi model negara-bangsa (*nation-state*) di manapun berada dengan mengedepankan orientasi kewarganegaraan.
8. *Al-La 'Unf* (Anti-Ekstremisme Kekerasan) Kekerasan. Tolak ukur ini mengacu pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, menghormati, dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat, tanpa kekerasan.
9. *I'tiraf al-'Urf* (Ramah terhadap kebudayaan lokal) Indikator ini untuk menakar sejauh mana “pemahaman” keagamaan tertentu mampu berdialog dan mengakomodasi praktik-praktik tradisi dan kebudayaan lokal. Pemahaman keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga paradigma kontekstualis yang positif.



C. Parameter Utama Moderasi Beragama

Berdasarkan realitas empirik di Indonesia kekinian, moderasi beragama (*wasathiyah*) setidaknya dapat dilihat dari empat (4) parameter, antara lain: Komitmen kebangsaan; Tingkat toleransi; Sikap anti-radikalisme dan Nir-kekerasan; dan Ekspresi keagamaan yang akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

1. Komitmen Kebangsaan. Menakar tingkat komitmen kebangsaan saat ini sangat urgen jika dikaitkan dengan kemunculan berbagai paham keagamaan baru yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya nusantara sebagai identitas kebangsaan. Pada tingkat tertentu, paham keagamaan baru ini mencoba mempertentangkan ajaran agama *vis-à-vis* budaya dan negara. Sikap ini tidak perlu karena negara menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran-ajarannya sesuai keyakinan masing-masing, sebagaimana sila pertama Pancasila dan UUD 1945.
2. Level Toleransi. Level toleransi merujuk pada kemampuan individu, kelompok, masyarakat, dan warga negara dalam menunjukkan sikap dan ekspresi keagamaan yang menjunjung tinggi perbedaan yang terjadi di masyarakat. Toleransi di sini tidak hanya terkait dengan pola hubungan intra-agama (antara sesama pemeluk yang seagama dan seideologi), tetapi juga antar-agama (antara warga negara yang berbeda agama), namun juga terkait dengan toleransi dalam bidang sipil dan politik.
3. Anti-Radikalisme dan Nir-Kekerasan. Tolak ukur ini mengacu pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, menghormati, dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat, tanpa kekerasan.
4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Indikator ini untuk menakar sejauh mana “pemahaman” keagamaan

tertentu mampu berdialog dan mengakomodasi praktik-praktik tradisi dan kebudayaan lokal. Pemahaman keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga paradigma kontekstualis yang positif.

D. Moderasi Beragama antara Ekstremisme dan Liberalisme

Selain sebagai pengimbang paham radikalisme atau ekstremisme, moderasi beragama (*wasathiyah*) juga memiliki peran penting sebagai pengimbang ideologi liberalisme keagamaan. Moderasi beragama (*wasathiyah*) dalam konteks ini berposisi sebagai jalan tengah, tidak lebih condong mengikuti ekstrem kiri dan ekstrem kanan, sehingga jika sejak pemahaman keagamaan saja tidak seimbang, maka bagaimana mungkin mewujudkan keadilan masyarakat sebagai esensi ajaran Islam *an sich*. Meskipun dalam prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*) tidak ada pembatasan ketika seseorang memegang “kebenaran-subyektif” atas pilihan agamanya, namun penekanannya adalah bagaimana seseorang tetap beriman sepenuh hati sekaligus tetap menghormati dan menghargai pilihan keimanan orang lain yang berbeda.



NILAI-NILAI MODERASI ISLAM

A. Islam Mengajarkan Berbuat Baik, Adil dan Berimbang Terhadap Siapapun

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ
إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya:

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim”.

(Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8-9).

B. Islam Tidak Memaksa dalam Beragama

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya is Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(Q.S. al-Baqarah [2]: 256).

C. Islam Mengajarkan Allah Swt sebagai Sumber Kasih Sayang

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوٓأِىَ الْإِنۡفِىٓ إِلَىٰ كِتَابِ كَرِيمٍ ﴿٢٩﴾
إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿٣٠﴾
أَلَّا تَعْلُوا عَلٰى وَأَتُوْنِ مُسْلِمِیْنَ ﴿٣١﴾

Artinya:

“Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar! Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.”

(Q.S. Al-Naml [27]: 29-31).

D. Islam Menyerukan Nabi Muhammad Saw Sebagai Teladan Kasih Sayang

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

(Q.S. Al-Anbiya [21]: 107)

E. Islam Mengajarkan Prinsip Toleransi dalam Dakwah

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٦٥﴾

Artinya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”.

(Q.S. Al-Nahl [16]: 125)



F. Islam Mengajarkan Kesetaraan Antar Umat Agama-agama

“إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مِنْ آمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ”.

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang sabi'in, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati” . (Q.S. al-Baqarah [2]: 62).

G. Islam Mengutamakan Jalan Damai

“وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَإِنْ يَرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آيَدُكَ بِنُصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”.

Artinya:

“Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) orang-orang mukmin, dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana” . (Q.S. Al-Anfal [8]: 61-63).



Bahan Diskusi Kelompok

Dalam sesi diskusi kelompok, setelah peserta terbagi ke dalam empat kelompok, fasilitator memberikan 2 handout (bahan bacaan) ke masing-masing kelompok. Fasilitator meminta kelompok membagi menjadi 2 tim kecil. Tim-1 bertugas membaca dan mendalami handout-1, dan Tim-2 bertugas membaca dan mendalami handout-2. Jadi tiap kelompok memiliki kesempatan membaca dan mendalami sumber bacaan yang sama sesuai handout.

Setelah masing-masing kelompok membaca, Fasilitator meminta setiap kelompok mengidentifikasi dan menuliskan masing-masing nilai sesuai dengan tabel di bawah ini. 35'

| No | Kelompok | Topik Bahasan |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | <i>Tawassuth & Tasamuh</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Membuat ilustrasi “gambar” terkait 2 nilai moderasi (orang, tumbuhan, dst).2. Mengeksplorasi penerapan 2 nilai dalam relasi intra dan antar-agama serta berbangsa dan bernegara.3. Menampilkan landasan teologis masing-masing nilai tersebut. |
| 2. | <i>I'tidal, Syura & Ishlah</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Membuat ilustrasi “gambar” terkait 3 nilai moderasi (orang, tumbuhan, dst).2. Mengeksplorasi penerapan 3 nilai dalam relasi intra dan antar-agama serta berbangsa dan bernegara.3. Menampilkan landasan teologis masing-masing nilai tersebut. |
| 3. | Anti-Kekerasan & Ramah Budaya | <ol style="list-style-type: none">1. Membuat ilustrasi “gambar” terkait 2 nilai moderasi (orang, tumbuhan, dst).2. Mengeksplorasi penerapan 2 nilai dalam relasi intra dan antar-agama serta berbangsa dan bernegara.3. Menampilkan landasan teologis masing-masing nilai tersebut. |
| 4. | <i>Qudwah & Muwathanah</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Membuat ilustrasi “gambar” terkait 2 nilai moderasi (orang, tumbuhan, dst).2. Mengeksplorasi penerapan 2 nilai dalam relasi intra dan antar-agama serta berbangsa dan bernegara.3. Menampilkan landasan teologis masing-masing nilai tersebut. |



MATERI 5
MODERASI
BERAGAMA
DALAM
SEJARAH
KEBANGSAAN
INDONESIA

Sesi ini mengajak peserta untuk menggali kembali berbagai pengalaman dan praktik moderasi beragama dalam sejarah kebangsaan Indonesia mencakup partisipasi dan keterlibatan aktif tokoh-tokoh lintas agama dalam proses kemerdekaan; praktek moderasi beragama dalam proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (1945). Dalam sesi ini, fasilitator juga mengajak peserta untuk merefleksikan realitas kemajemukan yang tergambar dalam figur dan sosok para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan Indonesia.



Pokok Bahasan:

- 1) Keterlibatan tokoh-tokoh lintas agama dalam kemerdekaan.
- 2) Moderasi beragama dalam perumusan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Fakta-fakta moderasi beragama dalam figur pendiri bangsa.



Tujuan:

- 1) Guru mampu menggali kembali peran dan keterlibatan aktif tokoh-tokoh lintas agama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
- 2) Guru mampu menyerap sikap moderasi beragama dalam sejarah perumusan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Guru mampu menginternalisasi praktik dan teladan moderasi beragama dari para tokoh dan figur pendiri bangsa.



Metode:

- 1) Nonton film dokumenter.
- 2) Diskusi kelompok.
- 3) *Game*
- 4) Presentasi
- 5) Dialog



Media:

- 1) 3 film dokumenter.
- 2) Kertas plano.
- 3) Spidol
- 4) *Doubletip*
- 5) Catatan peserta.



Durasi:

- 1) 150 menit.



Langkah-langkah Pembelajaran:

1. Fasilitator menjelaskan tujuan, substansi materi serta target yang ingin dicapai dari sesi ini kepada seluruh guru. ⌚ 5 menit
2. Fasilitator/narasumber mengajak peserta menyaksikan tiga (3) “film dokumenter” tentang “peran aktif tokoh-tokoh lintas agama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia”, “moderasi beragama dalam sejarah perumusan Pancasila”, dan teladan moderasi beragama dari para *founding-fathers*. ⌚ 15-20 Menit
3. Fasilitator meminta 3 perwakilan guru untuk memberi komentar pendek setelah menyaksikan tayangan “film dokumenter” tersebut. ⌚ 5 Menit
4. Fasilitator membagi guru menjadi 3 kelompok kecil, masing-masing terdiri dari 7-8 orang untuk masuk ke sesi diskusi kelompok. ⌚ 1 Menit
5. Fasilitator membagi topik diskusi 3 kelompok tersebut berdasarkan 3 (tiga) film dokumenter sebagai berikut ⌚ 5 Menit:
 - a) Grup 1: Mengupas Film-1
 - b) Grup 2: Mengupas Film-2
 - c) Grup 3: Mengupas Film-3
6. Fasilitator meminta setiap kelompok mengidentifikasi dan menuliskan hasil pendalaman kelompok serta prinsip-prinsip moderasi yang terkandung dalam film dan menuliskan di atas kertas plano. ⌚ 35 Menit
7. Fasilitator mengajak peserta memainkan *ice-breaking* “*Marina Dance*”. ⌚ 1 menit

8. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya sambil mempersilakan kelompok lain untuk merespon atau mengklarifikasi. 🕒 15 Menit
9. Fasilitator menggarisbawahi beberapa kesimpulan penting dari hasil diskusi kelompok tersebut. Lalu fasilitator menyampaikan beberapa penjelasan tambahan melalui slide yang sudah disiapkan mengenai jejak moderasi beragama dalam sejarah kebangsaan Indonesia. 🕒 20 menit
10. Fasilitator mempersilakan peserta untuk merespons paparan dalam slide. 🕒 10 menit
11. Fasilitator menutup sesi dengan memberi *applause* kepada seluruh peserta. 🕒 5 menit



Jejak Moderasi Beragama dalam Dakwah Walisongo

Agus Sunyoto dan beberapa sejarawan mencatat, model dan strategi penyebaran dan internalisasi Islam ke Nusantara berlangsung secara akulturatif, simpatik, damai, dan minim kekerasan, serta jauh dari sekedar agenda politik kekuasaan belaka. Jauh sebelum Indonesia merdeka, model dakwah ini telah dirintis sejak masa Walisongo. Meski dalam perjalanannya muncul kompetisi dengan para pemuka Buddha dan Hindu, namun jalan dakwah masa itu tidak melahirkan konflik dan anarkisme, sehingga pendekatan Walisongo tetap dalam kerangka moderasi beragama yang mengedepankan jalan cinta antar sesama pemeluk.

Dalam menyemai, menanam, dan merawat Islam di Nusantara, Walisongo menggunakan tiga model dakwah, antara lain: *Pertama*, model dakwah secara bertahap (*tadriji*) sebagai proses penyesuaian nilai-nilai Islam dengan adat dan tradisi masyarakat Nusantara sebelumnya. *Kedua*, model dakwah dengan menghilangkan beban kesulitan (*'adam al-haraj*), terutama jika berkenaan dengan hak-hak ekonomi, tradisi, agama, dan kepercayaan yang dianut masyarakat Nusantara yang multi-etnis, multi-bahasa, dan multi-budaya. *Ketiga*, model dakwah dengan cara mengurangi beban (*taq lil al-takalif*).

Dalam menerapkan ketiga model tersebut, Walisongo tentu sangat mempertimbangkan watak dan karakter masyarakat Nusantara yang sejak awal memang sangat inklusif dan terbuka. Watak inklusif masyarakat Nusantara ini sendiri terbukti berhasil memproduksi keberagaman dan kekayaan tradisi, sehingga mudah menciptakan percampuran dan perbauran tradisi lokal dengan tradisi yang datang dari masyarakat luar. Sehingga melahirkan kemampuan kreatif dalam merespons dan menyaring beragam budaya-budaya baru hasil persilangan antara budaya lokal dengan budaya luar.



Berhadapan dengan realitas masyarakat Nusantara yang sudah sangat luhur dengan keragaman ini, Walisongo memilih beberapa pendekatan dalam jalan dakwahnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang misalnya tampak lebih memilih strategi kultural sebagai jalan dakwah. Pilihan Walisongo atas strategi kultural ini lebih sebab pertimbangan bahwa budaya Nusantara telah begitu mendarah daging di masyarakat, sehingga pilihannya adalah sinkretisme atau sinergisme Islam dengan budaya Nusantara, populer dengan istilah Islam Nusantara.

Walisongo juga melakukan akulturasi dan fusi budaya dengan menyisipkan ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalam budaya-budaya Nusantara, termasuk juga dengan mengkreasi budaya-budaya baru yang mengandung nilai-nilai Islam. Beberapa hasil kreasi model pendekatan kultural ini adalah Gamelan “Sekaten” terinspirasi dari *syahadatain* (dua kalimat tauhid syahadah); “Gapura” masjid berasal dari sifat Allah Swt *al-Ghafura*; dan lain sebagainya. Selain itu, Walisongo juga “menanam” ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalam naskah atau manuskrip berbahasa Jawa sehingga lahir karya-karya seperti *Serat Cebolek*, *Suluk Wujil*, *Primbon Bonang*, *Suluk Sujinah*, *Suluk Syaikh Malaya*, *Suluk Pustaka Rancang*, dan *Serat Dewa Ruci*, sekaligus menjadi bukti bahwa para pembawa Islam di wilayah Nusantara lebih didominasi para ahli tarekat dan sufi.

Model dan strategi internalisasi ini selanjutnya tetap lestari di tangan para keturunan dan murid-murid Walisongo di berbagai wilayah Nusantara, dari Aceh hingga Papua, termasuk melalui para Mufti, Teungku, Syaikh, Kyai, Habaib, Tuan Guru, Gurutta, Salik, Mursyid dan para penganjur Islam lainnya. Model dan strategi internalisasi simpatik ini lambat laun sukses dalam skala masif, menarik minat raja-raja dan para penguasa untuk memeluk Islam, sehingga Islam di Nusantara masa itu menjadi agama terpopuler hingga kini dengan corak khas Indonesia, atau populer dengan sebutan Islam-Nusantara.

Rekam jejak nilai-nilai moderasi para Walisongo dalam dakwah Islam ini dapat kita telusuri dalam berbagai prasasti, peninggalan dan catatan kerajaan Islam sejak Samudera





Pasai, Banten, dan Mataram Islam. *Pertama*, nilai moderasi dan toleransi beragama merupakan ciri khas Kesultanan Banten dengan bukti bangunan Vihara Avakolitesvara yang dibangun pada 1652 Masehi dan masih kokoh hingga kini. Warisan peradaban moderasi beragama di Banten ini bahkan dicatat petualang Prancis abad 17, Vincent Le Blanc, yang berpetualang ke Banten di era Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651). Le Blanc menyaksikan sendiri bagaimana sang Sultan Banten memberikan izin kepada warga Tionghoa untuk mendirikan Klenteng sebagai rumah ibadah mereka.

Kedua, nilai moderasi beragama juga menjadi salah satu kebijakan penting dalam sejarah Kesultanan Pasai, Aceh. Salah satu bukti otentik praktik moderasi ini tergambar dalam ornamen kaligrafi Arab di nisan Sultan Zainal Abidin, raja keempat Kesultanan Samudera Pasai, terukir se bait ayat suci Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256, "*La ikraha fi al-din*" (tidak ada paksaan dalam agama). Ukiran kaligrafi ayat ini menggambarkan kebijakan Kesultanan Aceh yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan moderasi beragama, termasuk masyarakat setempat.

Ketiga, nilai moderasi juga terekam dalam praktik keagamaan Sultan Agung yang notabene pewaris jalan dakwah Walisongo dalam menyebarkan ajaran Islam. Fakta ini tampak dalam berbagai ornamen Masjid Besar Mataram di Kotagede yang menyerupai candi. Bahkan, dalam pembangunannya, Sultan Agung banyak mempekerjakan para pemeluk agama Hindu atau Buddha. Selain itu, praktek moderasi beragama sang sultan juga terekam dalam Perayaan Sekaten untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw sebagai sebuah sinergi Islam dengan kebudayaan Nusantara.

Praktik moderasi beragama dalam rekam jejak sejarah panjang Islam Nusantara ini dalam perkembangannya menginspirasi para tokoh pendiri bangsa untuk senantiasa bersikap moderat (*wasathiyah*) dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus menetapkan bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tetapi negara bangsa dalam format Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Jejak Moderasi Beragama dalam Sejarah Kebangsaan

Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara adalah salah satu contoh terbaik praktek Musyawarah-Mufakat berdasarkan prinsip dan nilai Moderasi Beragama di Indonesia. Sejarah menulis, sejak perumusan hingga menjadi konsensus bersama bangsa Indonesia, Pancasila melalui perdebatan panjang dan melibatkan tokoh-tokoh lintas etnis, golongan, dan agama. Melalui rekam perdebatan para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang notabene dibentuk pada periode Maret-April 1945 inilah, nilai dan praktik Moderasi Beragama dan Berbangsa menjadi momentum bersejarah penting bangsa Indonesia. Meski resmi terbentuk April, BPUPKI baru memulai sidang perdana pada 29 Mei 1945, bertempat di Gedung Badan Penasihat Pusat (Chuo Sangi In), Pejambon, Jakarta Pusat.

Prinsip Moderasi dalam keanggotaan BPUPKI sendiri cukup tergambar dalam keragaman etnis, golongan, dan agama tiap anggota. BPUPKI beranggotakan 63 tokoh dengan komposisi 40 berasal dari suku Jawa dan sekitar 23 anggota lainnya bersuku non-Jawa. Ke-23 tokoh non-Jawa tersebut merepresentasikan pluralitas etnis di Indonesia, terdiri dari tujuh anggota beretnis Sunda; empat tokoh Tionghoa; tiga tokoh Padang; dua tokoh Madura; dan masing-masing satu tokoh mewakili etnis Minahasa, Lampung, Ambon, Banten, Batak, Indo-Belanda dan Arab.

Dalam BPUPKI, umat Islam sendiri terwakili oleh tokoh-tokoh dengan corak dan aliran keislaman yang beragam, antara lain KH. Wahid Hasyim (NU); KH. Mas Mansur, A. Kahar Muzakkir, Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah); R. Samsuddin (PUI Sukabumi); KH. Agus Salaim (Penyedar); Sukiman Wiryosandjoyo (PIL); Ny. Sunario Mangunpuspito (Aisyiah); KH. KH. Abdul Halim (PUI Majalengka); RR.

Wongsokusumo (Masyumi); Abdul Rahman Baswedan (Partai Arab Indonesia); Ahmad Sanusi (PUI Sukabumi); Abikusno Tjokrosuyoso (PSII), dan Abdul Rahim Pratalikrama (Residen Kediri). Selain perwakilan Islam, 8 anggota BPUPKI juga mewakili agama Kristen dan Buddha; tiga tokoh Kristen (Pieter Frederik Dahler, AA Maramis dan Johannes Latuharhary); serta lima tokoh beragama Buddha (Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei dan Oey Tjong Hauw).

Sesi sidang pertama BPUPKI antara 29 Mei 1945-1 Juni 1945 fokus membahas perumusan Dasar Negara Republik Indonesia. Ketua BPUPKI dr. Radjiman Wediodiningrat mewakili aspirasi anggota yang hadir mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Soekarno menjawab, dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila, disusul persetujuan Prof. Mohammad Yamin, S.H dan Prof. Dr. Soepomo. Sidang musyawarah BPUPKI akhirnya meminta ketiga tokoh Pergerakan Nasional ini membacakan pidato tentang lima rumusan sila Pancasila awal.

Prof. Mohammad Yamin, S.H dalam sesi sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1945 menyajikan lima rumusan asas Dasar Negara Republik Indonesia, yakni: (1). Peri Kebangsaan; (2). Peri Kemanusiaan; (3). Peri Ketuhanan; (4) Peri Kerakyatan; (5). Kesejahteraan Rakyat. Dalam sidang berikutnya tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo menawarkan lima rumusan “Dasar Negara Indonesia Merdeka”, antara lain: (1). Persatuan; (2). Kekeluargaan; (3). Keseimbangan lahir batin; (4). Musyawarah; dan (5). Keadilan Sosial.

Tepat 01 Juni 1945, Ir. Soekarno juga berkesempatan mempresentasikan lima sila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, disebut “Pancasila”, yaitu: (1). Kebangsaan Indonesia; (2). Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; (3). Mufakat atau Demokrasi; (4). Kesejahteraan Sosial; (5). Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah berdebat dan berdiskusi, Majelis Musyawarah BPUPKI “menerima” usulan Ir. Soekarno “Pancasila” sebagai fondasi dan ideologi negara Indonesia, meski menyisakan “polemik” dan pro-kontra tajam di antara majelis anggota BPUPKI.



Merespons pro-kontra tajam dan belum adanya kesepakatan, pada sidang kedua tanggal 22 Juni 1945, 39 anggota Majelis BPUPKI memprakarsai pembentukan panitia kecil dengan tugas khusus merumuskan ulang lima asas yang bisa menggabungkan dua visi ideologi besar dalam keanggotaan BPUPKI, yakni Kaum Nasionalis dan Islam. Tim kecil ini akhirnya disebut dengan “Panitia-Sembilan” atau “Tim-Sembilan” dengan keanggotaan, berikut: Soekarno (Ketua); Mohammad Hatta (Wakil Ketua); Achmad Soebardjo (Anggota); Mohamman Yamin (Anggota); Wahid Hasjim (Anggota); Kahar Moezakir (Anggota); Abikusno Tjokrosoejoso (Anggota); Agus Salim (Anggota); dan AA Maramis (Anggota).

“Tim-Sembilan” langsung bersidang pada 22 Juni 1945 dan melahirkan Piagam Jakarta yang menyajikan Rancangan Lima Sila, sebagai berikut: Pertama, Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan sementara “diterima” dan selanjutnya menjadi topik perdebatan tajam dalam masa persidangan BPUPKI kedua berikutnya.

Sesi persidangan BPUPKI kedua berlangsung antara 10-17 Juli 1945 dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), Bentuk Negara, Proklamasi Kemerdekaan, Wilayah Negara, dan Kewarganegaraan Indonesia. Majelis Musyawarah BPUPKI dalam sesi ini membentuk tiga kepanitiaan khusus. Pertama, Panitia Perumus Undang-Undang Dasar (UUD) terdiri dari 19 anggota dan Ir. Soekarno selaku ketua. Kedua, Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai Abikusno Tjokrosoejoso. Ketiga, Panitia Perekonomian dan Keuangan diketuai Mohammad Hatta.

Dalam sesi persidangan 12 Juli 1945, menjelang pengesahan konsep Piagam Jakarta, muncul interupsi tajam, terkait aspirasi kaum minoritas non-muslim dari wilayah Indonesia Timur kepada Moh. Hatta. Kaum minoritas non-





muslim meminta agar dilakukan perubahan diktum pertama dari Piagam Jakarta dengan menghapus tujuh kata dari Sila Pertama, menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Aspirasi kaum minoritas non-muslim tersebut mendapat respons mendalam dalam sesi sidang 14 Juli 1945. Dua perwakilan Islam, Ki Bagus Hadikusumo dan KH. Ahmad Sanusi, meminta sila “Ketuhanan, Dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam Bagi Para Pemeluknya” dirubah dengan menghilangkan kalimat bagi para pemeluknya menjadi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam”. Saran perubahan ini langsung menimbulkan reaksi keras dari kaum non-muslim minoritas.

Aspirasi kaum non-muslim minoritas untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta ini menjadi keprihatinan bersama dan menjadi perdebatan panjang, hingga tercetus gagasan membentuk badan baru, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 7 Agustus 1945. Berlandaskan prinsip dan nilai moderasi berbangsa dan beragama serta untuk menghindari potensi disintegrasi dan perpecahan, KH. Wahid Hasyim dan Haji Agus Salim yang mewakili barisan Nasionalisme-Religius bersama Ir. Soekarno yang notabene representasi kaum Nasionalis-Sekuler mengambil peran penting untuk mencari titik temu demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketiga mediator sekaligus inisiator di atas segera berdiskusi dan berkonsultasi dengan tokoh-tokoh kunci anggota PPKI termasuk Kasman Singodimejo, Mr. Teuku Moh. Hassan dan Ki Bagus Hadikusumo sehingga lahir konsensus bersama untuk menghapus tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta dengan memunculkan diksi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai pengganti versi pertama “Ketuhanan, Dengan Kewajiban Syari’at Islam Bagi Para Pemeluknya” dan versi kedua “Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam”.

Titik temu ini tidak menyurutkan langkah Ir. Soekarno untuk tetap meminta doa restu dari para tokoh-tokoh agama di luar anggota PPKI sendiri. Ir. Soekarno meminta kepada Wahid Hasyim untuk meminta *tashih* hasil rumusan terakhir kepada *Hadratussyekh* KH. Hasyim Asy’ari di Jombang Jawa

Timur. Rombongan dipimpin langsung Wahid Hasyim bergerak menemui KH. Hasyim Asy'ari. Mengetahui maksud dan tujuan rombongan, KH. Hasyim Asy'ari tidak serta merta memberi keputusan dan meminta waktu untuk melakukan *istikharah* kebangsaan dengan berpegang teguh pada prinsip bahwa kemerdekaan adalah jalan kebaikan bersama (*masalah 'ammah*), sedangkan perpecahan adalah jalan kerusakan (*mafsadah 'ammah*) dan prinsip toleransi demi terciptanya persatuan.

Di antara bentuk tirakat dan istikharah kebangsaan untuk meneguhkan keselarasan Pancasila dengan nilai dan prinsip syariat Islam, Kiai Hasyim Asy'ari menjalankan puasa tiga hari, khatam Al-Qur'an dan membaca al-Fatihah. Dalam tiap bacaan al-Fatihah, saat tiba pada ayat *iybaka na' budu wa iyyaka nasta'in*, Kiai Hasyim mengulang sebanyak 350.000 kali. Setelah selesai rangkaian tirakat, Kiai Hasyim Asy'ari melakukan rangkaian tirakat kedua, yakni melakukan salat istikharah dua rakaat. Pada rakaat pertama, KH Hasyim membaca surat at-Taubah sebanyak 41 kali, dan pada rakaat kedua, beliau melantunkan surat al-Kahfi dengan jumlah yang sama (41 kali). Rangkaian tersebut ditutup KH. Hasyim Asy'ari menjelang tidur dengan melantunkan bait terkahir Surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. Keesokan paginya, KH. Hasyim Asy'ari menemui Wahid Hasyim beserta rombongan dan menyatakan, Pancasila sudah sesuai dengan syariat Islam.

Melalui mekanisme musyawarah-mufakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama dan berbangsa ini akhirnya tercapai konsensus kebangsaan di Indonesia, serta terhindar dari potensi disintegrasi dan perpecahan antara anak bangsa dalam bentuk final Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, dalam pidatonya Ir. Soekarno mengapresiasi setinggi-tingginya atas tercapainya konsensus kebangsaan bersama antara barisan Nasionalis, Islam, dan non-muslim dan secara terbuka berterima kasih atas kontribusi besar KH. Wahid Hasyim dan H. Agus Salim yang telah menampilkan watak kenegarawanan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan golongan dan agama tertentu.

Bahan Diskusi Kelompok

Fasilitator meminta tiap kelompok untuk mencatat, mencermati alur, dialog dan tokoh-tokoh serta nilai-nilai moderasi yang tercermin dalam tiap-tiap film. Fasilitator meminta tiap kelompok membuat uraian ulang tentang film dalam skema tabel berikut:

| No | Kelompok | Topik Bahasan |
|----|----------|---|
| 1. | Film-1 | <ol style="list-style-type: none">1. Mengidentifikasi nilai-nilai moderasi dalam film-1.2. Menyajikan “catatan-catatan” atau “dialog-dialog” penting dalam film.3. Mengeksplorasi tokoh-tokoh dalam film tersebut berdasarkan agama, suku, dan corak ideologi politiknya.4. Mengeksplorasi penerapan nilai-nilai tersebut di era kekinian. |
| 2. | Film-2 | <ol style="list-style-type: none">1. Mengidentifikasi nilai-nilai moderasi dalam film-1.2. Menyajikan “catatan-catatan” atau “dialog-dialog” penting dalam film.3. Mengeksplorasi tokoh-tokoh dalam film tersebut berdasarkan agama, suku, dan corak ideologi politiknya.4. Mengeksplorasi penerapan nilai-nilai tersebut di era kekinian. |
| 3. | Film-3 | <ol style="list-style-type: none">1. Mengidentifikasi nilai-nilai moderasi dalam film-1.2. Menyajikan “catatan-catatan” atau “dialog-dialog” penting dalam film.3. Mengeksplorasi tokoh-tokoh dalam film tersebut berdasarkan agama, suku, dan corak ideologi politiknya.4. Mengeksplorasi penerapan nilai-nilai tersebut di era kekinian. |



MATERI 6
PEMETAAN
SOSIAL UNTUK
PENGUATAN
MODERASI
BERAGAMA

Sesi ini akan membahas mengenai pemetaan sosial yang diharapkan dapat mengidentifikasi kelompok mana saja yang dapat memberikan dukungan penguatan moderasi beragama dan sumber daya apa saja yang dapat dimobilisir dan dikonsolidasikan untuk tujuan tersebut. Fokus pemetaan ini diarahkan pada lingkungan sekolah, baik di dalam maupun di luar dalam radius sekitar 1 km.



Pokok Bahasan:

- 1) Paradigma, metode, dan teknik pemetaan sosial.
- 2) Pemetaan sosial untuk tujuan penguatan moderasi beragama.
- 3) Pemetaan sosial di lingkungan sekolah.



Tujuan:

- 1) Peserta memahami paradigma, tujuan, dan teknik pemetaan sosial.
- 2) Peserta memahami manfaat pemetaan sosial untuk tujuan penguatan moderasi beragama.
- 3) Peserta memiliki keterampilan dalam melakukan pemetaan sosial untuk tujuan penguatan moderasi beragama di lingkungan (di dalam maupun di luar) sekolah.



Metode:

- 1) *Brainstorming*.
- 2) Presentasi.
- 3) Diskusi kelompok.
- 4) Penugasan.
- 5) *Game*.



Media:

- 1) Materi presentasi.
- 2) Bahan diskusi kelompok.
- 3) Spidol.
- 4) Kertas plano dan *flipchart*.
- 5) LCD proyektor.



Durasi:

Durasi

1) 120 Menit.



Langkah-langkah Pembelajaran:

1. Sapalah peserta dengan hangat dan jelaskan secara singkat materi yang akan dibahas dalam sesi ini. Jelaskan juga kenapa materi ini penting bagi upaya penguatan moderasi beragama. ⌚ 5 menit
2. Mintalah peserta untuk berdiri semua dan membentuk lingkaran besar. Mainkan game “Pencuri Masuk Kampung”. ⌚ 10 menit
3. Refleksikan *game* tersebut, terutama dalam konteks pemetaan sosial untuk penguatan moderasi di lingkungan sekolah. ⌚ 5 menit
4. Tanyakanlah kepada peserta siapa yang sudah pernah melakukan pemetaan sosial? Kalau ada, minta peserta berbagi pengalaman dalam melakukan pemetaan sosial. ⌚ 5 menit
5. Dari *sharing* tadi, diskusikan dengan peserta, apakah mereka bisa menangkap substansi pemetaan sosial? ⌚ 5 menit
6. Kalau ada yang belum cukup jelas, minta salah seorang peserta untuk menjelaskan substansi pemetaan sosial. ⌚ 5 menit
7. Dari penjelasan peserta, ambil beberapa point penting dari pemetaan sosial dan arahkan pada pemahaman bahwa pemetaan sosial adalah upaya untuk mengetahui potret situasi sosial di kawasan tertentu. ⌚ 5 menit

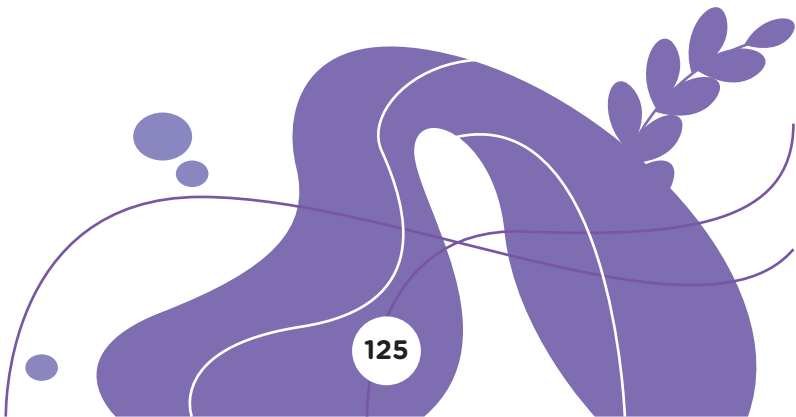
8. Secara lebih detail, ajak peserta untuk masuk dalam substansi pemetaan sosial melalui 6 (enam) pertanyaan kunci terkait dengan upaya penguatan moderasi beragama: (Masuk ke materi presentasi sambil *brainstorming* dengan peserta). ⌚ 20 menit
- Apa yang dimaksud pemetaan sosial?*
 - Mengapa pemetaan perlu dilakukan?*
 - Untuk apa pemetaan dilakukan? Atau apa hasil yang diharapkan dari pemetaan sosial?*
 - Apa saja yang harus dipetakan?*
 - Apa saja instrumen pemetaan yang harus disiapkan?*
 - Bagaimana pemetaan dilakukan?*

9. Beri kesempatan kepada peserta untuk memberikan respons terhadap keseluruhan materi yang sudah disampaikan dan berikan catatan kritis. ⌚ 5 menit

10. Bagi peserta ke dalam 5 kelompok. Tugas masing-masing kelompok. ⌚ 20 menit
- Melakukan pemetaan sosial di dalam sekolah yang terkait dengan orang;*
 - Melakukan pemetaan sosial di dalam sekolah yang terkait dengan sumber daya (nilai-nilai, tradisi, lembaga, kebijakan/peraturan sekolah);*
 - Melakukan pemetaan sosial di luar sekolah yang terkait dengan orang;*
 - Melakukan pemetaan sosial di luar sekolah yang terkait sumber daya (nilai-nilai, tradisi, lembaga, kebijakan/peraturan sekolah);*
 - Melakukan pemetaan sosial di dalam dan di luar sekolah yang terkait dengan aspek kerentanan terhadap masalah moderasi beragama.*

11. Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, maksimal 3 menit untuk masing-masing kelompok. ⌚ 25 menit

12. Berilah catatan terhadap seluruh proses diskusi kelompok. 🕒 5 menit
13. Tutuplah sesi dengan menekankan pentingnya pemetaan sosial dalam rangka penguatan moderasi beragama. 🕒 5 menit





Pemetaan Sosial

Pemetaan sosial (*social mapping*) adalah proses penggambaran masyarakat secara sistematis untuk mengenali dan mendalami kondisi sosial masyarakat tersebut yang dilakukan secara partisipatif dan memberdayakan. Hasil gambaran ini merupakan peta umum sebuah lokasi yang menggambarkan keadaan masyarakat baik lingkungan fisik maupun karakteristik orang-orangnya, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan mendalami bersama masyarakat sebagai basis bagi berbagai agenda perubahan yang hendak dilakukan di masyarakat tersebut.

Dengan adanya pemetaan tersebut, berbagai agenda perubahan yang hendak dilakukan bisa betul-betul menjawab masalah, kebutuhan dan harapan dari masyarakat. Sehingga, agenda tersebut dapat membawa dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian tujuan.

Fokus Pemetaan

Secara umum, ada empat fokus pemetaan yang perlu dicermati. *Pertama* adalah identifikasi populasi sasaran. Dalam hal ini, yang ingin diketahui adalah karakteristik anggota populasi sasaran, baik dari aspek sejarah, demografi, pola komunikasi, respons terhadap struktur, sikap terhadap orang lain, serta cara mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Kedua, identifikasi karakteristik masyarakat. Informasi yang ingin didapat dari karakteristik masyarakat adalah hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya; apa masalah sosial utama yang sangat berpengaruh bagi mereka; kelompok mana yang paling rentan terhadap masalah sosial dan kelompok mana yang paling dominan; dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah sosial? Apa nilai-nilai budayanya, tradisi, atau keyakinan-keyakinan yang penting bagi populasi sasaran? Apa nilai-nilai dominan yang paling memengaruhi populasi sasaran? Bagaimana sikap kelompok-kelompok sosial terhadap nilai-nilai tersebut; adakah penganut dan

penentangannya? Apa saja konflik sosial yang pernah terjadi dan bagaimana mereka menyelesaikannya?

Ketiga, sikap terhadap perbedaan. Informasi yang ingin diperoleh adalah apa perbedaan yang mencolok antara kelompok satu dengan kelompok lainnya; bagaimana perbedaan itu dipandang oleh kelompok dominan dan kelompok mayoritas? Apakah perbedaan-perbedaan itu menyebabkan konflik? Dalam hal apakah perbedaan-perbedaan itu menyebabkan konflik dan dalam hal apakah tidak menyebabkan konflik?

Keempat, identifikasi struktur dan relasi kuasa. Struktur kekuasaan apa saja yang ada di desa tersebut, baik formal maupun informal? Bagaimana proses rekrutmen dan pergantian pemimpin di masyarakat? Bagaimana masyarakat memandang struktur? Apakah struktur kekuasaan sudah berjalan seperti yang diharapkan? Bagaimana pola-pola pengawasan terhadap struktur kekuasaan? Mana yang lebih berpengaruh bagi masyarakat, struktur kekuasaan formal atau struktur kekuasaan informal? Bagaimana hubungan struktur kekuasaan formal dan informal berjalan? Di tingkat masyarakat dan individu, bagaimana relasi kuasa beroperasi di masyarakat? Apa yang membuat individu dan masyarakat segan dan bahkan mungkin tunduk terhadap orang lain?

Kelima, sumber daya. Informasi yang ingin diperoleh adalah, sumber daya apa saja yang ada di masyarakat? Di mana saja sumber daya tersebut berpusat? Siapa saja yang mengelola sumber daya tersebut? Bagaimana mekanisme penentuan pengelola sumber daya tersebut?

Untuk kepentingan penguatan moderasi beragama, pemetaan disederhanakan menjadi 3 hal: (1) pemetaan *stakeholder* (pihak-pihak mana saja yang berpotensi mendukung atau menghalangi penguatan moderasi beragama); (2) pemetaan sumber daya (apa saja sumber daya yang dapat dikonsolidasikan untuk penguatan moderasi beragama? Sumber daya bisa berupa benda, bangunan, atau nilai-nilai seperti tolong menolong; atau tradisi yang sudah berlangsung lama misalnya silaturahmi); (3) Pemetaan kerentanan (masalah apa saja yang berpotensi menghambat implementasi moderasi beragama?);



Teknik Pemetaan Sosial

Metode dan teknik pemetaan sosial biasanya dilakukan dalam tiga bentuk, yakni survey formal, pemantauan cepat (*rapid appraisal*) dan metode partisipatoris, sebagai berikut:

1. Survei Formal. Survei formal dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi standar dari sampel orang atau rumah tangga yang diseleksi secara hati-hati. Survei biasanya mengumpulkan informasi yang dapat dibandingkan mengenai sejumlah orang yang relatif banyak pada kelompok sasaran tertentu.

2. Pemantauan Cepat (*Rapid Appraisal Methods*). Metode ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran dan *stakeholders* lainnya mengenai kondisi geografis dan sosial-ekonomi. Metode Pemantauan Cepat meliputi:
 - a) Wawancara Informan Kunci (*Key Informant Interview*). Wawancara ini terdiri serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap individu-individu tertentu yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam dan semi-terstruktur.
 - b) Diskusi Kelompok Fokus (*Focus Group Discussion*). Diskusi kelompok dapat melibatkan 8-12 anggota yang telah dipilih berdasarkan kesamaan latar belakang. Peserta diskusi bisa para penerima pelayanan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), atau para ketua Rukun Tetangga. Fasilitator menggunakan petunjuk diskusi, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil pengamatannya.
 - c) Wawancara Kelompok Masyarakat (*Community Group Interview*). Wawancara difasilitasi oleh serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada semua anggota masyarakat dalam suatu pertemuan

terbuka. Pewawancara melakukan wawancara secara hati-hati berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

- d) Pengamatan Langsung (*Direct Observation*). Melakukan kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi mengenai kondisi geografis, sosial-ekonomi, sumber-sumber yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial, dll.
- e) Survei Kecil (*Mini-Survey*). Penerapan kuesioner terstruktur (daftar pertanyaan tertutup) terhadap sejumlah kecil sample (antara 50-75 orang). Pemilihan responden dapat menggunakan teknik acak (*random sampling*) ataupun sampel bertujuan (*purposive sampling*). Wawancara dilakukan pada lokasi-lokasi survei yang terbatas seperti sekitar klinik, sekolah, atau balai desa.

3. Metode Partisipatoris. Metode partisipatoris merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpul data dan responden. Pertanyaan-pertanyaan umumnya tidak dirancang secara baku, melainkan hanya garis-garis besarnya saja. Topik-topik pertanyaan bahkan dapat muncul dan berkembang berdasarkan proses tanya-jawab dengan responden. Terdapat banyak teknik pengumpulan data partisipatoris. Empat di bawah ini cukup penting diketahui:

- a) Penelitian dan Aksi Partisipatoris (*Participatory Research and Action*). Metode yang terkenal dengan istilah PRA (dulu disebut *Participatory Rural Appraisal*) ini merupakan alat pengumpulan data yang sangat berkembang dewasa ini. PRA terfokus pada proses pertukaran informasi dan pembelajaran antara pengumpul data dan responden. Metode ini biasanya menggunakan teknik-teknik visual (penggunaan tanaman, biji-bijian, tongkat) sebagai



alat penunjuk pendataan sehingga memudahkan masyarakat biasa (bahkan yang buta huruf) berpartisipasi. PRA memiliki banyak sekali teknik, antara lain Lintas Kawasan, Jenjang Pilihan dan Penilaian, Jenjang Matrik Langsung, Diagram Venn, Jenjang Perbandingan Pasangan (Suharto, 1997; 2002; Hikmat, 2001).

- b) *Stakeholder Analysis*. Analisis terhadap para peserta atau pengurus dan anggota suatu program, proyek pembangunan atau organisasi sosial tertentu mengenai isu-isu yang terjadi di lingkungannya, seperti relasi kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Metode ini digunakan terutama untuk menentukan apa masalah dan kebutuhan suatu organisasi, kelompok, atau masyarakat setempat.
- c) *Beneficiary Assessment*. Pengidentifikasi masalah sosial yang melibatkan konsultasi secara sistematis dengan para penerima pelayanan sosial. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan partisipasi, merancang inisiatif-inisiatif pembangunan, dan menerima masukan-masukan guna memperbaharui sistem dan kualitas pelayanan dan kegiatan pembangunan.
- d) *Monitoring dan Evaluasi Partisipatoris (Participatory Monitoring and Evaluation)*. Metode ini melibatkan anggota masyarakat dari berbagai tingkatan yang bekerjasama mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta melahirkan rekomendasi-rekomendasi.



Game: “Maling Masuk Kampung”

Ajak semua peserta berdiri di tengah-tengah ruangan. Beri masing-masing peserta selotip (3 cm). Setelah semuanya mendapat selotip, fasilitator akan memasang selotip tepat di tengah-tengah ruangan. Masing-masing peserta memasang selotip di sekitar selotip pertama tadi, yang jarak antara selotip satu dan selotip lain kira-kira 80 cm. Pastikan bahwa jarak antara selotip satu dan selotip lain tidak kejauhan dan juga tidak terlalu dekat; minimal 75 cm, maksimal 90 cm.

Setelah semua selotip terpasang, minta semua peserta berdiri persis di atas selotipnya sendiri. Akan ada satu selotip yang kosong di tengah-tengah, yakni selotip milik fasilitator. Fasilitator kemudian menjelaskan aturan mainnya:

Anggap saja itu adalah peta kampung. Masing-masing orang adalah rumah. Ada seorang maling yang sedang mau masuk ke kampung tersebut, dan dia akan menuju rumah kosong yang ada di tengah-tengah. Fasilitator akan berfungsi sebagai maling. Tugas peserta adalah menjaga agar maling tidak bisa masuk kampung. Caranya, pastikan bahwa si maling tidak sampai menginjak selotip yang sedang diinjak peserta. Semua peserta harus menjaga rumah yang kosong. Dan ketika si maling mendekati rumah kosong, seorang peserta di dekatnya harus pindah ke kosong tersebut. Ketika si maling pindah ke rumah kosong lainnya, peserta yang lain juga pindah menempati rumah kosong tersebut, sehingga si maling sama sekali tidak punya kesempatan untuk masuk ke rumah kosong.



MATERI 7
INTERNALISASI
NILAI-NILAI
MODERASI
BERAGAMA
DI SEKOLAH ERA
MILENIAL 4.0

Sesi ini mengajak para peserta untuk me-review dan merefleksikan ulang secara kritis tahap dan strategi internalisasi nilai-nilai moderasi beragama yang selama ini dilakukan di sekolah, sekaligus menemukan dan menggali pendekatan dan strategi penanaman nilai-nilai baru sesuai dengan tuntutan era milenial. Sesi ini membahas 3 (tiga) tema utama, antara lain: *review* atas praktik internalisasi nilai moderasi beragama di sekolah selama ini; perubahan strategi internalisasi nilai moderasi beragama di era milenial 4.0, dan langkah-langkah implementasi nilai moderasi beragama tersebut di kelas-kelas milenial.



Pokok Bahasan:

- 1) *Review* atas praktik internalisasi nilai moderasi beragama dalam lingkup sekolah selama ini.
- 2) Perubahan strategi internalisasi nilai moderasi beragama di sekolah di era milenial 4.0.
- 3) Implementasi 9 nilai Moderasi Beragama bersama siswa di kelas-kelas milenial.



Tujuan:

Setelah mengikuti pelatihan:

- 1) Peserta mampu merefleksikan ulang praktik internalisasi nilai moderasi beragama selama ini.
- 2) Peserta mampu menggali dan mengidentifikasi strategi-strategi baru internalisasi nilai moderasi beragama di era milenial 4.0.
- 3) Peserta mampu menentukan langkah-langkah implementasi nilai-nilai moderasi di kegiatan-kegiatan kelas milenial, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.



Metode:

- 1) Diskusi kelompok.
- 2) Presentasi.
- 3) *Game*.



Media:

- 1) Kertas plano.
- 2) Spidol.
- 3) *Doubletip*.
- 4) Slide presentasi/fasilitator.
- 5) LCD proyektor.

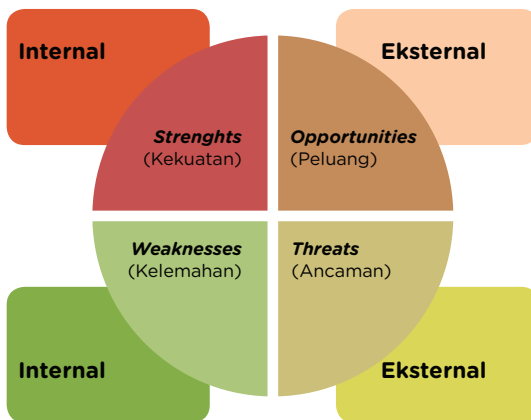


Durasi:

- 1) 150 menit.

Langkah-langkah Pembelajaran:

1. Fasilitator menjelaskan tujuan, substansi materi serta target yang ingin dicapai dari sesi ini kepada seluruh peserta. (🕒 3 menit).
2. Fasilitator meminta 3 perwakilan guru untuk menceritakan pengalaman atau praktik masing-masing guru terkait 3 pokok bahasan di atas, masing-masing selama 3 menit. (🕒 9 Menit)
3. Fasilitator membagi guru menjadi 3 working-groups kecil, masing-masing terdiri dari 7-8 orang untuk masuk ke sesi Diskusi Kelompok.
4. Fasilitator membagi topik tersebut berdasarkan 3 (tiga) pokok-bahasan utama menggunakan **SWOT** sebagai berikut: (🕒 35 Menit)
 - a. *Working-Groups 1: Pokok Bahasan 1*
 - b. *Working-Groups 2: Pokok Bahasan 2*
 - c. *Working-Groups 3: Pokok Bahasan 3*





Catatan Diskusi Kelompok:

Dalam sesi diskusi kelompok, fasilitator memberi penjelasan singkat tentang Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) untuk membedah 3 topik utama. Setelah cukup melakukan dialog dan tanya jawab tentang SWOT, fasilitator mengarahkan ketiga kelompok untuk mendiskusikan ketiga topik utama dengan basis analisa SWOT sebagaimana tabel berikut:

| NO | Topik Bahasan (SWOT) |
|-------------------------|--|
| <i>Working Groups-1</i> | Mengidentifikasi “Kekuatan” dan “Kelemahan” (<i>Review</i> atas praktik internalisasi di sekolah selama ini). |
| <i>Working Groups-2</i> | Mengidentifikasi dan menuliskan “Peluang” dan “Tantangan” (Perubahan Strategi era milenial). |
| <i>Working Groups-3</i> | Menemukan “Pendekatan”, “Strategi-Strategi” serta “Langkah-Langkah” baru dalam implementasi 9 nilai moderasi sesuai kebutuhan pendidikan |

- 5.** Fasilitator meminta setiap kelompok mengidentifikasi dan menuliskan hasil pendalaman masing-masing working-groups dan menuliskan di atas kertas plano. 🕒 35 Menit
- 6.** Fasilitator mengajak peserta memainkan *game* “kura-kura, kelinci dan kuda”. 🕒 10 menit
- 7.** Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya sambil mempersilakan kelompok lain untuk merespon atau mengklarifikasi. 🕒 35 Menit

8. Fasilitator menyusun kembali hasil diskusi dan presentasi tiap kelompok dalam sebuah slide presentasi dan menemukan strategi-strategi dan pendekatan-pendekatan baru dalam internalisasi nilai moderasi di era milenial 4.0.
9. Fasilitator menggarisbawahi beberapa kesimpulan penting dan fasilitator menutup sesi dengan memberi *applause* kepada seluruh peserta. 🕒 15 Menit




Sikap Keagamaan Pelajar/Mahasiswa di Era 4.0 dan Urgensi Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi

A. Potret Sikap Keagamaan Pelajar dan Guru

Tahun 2016, Wahid Foundation (WF) merilis hasil survei nasional tentang Potensi Intoleransi dan Radikalisme Keagamaan di kalangan muslim Indonesia. Rilis Wahid Foundation (WF) menyajikan temuan mengejutkan, ada sekitar 11 juta muslim Indonesia yang “bersedia” menjadi radikal dan sekitar 600 ribu muslim di antaranya mengaku pernah “terlibat” dalam tindakan radikal, meskipun hasil survei WF juga mencatat, muslim mayoritas lainnya, sekitar 108 juta tetap memilih sikap moderatisme dan tidak setuju dengan cara-cara beragama secara radikal dan ekstrem. Tahun 2017, Alvira Research Center (ARC) merilis temuan hasil riset survei yang melibatkan responden sebanyak 1800 mahasiswa muslim di 25 PT se-Indonesia; sekitar 23.5% mahasiswa muslim menyatakan setuju dengan ideologi dan gerakan ISIS, bahkan 23.4% dari mereka menyatakan bersedia berjihad menegakkan khilafah.

Menindaklanjuti rilis di atas, PPIM Jakarta 2018 menyajikan hasil survei potensi dan persepsi para pelajar/mahasiswa muslim dengan temuan mencengangkan; 37.7% responden memahami konsep jihad semata dalam bentuk perang (*qital*); 23.3% meyakini bom bunuh diri sebagai bentuk jihad; 34% menilai orang murtad wajib dibunuh; dan 33.3% responden menyatakan tindakan intoleransi kepada kaum minoritas sebagai sebuah kelaziman. PPIM juga menyajikan temuan spesifik; 58% responden menyebut “medsos”; 48% merujuk “buku” keagamaan; 33.7% menulis “televisi”; dan 17.1% menyebut “pengajian” sebagai sumber rujukan yang paling memberi pengaruh besar pada pemahaman keagamaan di atas.






Selain pelajar/mahasiswa, PPIM juga menyajikan temuan terkait dengan guru dan dosen; 49% guru dan dosen menyatakan tidak setuju jika pemerintah melindungi kelompok minoritas yang menyimpang; 86.5% guru dan dosen setuju pemerintah melarang keberadaan kelompok yang menyimpang; 57% guru dan dosen setuju Yahudi adalah musuh Islam; dan 65.5% guru dan dosen tidak setuju pendirian rumah ibadah di lingkungannya.

Khusus tentang buku-buku PAI (Pendidikan Agama Islam), riset PPIM mencatat, 48.9% pelajar muslim yang merupakan generasi Z memilih untuk “tidak bergaul” lagi dengan pemeluk agama lain dan 12.9% memilih “tidak lagi menghargai” orang lain yang berbeda pendapat justru setelah mengkonsumsi buku-buku PAI yang diajarkan secara formal di sekolah-sekolah agama. Potret ini memberi gambaran jelas tentang mendesaknya konsep, strategi dan tahap internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di kalangan pelajar dan guru, termasuk dalam muatan-muatan kurikulum PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.

B. Konsep, Strategi, dan Tahapan Internalisasi Nilai Moderasi

Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan, pengarusutamaan moderasi beragama (*wasathiyah*) dalam bidang pendidikan dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum pendidikan agama yang berperspektif moderat serta kegiatan pertukaran pelajar dan pemuda lintas budaya, lintas agama serta lintas suku bangsa. Kedua strategi ini tentunya harus mengedepankan internalisasi 9 (sembilan) nilai dan sikap moderasi, antara lain: *tawassuth* (mengambil jalan tengah), *i'tidal* (adil tegak lurus), *tasamuh* (toleransi), *syura* (musyawarah), *ishlah* (kreatif inovatif), *qudwah* (teladan), *wathaniyyah* (nasionalisme), al-la 'unf (anti-ekstremisme kekerasan), serta i'tiraf al-'urf

¹Sembilan (9) nilai moderasi beragama tersebut juga selaras dengan 18 nilai karakter yang

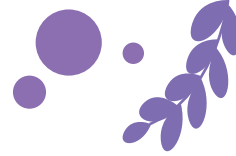


(akomodatif terhadap kebudayaan lokal¹, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Secara konseptual, internalisasi nilai merupakan upaya untuk menghayati nilai-nilai tertentu agar nilai-nilai tersebut tertanam kokoh dalam diri tiap individu, baik melalui pendalaman, peneladanan, pembiasaan, penegakan disiplin, bimbingan, dan motivasi. Internalisasi dalam pengertian ini mengacu pada proses penanaman nilai-nilai pada ranah kognitif, sikap, dan tindakan secara simultan, sehingga terbentuk karakter diri pribadi pelajar dan guru yang sejalan dengan kualitas-kualitas nilai yang ditanamkan.

Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di sekolah dapat dicapai melalui beberapa strategi: *Pertama*, keteladanan (*modelling*) dengan memerankan langsung nilai-nilai dalam tindakan nyata. *Kedua*, pembiasaan (*habituation*) dalam bentuk perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah direplikasi dalam tindakan keseharian para pelajar. *Ketiga*, mengambil pelajaran (*ibrah*) dan perumpamaan (*amtsal*) dari kisah-kisah keteladanan maupun peristiwa-peristiwa lama dan baru. *Keempat*, nasehat (*mauidzah*) tentang kebaikan, kebenaran, moral etika, larangan serta berbagai konsekuensinya. *Kelima*, kedisiplinan (*discipline*) dan kebijaksanaan (*wisdom*).

Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama sendiri juga dapat dilakukan melalui tiga tahap: *Pertama*, mentransformasikan nilai (*transforming values*) dengan cara menyampaikan atau menyisipkan nilai-nilai moderasi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun dalam ceramah-ceramah singkat, sehingga meningkatkan pemahaman atau tingkat afektifitas pelajar tentang nilai-nilai moderasi beragama. *Kedua*, mendialogkan nilai-nilai moderasi, dengan cara membangun komunikasi dan interaksi dua arah antara siswa dengan guru secara timbal balik. Fase ini sekaligus berfungsi sebagai tahap penghayatan sehingga kesadaran kognitif siswa tentang nilai-nilai moderasi semakin meningkat. *Ketiga*, trans-internalisasi, dengan cara mensinergikan sikap mental dan kepribadian antara guru dengan siswa sehingga masing-masing pihak terlibat secara aktif dalam menjaga dan menjalankan nilai-nilai



moderasi beragama.

Internalisasi nilai-nilai tentu juga bermuara pada pembangunan karakter (*character building*) siswa. Karena itu, ada tiga komponen penunjang, yakni pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*) dan perbuatan bermoral (*moral action*). Dalam praktiknya, ketiga komponen ini bisa menjadi rujukan dalam proses, tahapan, dan strategi internalisasi nilai, sehingga terwujud kepribadian siswa yang selaras dengan sembilan nilai moderasi beragama di atas. Jika demikian, siapa saja aktor kunci dalam proses internalisasi nilai moderasi beragama ini? Dan jenis kegiatan sekolah seperti apa yang bisa dijadikan tempat penyemaian dan penanaman nilai-nilai moderasi tersebut?

C. Pimpinan dan Guru: Ujung Tombak Internalisasi Nilai Moderasi

Potret empiris sikap “sebagian” pelajar dan guru yang lebih condong dengan pemahaman radikalisme dan ekstrimisme di atas tentu harus menjadi atensi dan perhatian bersama secara serius, khususnya bagi setiap kepala sekolah. Sebagai langkah pencegahan, kepala sekolah dituntut mampu turut aktif dalam upaya pengarusutamaan dan internalisasi 9 (sembilan) nilai-nilai moderasi beragama di atas, sehingga menjadi protokol baru dalam tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya sebagai pimpinan sekolah.

Kepala sekolah dan dewan guru dapat mulai menginisiasi proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama tersebut dengan mengadaptasikannya dalam konteks pengambilan kebijakan strategis, rekrutmen, dan evaluasi kinerja guru, pengembangan kurikulum, monitoring kegiatan belajar mengajar, penyediaan sarana-prasarana, penentuan buku ajar keagamaan, serta pengalokasian anggaran KBM, sehingga menghasilkan siswa dan pelajar yang berprestasi, kompetitif, toleran dan terhindar dari paham keagamaan radikal dan ekstrem.

Menghadapi siswa milenial, kepala sekolah juga harus meningkatkan kepekaan terkait “muatan-muatan” pengajaran

keagamaan yang bersumber dari media sosial (Youtube, Facebook, Whatsapp, Instagram, Path), mengingat temuan PPIM yang menyebutkan, 58% sikap ekstrimisme sebagian pelajar merujuk pada “medsos” sebagai sumber utamanya. Kepala sekolah dalam hal ini bisa menerbitkan semacam “Protokol Anti Ekstremisme” yang membawahi “Tim Gugus Tugas” yang beranggotakan guru, wali kelas, dan tokoh agama di masyarakat.

Pembentukan Tim Gugus Tugas Anti-Ektremisme ini setidaknya memiliki tiga agenda: *Pertama*, memastikan buku-buku rujukan sejarah dan keagamaan terbebas dari paham-paham radikalisme dan ekstremisme. *Kedua*, menyebarluaskan nilai-nilai moderasi beragama dalam forum-forum *online* para siswa tersebut. *Ketiga*, mengawasi secara aktif forum-forum keagamaan *online* (WA *groups*, dst) para siswa. Dengan demikian, jika ada gejala atau potensi penyimpangan paham keagamaan dapat segera dideteksi dari dini.


Berdasarkan mandat ini, guru agama Islam harus selalu pro aktif, cukup memiliki wawasan nilai moderasi dan rasa percaya diri tinggi, sehingga mampu menjadi “*problem-solver*” bagi tiap *problem* atau masalah keagamaan yang menjadi kegelisahan para siswa dan pelajar.

D. Internalisasi Nilai di Sekolah Secara Kolektif

1. Kegiatan Intrakurikuler

Internalisasi sembilan nilai moderasi beragama juga bisa dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler sekolah. Kegiatan intrakurikuler adalah aktivitas utama sekolah dengan ketentuan alokasi waktu dan struktur program secara khusus. Setidaknya ada beberapa jenis kegiatan intrakurikuler yang dapat dijadikan sebagai sarana penanaman nilai-nilai moderasi di setiap sekolah, antara lain:

- a) *Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) atau Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD)*. Momen MPLS/ MOPD ini adalah masa krusial yang dapat dijadikan momen penanaman dan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Kegiatan ini rutin diselenggarakan



pihak sekolah setiap tahun untuk memperkenalkan almamater sekolah kepada siswa baru. Selain momen perkenalan antar siswa baru, siswa senior, kepala sekolah, dewan guru, dan karyawan, MPLS/MOPD juga memperkenalkan beberapa komponen sekolah lain, termasuk tata tertib, aturan, norma, dan budaya di sekolah.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan, pelaksanaan MPLS/MOPD tidak lagi membolehkan model perpeloncoan atau yang merugikan fisik maupun mental siswa, seperti dalam kasus-kasus korban sebelumnya. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tersebut juga mewajibkan kegiatan MPLS/MOPD harus menekankan pada kegiatan menyenangkan.

Menimbang arah MPLS/MOPD lebih bersifat kognitif, penanaman dan internalisasi nilai moderasi beragama di kalangan siswa baru bisa disisipkan beberapa bentuk aktifitas kolektif, seperti ceramah keagamaan, pentas budaya, diskusi kelompok, *games* yang mendidik, acara nonton film dokumenter dan perjuangan, olahraga atau dialog interaktif secara proporsional dan berimbang.

- b)** *Upacara Bendera Merah Putih.* Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama juga bisa disemai dalam kegiatan mingguan rutin, upacara bendera. Setiap Senin pagi, sekolah melaksanakan upacara bendera melibatkan seluruh aktor kunci sekolah (kepala sekolah, guru dan siswa). Rangkaian upacara bendera ini bisa dijadikan momentum penanaman dan penguatan nilai-nilai moderasi, khususnya dalam sesi “ceramah”, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sikap hormat Bendera Merah Putih serta doa pahlawan. Dalam sesi ceramah misalnya, substansi “nasihat” *mauidhah hasanah* di sesi ini bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah Toleransi Nabi Muhammad Saw, para sahabat, dan etos saling menghormati yang diwariskan para pahlawan

kemerdekaan Indonesia yang saling menghargai kemajemukan, keragaman dan berlatarbelakang lintas iman.

- c) *Kultum Setelah Salat Dzuhur*. Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama juga bisa ditanamkan dalam kegiatan keseharian, khususnya dalam sesi ceramah tujuh menit setelah Salat Dzuhur berjamaah. Materi dalam sesi kultum ini bisa diarahkan mengulas tema-tema penting, seperti Meluruskan Makna Jihad; Indonesia adalah Negara-Muslim; Praktek Toleransi antar Penganut Mazhab dalam Islam; Jihad di Zaman Modern; Kesesuaian Islam dan Demokrasi; Islam Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia; Islam Menjamin Perlindungan terhadap Hak-Hak Perempuan.
- d) *Majalah Dinding (Mading)*. Majalah dinding juga bisa menjadi media internalisasi nilai-nilai moderasi. Fungsi utama majalah dinding adalah untuk menampilkan karya-karya tulis, lukis, puisi para siswa agar dapat dibaca siswa-siswa yang lain. Media ini sangat tepat untuk menampilkan karya-karya siswa dengan topik 9 (sembilan) nilai moderasi beragama dalam berbagai varian jenis karya. Lazimnya mading ini diperbarui sebulan atau 2 bulan sekali.
- e) *Grup Medsos (Whatsapp, Telegram) Pelajaran PAI Guru-Murid*. Mengingat media sosial saat ini sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan belajar mengajar, guru harus aktif terlibat dalam grup-grup Whatsapp yang melibatkan murid untuk mempermudah dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama secara terukur, dialogis dan interaktif.

2. Kegiatan Kokurikuler

Selain intrakurikuler, internalisasi nilai-nilai moderasi juga bisa dilakukan dalam kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler adalah aktivitas di luar intrakurikuler, namun erat terkait dan menunjang kegiatan intrakurikuler. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan siswa terkait materi yang diajarkan dalam kegiatan intrakurikuler. Ada beberapa bentuk kegiatan kokurikuler, antara lain:

- a) *Pekerjaan Rumah (PR) Individu*. Penugasan individu bisa menjadi momen penting bagi siswa untuk memperdalam nilai-nilai moderasi beragama, misalnya dengan memberi penugasan dalam bentuk membuat “ringkasan” poin-poin nilai-nilai *wasathiyah* atau toleransi yang disampaikan ustadz, guru, maupun kepala sekolah, baik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) maupun dalam sesi “pesan” guru pada sesi upacara bendera (mingguan) maupun sesi kultum (harian) setelah salat dzuhur berjamaah.
- b) *Pekerjaan Rumah (PR) kelompok atau Kelompok Belajar Bersama*. Penugasan Kelompok juga bisa menjadi forum penting proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, misalnya dengan menugaskan setiap kelompok belajar untuk mencari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist yang terkait dengan 9 (sembilan) nilai-nilai moderasi beserta *asbabun nuzul* maupun *asbabul wurud* hadist, termasuk tafsir beberapa ulama atasnya. Setelah selesai, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan di depan kelas, sehingga terjadi dialog antar siswa secara intens dan terus menerus. Materi penugasan bisa sangat beragam, ringkasan buku, film dokumenter, maupun diskusi-diskusi di media sosial yang sedang viral.

3. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan Ekstrakurikuler juga dapat menjadi salah satu momentum penting internalisasi nilai-nilai moderasi

beragama. Kegiatan ini lazimnya dilakukan di luar kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler, termasuk memiliki muatan dan substansi pelajaran yang berbeda dengan dua kegiatan sebelumnya. Salah satu tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah mengembangkan bakat dan minat individu siswa, termasuk memperkaya pengetahuan tentang dunia luar, mengasah keahlian bersosialisasi dan keterampilan lainnya. Beberapa bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dijadikan momen internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, antara lain:

- a) *Perkemahan Lintas Agama*. Model perkemahan lintas iman ini sangat berkesan dalam bagi dalam proses internalisasi nilai pada ranah kognitif, afektif, maupun motorik setiap siswa. Peralnya, pengalaman perjumpaan langsung (*direct experience*), multi-interaksi, berdiskusi dan bermain langsung dengan siswa-siswa lintas iman (Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, dan Konghucu) akan menjadi pengalaman baru yang tidak akan terlupakan. Tentu saja mekanisme dan penyelenggaraannya didasarkan pada aturan-aturan umum dan khusus, sehingga tetap menjaga prinsip etika dan moralitas masing-masing pemeluk agama. Lazimnya kegiatan ini bisa dilakukan setahun sekali, kecuali ada pertimbangan-pertimbangan lain.
- b) *Pertukaran Pelajar Lintas Iman*. Kegiatan ini lebih menitikberatkan pada kegiatan kompetisi-kompetisi persahabatan antara sekolah lintas iman, seperti perlombaan olahraga, cerdas cermat, dan kegiatan-kegiatan lain. Kegiatan seperti ini lazim dilakukan pada hari libur dengan jumlah delegasi terbatas.
- c) *Kunjungan Rumah Ibadah*. Kegiatan ini dalam bentuk mengajak delegasi atau perwakilan siswa dari masing-masing sekolah untuk saling berkunjung ke berbagai rumah ibadah bersejarah yang ada di kota masing-masing atau di Indonesia (Masjid, Gereja, Vihara, Klenteng, Candi, dst), bersilaturahmi dengan pengelola, berdiskusi, berdialog dengan Kyai, Pastur, Pendeta dan lainnya tentang sejarah rumah ibadah.

- d) *Festival Budaya Nusantara*. Kegiatan ini menitikberatkan pada upaya mengapresiasi kembali keragaman budaya, etnis, ras yang ada di Indonesia dengan sekian ragam kebudayaan yang ada. Kegiatan ini bisa dilakukan dalam rangkaian kegiatan pentas seni setiap akhir tahun.

Potret sikap keagamaan di kalangan pelajar di atas tentu menjadi pengingat (*alarm*) sekaligus *wake-up call* bagi kita bangsa Indonesia untuk segera berbuat sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing agar generasi Indonesia tidak terpapar semakin dalam oleh ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Salah satu cara yang harus ditempuh adalah dengan melakukan berbagai program penguatan moderasi di kalangan sekolah dengan melibatkan sebanyak mungkin komunitas-komunitas lintas iman. Dengan demikian, tercipta sinergi antar warga negara sebangsa dan setanah air dalam kehidupan yang harmoni dan cinta damai.



MATERI 8
PEMBENTUKAN
PERILAKU
DAN KULTUR
MODERAT DI
SEKOLAH

Sesi ini akan mendiskusikan bagaimana perilaku moderat dibentuk dan dibangun di sekolah. Pembentukan perilaku moderat tentu membutuhkan kultur yang mendukung. Jika kultur yang mendukung ini bisa dibangun, maka kultur moderat di sekolah bisa direkayasa sedemikian rupa sehingga memperkuat *school culture* yang ada di sekolah.



Pokok Bahasan:

- 1) Membangun kultur moderat di sekolah.
- 2) Pembentukan perilaku moderat di kalangan pimpinan sekolah.
- 3) Pembentukan perilaku moderat di lingkungan guru.
- 4) Pembentukan perilaku moderat di lingkungan murid.
- 5) Pembentukan perilaku moderat dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- 6) Membangun jejaring moderasi beragama di dalam dan di luar sekolah.



Tujuan:

Setelah mengikuti pelatihan:

- 1) Peserta mampu merefleksikan ulang praktik internalisasi nilai moderasi beragama selama ini.
- 2) Peserta mampu menggali dan mengidentifikasi strategi-strategi baru internalisasi nilai moderasi beragama di era milenial 4.0.
- 3) Peserta mampu menentukan langkah-langkah implementasi nilai-nilai moderasi di kegiatan-kegiatan kelas milenial, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.



Metode:

- 1) *Brainstorming*.
- 2) Diskusi kelompok.
- 3) Presentasi.
- 4) *Game*.



Media:

- 1) Kertas plano.
- 2) Spidol.
- 3) *Doubletip*.
- 4) Slide presentasi/fasilitator.
- 5) LCD proyektor.



Durasi:

- 1) 240 menit.



Langkah-langkah Pembelajaran:

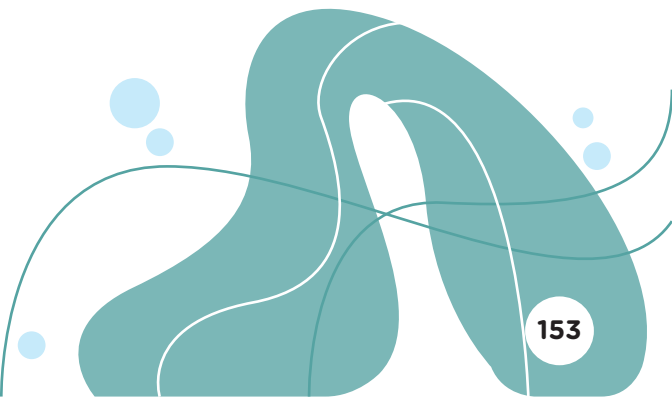
1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan materi yang akan dibahas. ⌚ 3 menit
2. Fasilitator mengaitkan materi dalam sesi ini dengan dua materi sebelumnya (pemetaan sosial dan internalisasi 9 nilai moderasi). Fasilitator sekaligus memandu peserta untuk me-review dua materi tersebut. ⌚ 10 menit
3. Fasilitator melakukan *brainstorming* perilaku moderat di sekolah dan upaya yang telah dilakukan untuk membangun “budaya moderat” dengan mengajukan 3 pertanyaan kunci. ⌚ 10 menit
4. Apa saja agenda yang dirancang sekolah untuk memperkuat moderasi beragama?
5. Bagaimana agenda itu direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi?
6. Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dan bagaimana bentuk keterlibatan mereka?
7. Beri catatan penting terhadap apa yang telah disampaikan peserta. ⌚ 5 menit
8. Minta peserta untuk berdiri semua dan membentuk lingkaran. Mainkan *game* “Duduk Senang, Berdiri Senang” untuk membentuk kelompok. *Game* ini memang dimaksudkan sebagai cara membentuk kelompok sebagai pengantar diskusi kelompok.

- 9.** Masuk ke diskusi kelompok “pembentukan perilaku moderat di kalangan pimpinan sekolah, guru, murid, kegiatan ekstrakurikuler dan penguatan jejaring moderasi”. Jelaskan kepada peserta secara gamblang tugas diskusi kelompok, yakni: 🕒 20 menit

| Kelompok | Topik Bahasan |
|----------|---|
| 1 | Merumuskan strategi dan langkah-langkah pembentukan perilaku moderat di kalangan pimpinan sekolah. |
| 2 | Merumuskan langkah-langkah pembentukan perilaku moderat di kalangan guru |
| 3 | Merumuskan langkah-langkah pembentukan perilaku moderat di kalangan siswa. |
| 4 | Merumuskan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana pembentukan perilaku moderat. |
| 5 | Merumuskan strategi membangun jejaring penguatan moderasi beragama, baik di dalam maupun di luar sekolah. |

- 10.** mempersilakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 🕒 30 menit
- 11.** memberikan catatan dan garis tebal terhadap beberapa point penting dari diskusi kelompok.
- 12.** Masuk ke slide “Membangun Kultur Moderat di Sekolah”. Jelaskan secara gamblang sambil sesekali melibatkan peserta dalam pembahasannya. 🕒 20 menit
- 13.** Beri kesempatan kepada peserta untuk memberikan respons, komentar atau pertanyaan, sekaligus memberi respons balik atau meminta peserta yang lain untuk menanggapi. 🕒 10 menit

- 14.** Tutup sesi dengan pernyataan kunci “Pohon Moderasi” harus ditanam di sekolah, dirawat dan diberi pupuk yang cukup agar sekolah menjadi sejuk dan rindang”. Tutup sesi dengan pernyataan kunci “Pohon Moderasi” harus ditanam di sekolah, dirawat, dan diberi pupuk yang cukup agar sekolah menjadi sejuk dan rindang”.



Membangun Kultur Moderat di Sekolah

Salah satu faktor penting keberhasilan pendidikan di sekolah adalah terciptanya *school culture* (budaya sekolah). Sejumlah penelitian menunjukkan, budaya sekolah telah terbukti memberikan pengaruh yang kuat terhadap pencapaian hasil-hasil akademik siswa. Hasil tinjauan ulang yang dilakukan Anderson (1982) yang dikutip N.A. Suprawoto Sunardjo (2010) terhadap 40 studi tentang iklim/budaya sekolah dari tahun 1964 sampai dengan 1980, hampir lebih dari setengahnya menunjukkan bahwa komitmen guru yang tinggi, norma hubungan kelompok sebaya yang positif, kerja sama tim, ekspektasi yang tinggi dari guru dan administrator, konsistensi dan pengaturan tentang hukuman dan ganjaran, konsensus tentang kurikulum dan pembelajaran, serta kejelasan tujuan dan sasaran telah memberikan sumbangan yang berharga terhadap pencapaian hasil akademik siswa.

Budaya sekolah juga merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun karakter siswa. Pendidikan karakter yang kini menjadi perhatian serius pemerintah tentu perlu mendapat dukungan sejumlah pihak. Karena itu sebagai sarana penting untuk memastikan pendidikan karakter berjalan dengan baik, budaya sekolah tidak bisa lagi dianggap sebagai pilihan, tetapi harus dilihat sebagai kebutuhan dan sekaligus kewajiban dari pihak sekolah khususnya dan seluruh elemen masyarakat dan bangsa pada umumnya.

Kultur sekolah merupakan sebuah daya yang bertenaga, yang mampu memengaruhi bagaimana orang berpikir (*think*), merasa (*feel*), berkeyakinan (*beliefs*) dan bertindak atau bekerja (*act*). Dengan kultur sekolah yang sudah terbangun dengan baik dan kokoh, seluruh warga sekolah merasakan kenyamanan, positif, dan penuh keyakinan serta harapan. Menurut Maila D.H.Rahiem seperti dikutip Harun D. Simarmata (2018), ada beberapa indikator kultur sekolah yaitu guru



menuangkan hatinya dalam mengajar; norma-norma dasar tentang kolegialitas, peningkatan, dan kerja keras; ritual dan tradisi merayakan pencapaian siswa, inovasi guru, dan komitmen orang tua; tersedianya jaringan komunikasi; serta keberhasilan, kebahagiaan dan humor yang berlimpah.

Strategi Membangun Kultur Moderat

Salah satu aspek penting dalam budaya sekolah adalah kultur moderat, yakni pandangan, sikap, tindakan yang selalu berusaha menghindari pilihan-pilihan ekstrem. Sebagaimana kultur sekolah, kultur moderat bukan ekspresi budaya yang tercipta begitu saja. Namun diusahakan sedemikian rupa untuk bisa diwujudkan dalam tindakan nyata. Kultur moderat yang dimaksudkan di sini adalah pewujudan nilai-nilai moderasi beragama yang dalam konteks ini bisa dirumuskan indikatornya sebagai berikut:

Indikator Sembilan Nilai Moderasi Beragama

| No | Nilai Moderasi Beragama | Indikator |
|----|------------------------------|---|
| 1 | Pertengahan/ <i>Tawasuth</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Tidak memihak2. Tidak berat sebelah3. Bertumpu kepada kebenaran4. Berpikir rasional5. Rendah hati6. Memberi manfaat |
| 2 | Tegak lurus/ <i>l'tidal</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Punya pendirian2. Tanggung jawab3. Kritis4. Berpikir dan berkata benar5. Memberikan hak kepada orang lain6. Menempatkan sesuatu sesuai porsinya |
| 3 | Toleransi/ <i>Tasamuh</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Menghargai sesama2. Menghargai budaya3. Tidak memaksakan pendapat/kehendak4. Menerima perbedaan5. Tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi6. Memberi kebebasan bagi orang lain selama tidak merugikan orang lain |

| | | |
|---|---|--|
| 4 | Musyawaharah/ <i>Syura'</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suka berdiskusi 2. Mau mendengar pendapat orang 3. Suka mengajukan pendapat 4. Menerima dan melaksanakan keputusan bersama 5. Berpikir solutif |
| 5 | Reformatif/ <i>Ishlah</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suka minta maaf dan memaafkan 2. Lapang dada 3. Terbuka terhadap kiritikan/masukan 4. Terbuka terhadap perubahan |
| 6 | Kepeloporan/ <i>Qudwah</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki inisiatif 2. Kreatif dan inovatif 3. Rela berkorban 4. Mengajak orang lain terlibat aktif 5. Bisa memotivasi 6. Mampu memobilisasi masa |
| 7 | Kewargaan/ <i>Muwathanah</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cinta Tanah Air 2. Memiliki nasionalisme 3. Menghargai pahlawan 4. Suka sejarah bangsa 5. Bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia 6. Mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia 7. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri dan kelompoknya |
| 8 | Anti kekerasan/ <i>al-la 'unf</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyayang 2. Empati 3. Penolong 4. Ramah 5. Pemaaf 6. Menghargai pandangan dari berbagai sudut pandang |
| 9 | Ramah budaya/ <i>i'tiraf al-'urf</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangga dengan budaya Indonesia 2. Menghargai budaya masyarakat 3. Melestarikan budaya 4. Bisa menampilkan budaya dan seni daerah 5. Mengembangkan kesenian tradisional 6. Mempromosikan budaya daerah |

Untuk membangun kultur moderat di sekolah, pendekatan yang dilakukan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta menarik untuk diadaptasi. Berdasarkan penelitian Muhammad Joko Susilo (2016), untuk menciptakan budaya sekolah yang kondusif memerlukan strategi pencapaian, antara lain: 1) melakukan perencanaan program yang matang dan strategi pencapaian yang jelas, 2) melakukan perubahan *mindset* kepada seluruh *stakeholder*, 3) memberi contoh teladan yang baik, 4) menanamkan nilai-nilai karakter, dan 5) menciptakan daya dukung yang optimal.

Berdasarkan kerangka ini, maka upaya membangun kultur moderat di sekolah bisa dimulai dari beberapa hal berikut:


a. Perencanaan program dan strategi pencapaiannya

Keberhasilan sebuah program ditentukan salah satunya oleh perencanaan yang matang dan sekaligus pilihan-pilihan strategis yang diambil. Demikian juga dalam membangun kultur moderat di sekolah, perencanaan yang matang dan strategi pencapaiannya harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya menjadi lebih mudah dilakukan.

Perencanaan yang baik harus didasarkan pada beberapa hal berikut: (1) berbasis pada kekuatan riil yang dimiliki sekolah; (2) berorientasi pada hasil yang terukur; (3) melibatkan segenap *stakeholder* terkait secara partisipatif dan sukarela; (4) mendeskripsikan setiap tugas dan tanggung jawab serta kewenangan secara jelas dan detail (*job discription*), sehingga peran dan fungsi masing-masing pihak dapat dipahami dengan mudah; (5) menggunakan instrumen penilaian kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.

b. Perubahan *mindset* kepada seluruh *stakeholder*

Untuk membangun kultur moderat di sekolah, semua pihak harus memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Dukungan ini baru bisa terwujud jika ada kesamaan cara pandang mengenai kultur moderat. Karena itu, perubahan *mindset* merupakan salah satu



langkah penting agar dilakukan kepada semua pihak, terutama yang terlibat dalam proses pelaksanaan pendidikan di sekolah. Perubahan *mindset* ini bisa dilakukan melalui beragam kegiatan yang dilakukan di sekolah, baik kegiatan kurikuler, kokurikuler, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam setiap kegiatan inilah penanaman *mindset* bisa dilakukan untuk bisa melahirkan perubahan *mindset*.

c. Keteladanan kepala sekolah dan guru

Keteladanan dari kepala sekolah dan guru merupakan kunci penting keberhasilan program pembangunan kultur moderat di sekolah. Sebagaimana anak-anak usia sekolah pada umumnya, perilaku mereka sebagian besar ditentukan oleh “apa yang dilihat”, bukan “apa yang didengar”. Seberapa pun hebatnya ceramah dan indoktrinasi yang dilakukan pihak sekolah kepada siswa, pada akhirnya siswa akan melihat bagaimana perilaku kepala sekolah dan guru dalam soal implementasi nilai-nilai moderat. Jika guru dan kepala sekolah bisa memberikan keteladanan yang baik, dan didukung oleh kebijakan dan kultur sekolah yang positif, maka perilaku moderat siswa perlahan-perlahan akan terbentuk. Tentu saja keteladanan butuh kebulatan tekad dan komitmen yang tinggi. Itulah sebabnya, perlu ada instrumen khusus yang memastikan bahwa keteladanan itu betul-betul dijalankan, antara lain melalui kebijakan sekolah termasuk pemberian reward and punishment.

d. Penanaman nilai-nilai moderat

Praktik nilai-nilai moderat ibarat pohon. Pohon baru tumbuh dan berkembang setelah ditanam, dirawat dan diberi pupuk yang cukup. Demikian juga kultur moderat. Pertama-tama nilai-nilai moderat perlu ditanamkan ke seluruh *stakeholder*, tidak hanya siswa. Tentu, sebagaimana pohon, tidak cukup hanya ditanam, tetapi juga dijaga bersama, dirawat dan diberi pupuk yang membuat nilai-nilai itu tumbuh dan berkembang dengan cepat. Salah satu “pupuk” yang layak

dipertimbangkan pelaksanaannya adalah memberikan rasa bangga pada seluruh *stakeholder* bahwa sekolah dan seluruh warganya merupakan pelopor moderasi, misalnya. Atau membuat acara tahunan yang secara khusus di-*setting* sedemikian rupa sebagai “*Event Moderasi*” di mana di dalamnya terdapat berbagai jenis lomba dan atraksi yang berkenaan dengan moderasi.

e. *Menciptakan daya dukung yang optimal*

Sebagaimana pohon, nilai-nilai moderasi atau kultur moderat baru bisa berkembang dengan baik jika ada daya dukung yang optimal dari berbagai pihak. Lingkungan yang baik akan melahirkan kultur yang baik pula. Secara lebih spesifik, daya dukung ini bisa dirumuskan dalam beberapa hal: (1) kepedulian semua pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, murid, hingga penjaga kantin dan satpam, untuk berkontribusi demi terciptanya kultur moderat di sekolah; (2) adanya nilai-nilai yang terus dipraktikkan, dilestarikan, dan dijunjung tinggi; (3) adanya hubungan sosial yang hangat dan bersahabat di mana semua orang merasa diterima dan nyaman berada di dalamnya; (4) adanya tradisi, kebiasaan, dan kegiatan-kegiatan rutin yang berorientasi pada nilai-nilai moderat; (5) adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengekspresikan nilai-nilai dan budaya moderat, baik dalam bentuk kesenian, olah raga, karya ilmiah, hingga ruang khusus misalnya “*Pojok Moderasi*”.

f. *Membangun jejaring moderasi*

Hal yang tak kalah penting adalah membangun jejaring, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, untuk penguatan moderasi beragama. Jejaring di dalam sekolah bisa dilakukan dalam bentuk adanya simpul-simpul khusus, baik di kalangan guru maupun siswa, yang saling terhubung satu sama lain di satu sisi dan saling menguatkan dan mengukuhkan di sisi lain. Simpul-simpul bisa menjadi sumber daya yang sangat berharga bagi berbagai upaya pencegahan

ekstremisme dan kekerasan dan sekaligus penguatan sikap moderat di sekolah.

Di samping itu, jejaring perlu dilakukan dengan pihak-pihak lain di luar sekolah. Sumber daya di luar sekolah sangat melimpah jika pihak sekolah bertekad untuk membangun jejaring dengan berbagai pihak, baik individu maupun lembaga. Individu yang dapat dijadikan jejaring adalah guru-guru dan kepala sekolah di luar yang dapat diajak kerja sama untuk penguatan moderasi beragama. Individu juga bisa berupa tokoh atau figur-figur tertentu yang memiliki kapasitas yang relevan dengan kebutuhan sekolah. Sementara, lembaga justru lebih banyak lagi, baik lembaga pemerintah maupun swasta, termasuk *NGO* yang memiliki *concern* di bidang pendidikan dan moderasi serta dunia usaha. Dunia usaha (*corporate*) perlu dijadikan jejaring untuk membangun kultur sekolah yang dapat mendukung pencapaian kualitas yang lebih baik. Dengan jejaring yang makin luas, maka sekolah akan memiliki sumber daya yang tak terbayangkan yang dapat menjadi penyokong keberhasilan pendidikan di sekolah, termasuk dalam membangun kultur moderat.





MATERI 9
PERUMUSAN
RENCANA
TINDAK LANJUT

Sesi ini akan merumuskan apa yang akan dilakukan oleh peserta setelah melakukan pelatihan ini, terutama berkenaan dengan tugasnya sebagai kader pengawasan partisipatif. RTL ini dibagi dalam dua bagian; RTL individu dan RTL kelompok. RTL individu adalah rencana yang akan dilakukan masing-masing peserta setelah mengikuti pelatihan ini. Sedangkan RTL kelompok adalah rencana bersama dari seluruh peserta di kelas yang akan dilakukan setelah pelatihan.



Pokok Bahasan:

- 1) Rencana Tindak Lanjut (RTL) individu.
- 2) Rencana Tindak Lanjut (RTL) kelompok.



Tujuan:

- 1) Menekankan pada peserta bahwa pelatihan ini perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan kongkrit dalam upaya membangun pengawasan partisipatif di masyarakat.
- 2) Mengungkapkan rencana tindak lanjut setelah pelatihan ini, baik pada tingkat individu maupun kelompok.



Metode:

- 1) Curah pendapat (*brainstorming*).
- 2) Mengisi form evaluasi.



Media:

- 1) LCD proyektor.
- 2) Form RTL.
- 3) Kertas plano.
- 4) Spidol.



Durasi:

60 Menit.



Langkah-langkah Pembelajaran:

1. Fasilitator menyapa peserta dengan hangat dan menjelaskan tujuan dan pokok-pokok bahasan dalam rencana tindak lanjut (RTL).
2. Menanyakan kepada peserta pengalaman melakukan rencana tindak lanjut dalam sejumlah pelatihan yang pernah dilakukan.
3. Memberikan catatan penting mengenai respons peserta. Tekankan bahwa RTL ini sangat penting sebagai hasil kongkrit dari pelatihan, sehingga dalam perencanaan dan strateginya tidak sebatas membuat tugas atau PR belaka.
4. Masuk ke *slide* “Langkah praktis melakukan rencana tindak lanjut”.
5. Fasilitator membagikan kertas lembaran RTL kepada semua peserta untuk diisi.
6. Peserta mengisi form RTL mulai dari bentuk kegiatan sampai pada tahapan pelaksanaan, baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Mengisi RTL disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki peserta.
7. Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan dan merumuskan RTL kelompok yang dikerjakan bersama seluruh peserta. Tuliskan hasil RTL kelompok di kertas plano.
8. Fasilitator menutup sesi dengan menekankan bahwa rencana tindak lanjut menjadi ukuran dari keberhasilan pelatihan ini.



Catatan untuk Fasilitator:

Fasilitator diharapkan dapat merangkum dan mengklasifikasikan pelbagai rencana tindak lanjut yang telah dicatat oleh peserta. Secara tidak langsung, ukuran awal keberhasilan pelatihan ini ditentukan oleh sejauh mana fasilitator mampu merumuskan sejumlah kegiatan yang bisa ditindaklanjuti oleh peserta. Fasilitator juga penting menekankan bahwa rencana tindak lanjut tidak harus dalam bentuk kegiatan yang terlalu besar dan muluk-muluk. Yang jauh lebih penting dari rencana tindak lanjut ini adalah bahwa kegiatan yang dirancang tersebut betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan peserta.



Daftar Pustaka

- Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo: Rekonstruksi Sejarah yang Disingkirkan*, (Jakarta: Transpustaka, 2011).
- Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung : Nusa Media, 2015.
- Didin Syafruddin dkk, *Potret Guru Agama: Pandangan tentang Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan*, (Ciputat Timur: PPIM, 2018).
- Dit PSMP Kemdiknas, *Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama*, (Jakarta: Direktorat PSMP Kemdiknas, 2010).
- Jat Jat E. Wirijadinata dan Dian Afriany, “Analisispeningkatan Kualitas Pelayananizin Usaha Perdagangan dengan Menggunakan Causal Loop Diagram”, dalam *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume XIV, Nomor 2, Desember 2017).
- Hamid Nasukhi dkk, *Intoleransi dalam Pendidikan Islam?* (Ciputat Timur: PPIM, 2018).
- Harun D. Simarmata, “Pendidikan Karakter Berbasis Kultur di Sekolah: Sebuah Pemahaman”, *Jurnal Pendidikan Penabur*, No.30/Tahun ke-17/Juni 2018.
- Hasibullah Satrawi, *La Tay’as (Jangan Putus Asa): Ibroh dari kehidupan Teroris & Korbannya*, Jakarta: Yayasan Aliansi Indonesia Damai (AIDA), 2018.
- Henry Thomas Simartama, dkk, *Indonesia Zamrud Toleransi*, (Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, 2017).
- Kambiz Maani, “The Iceberg Model - Four Levels of Thinking” dalam *Decision-making for climate change adaptation: a systems thinking approach*, Australia: The University of Queensland, 2013).
- Khairul Ghazali, *Aksi Perampokan Bukan Fa’l*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2011.
- Khairul Ghazali, *Bersama Rasulullah Saw di Pintu Surga: Tadzkirah untuk Pengantin Jihadis*, Jakarta: Daulat Press Jakarta, 2015.
- Khairul Ghazali, *Mereka Bukan Taghut*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2011.

- 
- Maila D.H.Rahiem, dkk., "School Culture and the Moral Development of Children", 2012, diakses 19 April 2021.
- Muhammad Joko Susilo, "Strategi Menciptakan Budaya Sekolah yang Kondusif Melalui Paradigma Sekolahsekolah Unggul Muhammadiyah", 2106, diakses 19 April 2021.
- N.A. Suprawoto Sunardjo, "Hubungan Iklim Sekolah dengan Hasil Akademik dan Non Akademik Siswa", 2010, diakses 19 April 2021.
- Rosihan Anwar, *In Memoriam: Mengenang Yang Wafat*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).
- Saifudin, Zuhri, *Sejarah kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1979).
- St. Sularto, *Konflik di Balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).
- Thiolina Ferawati Marpaung (dkk), *Janda-Janda Korban Terorisme di Bali, Bali: Yayasan Isana Dewata*, Bali 2016.
- Tim Buku Tempo, *Wahid Hasyim: Untuk Republik dari Tebuireng*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011).
- Tim Penulis, *Ensiklopedia Nahdhatul Ulama*, (Jakarta: Mata Bangsa, PBNU & Mandiri, 2014).
- Tim Penyusun Kemenag, *Gerak Langkah Pendidikan Islam Untuk Moderasi Beragama: Potret Penguatan Islam Rahmatan Lil Alamin Melalui Pendidikan Islam Seri-1*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2019).
- Tim Penyusun Kemenag, *Gerak Langkah Pendidikan Islam Untuk Moderasi Beragama: Potret Penguatan Islam Rahmatan Lil Alamin Melalui Pendidikan Islam Seri-1*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2019).
- Tim Penyusun Kemenag, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Seri-3*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2019).
- Tim Penyusun Kemenag, *Implementasi Moderasi Beragama Pada Direktorat Jendral Pendidikan Islam Seri-2*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2019).
- Tim Penyusun Kemenag, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Tim Penyusun, *Pandangan Keagamaan di Kalangan Professional*, (Jakarta: Alvira Research Center, 2017).

- Tim Penyusun, *Paparan Hasil Survei Nasional: Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial-Keagamaan di kalangan Muslim Indonesia*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2016).
- Tim Penyusun, *Wasatiyyat Islam: Konsepsi Dan Implementasi*, Jakarta: KUK Presiden, 2018.
- Tufyal Choudhury, *Stepping Out: Supporting Exit Strategies from Violence and Extreme*, Washington: Institute for Strategic Dialogue, 2009.
- Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, Cet. Ke-4, (Bandung: Mizan, 2017).
- Zainul Milal al-Bizawie, *Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama Santri (1830-1948)*, (Ciputat: Pustaka Compass, 2016).
- Zuhairi Misrawi, *Hadrastussyaiikh Hasyim Asy'ari : Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kompas, 2010).



PENULIS DAN KONTRIBUTOR


Abdul Aziz, lahir di Cianjur pada 24 September 1954 menempuh pendidikan pada jenjang S1 Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Arab, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1981), S2 Department of Anthropology and Sociology, Monash University, Melbourne, Australia (1992), dan S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Putra dari Ahmad Junaidi ini adalah ASN pada Departemen Agama RI yang pernah menjadi adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (2007 - 2012). Berbagai posisi pernah dijabatnya, antara lain Direktur Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Ditmapenda) Ditjen Bagais (2002 - 2000); Direktur Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Ditpekapontren) Ditjen Bagais (2001 - 2002); Direktur Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri (Ditbinpaisun) Ditjen Binbaga (2000 - 2001); dan Sekretaris Ditjen Binbaga (2000). Aziz menjalani pendidikan nonformal di level nasional maupun internasional, misalnya Pendidikan Jurnalistik Mahasiswa (1974); Pendidikan Dakwah Asia Tenggara Malaysia (1978); Pendidikan Demografi Lembaga Demografi UI (1982); Pendidikan Kepemimpinan Pemuda Internasional (Mesir, 1988);; serta Pelatihan Fasilitator Kepemiluan Internasional BRIDGE (berkedudukan di Canberra, Australia), oleh Australian Election Commission (AEC) di Bandung (2010). Beberapa karya telah dipublikasikan, misalnya Sosiologi Agama (LKIS, 2018), Islam Versus Demokrasi (LKIS, 2018 dan Pustaka Mandiri, 2016), Chiefdom Madinah (Alvabet, 2016 dan 2011), Varian-Varian Fundamentalisme Islam di Indonesia (Diva Pustaka, 2004), Esai- Esai Sosiologi Agama (Diva Pustaka, 2003), serta Islam dan Masyarakat Betawi (LP3ES, 1998 dan Logos, 2002). Ia juga menjadi kontributor buku-buku berikut: Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik (Balitbang Departemen Agama RI, 1998); 50 Tahun Departemen Agama: Perjuangan dan Pengabdian (Departemen Agama RI, 1996); Orientasi Keagamaan pada Masyarakat yang Sedang Berubah (Balitbang Departemen Agama RI, 1996); serta Gerakan Islam Kontemporer (Pustaka



Firdaus, 1988; dan Diva Pustaka, 2004). Selain karya tersebut, sejumlah karya penelitiannya juga telah dipublikasi seperti Jurnal Penamas dan Jurnal Dialog selama masa 1986-1996, Jurnal Harmoni dan Jurnal Edukasi sepanjang 2005-2006, dan tulisan dalam bentuk opini di majalah GATRA pada 2006-2014. Kini ia masih aktif sebagai Mitra Bestari di Jurnal Harmoni (terakreditasi LIPI) dan Jurnal Penamas (terakreditasi LIPI). Kontak melalui email: azahma54@gmail.com.

Agus Muhammad, lahir (di Bondowoso, 17 Agustus 1967) dan dibesarkan dalam tradisi pendidikan pesantren, menyelesaikan pendidikan sarjana di IAIN Sunan Kalijaga (Sekarang UIN) Yogyakarta. Berkesempatan ikut “Short Course Multikulturalisme” di Griffith University Brisbane Australia (2016). Aktif menulis di jurnal maupun di koran, termasuk menulis sejumlah buku, modul pelatihan, dan review buku. Banyak melakukan kajian, penelitian dan pelatihan, terutama dalam isu radikalisme, ekstremisme, toleransi dan isu sosial keagamaan pada umumnya. Pernah menjadi pengurus PP RMI-NU (2010-2015), direktur Moderate Muslim Society (2007-2010), dan kini menjadi Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta. Email: agusmuh@yahoo.com


A. Khoirul Anam, lahir di Gresik 29 Desember 1981, adalah dosen hukum Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta. Jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 juga mengambil spesialisasi hukum Islam. Menempuh pendidikan nonformal di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan Pesantren Ciganjur Jakarta Selatan. Ia aktif menyampaikan dakwah terutama di bidang fikih atau hukum Islam lewat akun youtube Gus A6 maupun rubrik keislaman di beberapa media online. Saat ini ia juga aktif sebagai redaktur senior di website MUI Online dan NU Online serta menjadi bagian dari tim penelaah buku-buku keislaman di Kementerian Agama RI. Pengalamannya di dunia tulis-menulis ditempuh sejak masa muda dengan menjadi redaktur rubrik keislaman di satu media nasional dan menjadi editor buku-buku keislaman di



beberapa penerbit Islam di Jakarta. Ia masih aktif menulis artikel keislaman di beberapa media online dan akhir-akhir ini sangat koncern menulis dengan tagar #LiterasiMuslimDigital dalam rangka menyikapi secara positif kecenderungan umat Islam untuk belajar agama Islam melalui jaringan internet.

Ala'i Nadjib, dosen dan Ketua Program Studi Ilmu Tasawuf Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikannya dimulailah dari S1, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 Leiden University Belanda dan S3 UIN Syarif Hidayatullah. Menulis dan meneliti tentang keislaman, perempuan dan isu-isu aktual berupa artikel, buku dan modul. Di antara modul yang telah dikerjakan; Modul Penguatan Majelis Taklim Perempuan (Tim Asistensi, Litbang Kemenag, UIN dan Organisasi Perempuan), Modul Kesehatan Reproduksi Calon Pengganti (Kontributor, Fatayat NU-UNFPA, 2010), Modul *Action Plan dalam Pelayanan Publik Berbasis Revolusi Mental dan Nilai Agama* (Pusdiklat Kemenag RI 2017), *Integrasi Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam* (Kontributor, Kemenag RI -INOVASI, 2021). Sedangkan buku yang pernah ditulis adalah *Fatwa dan Pandemi Covid-19: Diskursus, Teori dan Praktek* (kontributor 2021); *Menjadi Feminis Muslim* (kontributor 2021); *Faith and Pandemic: Religious Narrative and Covid-19 Survival (Stories and Reflection from Indonesian and Australian Muslims)* (akan terbit September, 2021). Saat ini ia aktif di *Interfaith* (ICIP, MADIA), Wakil Ketua Lakpesdam PBNU, Sekretaris PP Halaqah Majelis Taklim (2019 - 2024), dan Ketua Departemen Gender dan pemberdayaan perempuan IKALUIN (2021-2025).

Ali Muhtarom, lahir di Jepara pada tanggal 25 Mei 1980. Lulus Sarjana (S1) Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta tahun 2005. Memperoleh gelar Magister (S2) Program Studi Pendidikan Islam pada tahun 2008 dan gelar Doktor (S3) Kependidikan Islam pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain sebagai dosen, penulis saat ini juga mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3)



Manajemen Pendidikan Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebagai dosen di bidang Pendidikan Islam, penulis menekuni bidang kajian-kajian keislaman, terutama yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer kependidikan Islam dan moderasi beragama.


Beberapa tulisan karya ilmiah, baik buku maupun hasil riset telah diterbitkan, diantaranya: buku yang berjudul *Ideologi dan Gerakan Islam Transnasional di Indonesia: Kontestasi, Aktor, dan Jaringan*, Zahir, 2019, *Gerakan Keagamaan Islam Transnasional: Diskursus dan Kontestasi Wacana Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019, *Trend Pemikiran Islam di Indonesia Pasca-Orde Baru: Kajian terhadap Literatur Terjemah Keislaman dan Konsumsinya di Kalangan Pemimpin Keagamaan Islam di Jawa Tengah dan Yogyakarta*, kerjasama Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Lektor Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Beberapa karya mengenai moderasi beragama diantaranya, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, Pokja IMA Ditjen Pendis Kementerian Agama RI, 2019, *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*, Yayasan Talibuana Nusantara, 2020, dan *Menanam Kembali Moderasi Beragama untuk Merajut Kebhinnekaan Bangsa*, LP2M UIN SMH Banten, 2020. Berbagai Workshop, konferensi, dan seminar yang telah diikuti diantaranya: Madrasah Kajian Budaya dan Dekolonisasi Humaniora: Teori dan Praktik di bawah bimbingan Prof. Rachmi Diyah Larasati, Ph.D (University of Minnesota, Minneapolis, USA), presenter dalam Joint Seminar on Post Graduate UIN SUKA Yogyakarta-UTHM Johor Malaysia, 2016, International Conference “Islam in Europe: Prospects and Challengges” di Universitas Imam Khomeini Iran tahun 2018, presenter dalam Joint Seminar on Post Graduate UIN Suka Yogyakarta - IIUM Malaysia.



Anis Masykhur, lahir di Temanggung, 26 Jui 1977 adalah seorang dosen ilmu fiqh dan ilmu politik Islam mulai di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Tahun 2002-2003), STAIN Samarinda

(kini menjadi UIN Samarinda) tahun 2003-2011, dan menjadi birokrat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sejak tahun 2011 sampai sekarang. Jenjang pendidikannya di bidang Ilmu Syariah ditempuh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000, dan S-2 Ilmu Politik Islam pada tahun 2004 di Universitas yang sama. Sedangkan S-3 diselesaikan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020. Talenta di bidang menulis tumbuh sejak menjadi mahasiswa yang aktif menjadi kolumnis koran ibu kota dan koran nasional saat itu. Juga menjadi editor pada penerbit Hikmah, Jakarta (Group Mizan) pada tahun 2000-2003. Aktivitas sebagai pimpinan tertinggi pada *Institut for the Study of Religion and Democracy* (IRD) Jakarta makin mengasah skill-nya untuk terus mengadvokasi masyarakat baik litigasi maupun non litigasi di bidang akses pendidikan, agama dan hak asasi manusia. Aktifitas sebagai dosen dan penulis tidak bisa ditinggalkan selama menjadi birokrat pada Kementerian Agama RI.

Mahnun Marbawi, menempuh Pendidikan S1 di STAIN Cirebon tahun 1998-1999. Kang Marbawi—panggilan akrabnya—sempat menjadi volunteer Jaringan Pendidikan Pemilu Rakyat (JPPR). Kemudian menjadi wartawan di Harian Radar Cirebon dari tahun 2000 sampai 2003. Ia hijrah ke Jakarta menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Agama sebagai GPAI. Menyelesaikan Pendidikan S2 di UIN Jakarta tahun 2010 dan S3 pada tahun 2019. Kang Marbawi menjadi Guru Pendidikan Agama Islam selama 17 tahun, tidak menjadikannya merasa puas untuk terus mengasah wawasan dalam soal pendidikan. Mengembangkan diri dan menambah wawasan serta pengalaman dengan banyak terlibat di project-project PVE (*Preventing Violent Extremism*), Toleransi, Sekolah Damai, dan berbagai program pengembangan kapasitas guru, Kang Marbawi banyak terlibat dengan CSO (*Civil Society Organization*) dan institusi pemerintah. Seperti The Asia Foundation (TAF), Wahid Foundation, INFID, AMAN Indonesia, Ma'arif Institute, PPIM UIN Jakarta dan beberapa non profit lainnya. Kang Marbawi juga sejak tahun 2007 ikut membidani lahirnya Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam



Indonesia (AGPAII), sebagai Sekretaris Jenderal (2007-2012, 2012-2017) dan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP AGPAII) Tahun 2017-2022. Isu moderasi beragama, bagi Kang Marbawi, adalah bagian isu yang terus di arus utamakan. Hal ini sesuai dengan Visi AGPAII yaitu menanamkan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin kepada anak didik. Sehingga isu-isu moderasi beragama menjadi bagian isu yang digeluti sejak lama oleh Kang Marbawi. Saat ini, Kang Marbawi, aktif menjadi salah satu birokrat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan PIP non formal-informal BPIP. Kang Marbawi juga menjadi salah satu penulis tetap kolom mingguan Belajar Ringan Filsafat Pancasila di Media on line Pasundan ekspres/Jabar ekspres, Radar Cirebon Group.

Sigit Muryono, lahir di Pacitan 21 Mei 1960, menyelesaikan pendidikannya berturut-turut mulai dari Diploma 1/Akta 1 Matematika, Diploma 2/Akta 2, Sarjana Muda (BA), Sarjana/akta 4 (Drs), Pascasarjana (S-2) pada IKIP Bandung (sekarang UPI Bandung). Ia juga mengambil Sarjana (S-1 Kedua)/Akta 4 pada FKIP Univ Darul Ulum Jombang, Pascasarjana (S3) IKIP Jakarta (sekarang UNJ), Pendidikan Profesi Konselor (PPK) FIP Universitas Negeri Padang (UNP). Sigit menjadi PNS sejak 1 November 1981 hingga 1 Juni 2020 (selama 38 tahun 7 bulan). Sigit mengawali karirnya sebagai Guru SMPN Lubuk Durian Bengkulu Utara, guru SMAN 3 Bengkulu, guru SMA Nusantara 1 Bandung, lalu menjadi dosen tetap FKIP Unihaz Bengkulu, dan pindah status kepegawaiannya menjadi dosen tetap STAIN Bengkulu (sekarang UIN Bengkulu). Selain itu juga menjadi dosen luar biasa Akper Bengkulu, STAIN Curup, STIT Al-Quraniah Bengkulu Selatan, STAINU JKT, Pascasarjana FKIP Unmul dan STAIN Samarinda. Padak tahun 2005 dipindahtugaskan dari dosen untuk menduduki posisi sebagai Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama pada Kanwil KEMENAG Kaltim. Karirnya melonjak menjadi Kepala Biro Sosial Setda Prov Kaltim, Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Kaltim, staf ahli gubernur Kaltim bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan terakhir sebagai Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan

provinsi Kalimantan Utara. (2017-2020). Sigit juga pernah sebagai utusan Indonesia dalam *Course For Leader Trainer World Organization Scout Movement-APR (CLT-WOSM)* di Hongkong 1997; *Youth programme World Organization Scout Movement* di Mesir tahun 2003, dan *Short Course School management di Turkiye* tahun 2010. Buku yang pernah ditulis antara lain Manajemen Berbasis Sekolah, Manajemen Pondok Pesantren, Empati Penalaran Moral dan Pola Asuh Telaah Bimbingan dan Konseling, Agresifitas Pelajar dalam Telaah Bimbingan dan Konseling, Bimbingan dan Konseling dalam Antologi, dan beberapa artikel dalam berbagai journal.

Yanto Bashri adalah ASN Kementerian Agama yang saat ini ditempatkan pada Subdit PAI SD/SDLB Direktorat PAI. Sebelumnya, ia ditugaskan di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, di bidang pendidikan Madrasah Diniyah dan Pesantren. Selain itu ia juga *nyambi* mengajar PAI tingkat SMA dan SMP di Tangsel, juga menjadi dosen UNUSIA Jakarta, dan lainnya. Di organisasi kemasyarakatan, saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris LP Ma'arif NU PBNU. Yanto juga aktif menulis di jurnal, koran, dan buku. Beberapa karyanya telah dipublikasi seperti Kiai in Indonesian Social-Political Changes (JNUS, 2021), Di Balik Aksi Radikal (NUO, 2021) Dinamika Politik NU Era Presiden Gus Dur (Bildung, 2020), Perjuangan Sosial dan Politik Pandemi (2020), dan lainnya.

Selain beberapa nama di atas, dalam penyusunan modul ini telah melibatkan banyak pihak dalam penyempurnaannya yang terdiri dari para akademisi dan juga para birokrat, di antaranya: Bahrul Hayat, Imam Safe'i, Alissa Wahid, Abdul Rachman, Ishfah Abidal Aziz, Aceng Abdul Aziz, dan lain-lain.